

INFERENSI

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Kepemimpinan Kyai Politikus dalam Meningkatkan ESQ Santri
Pondok Pesantren Darussalam Tambakselo Wirosari Grobogan
Jasuri

Strategi Penguatan Simbol Keberagaman Masyarakat Muslim
Minoritas di Salatiga
M. Gufron

Pandangan Masyarakat Pesisir Pantai Bajoe terhadap
Faham *Free Will* dan *Predestination*
Muhammad Hasbi

Mapping The Paradigm of Street Children Intervention:
A Case Study of Insan Mandiri Children Shelter, Yogyakarta
Supardi

DAFTAR ISI



Kepemimpinan Kyai Politikus dalam Meningkatkan ESQ Santri Pondok Pesantren Darussalam Tambakselo Wirosari Grobogan <i>Jasuri</i>	1-20
Strategi Penguatan Simbol Keberagaman Masyarakat Muslim Minoritas di Salatiga <i>M. Gufron</i>	21-47
Pandangan Masyarakat Pesisir Pantai Bajoe terhadap Faham <i>Free Will</i> dan <i>Predestination</i> <i>Muhammad Hasbi</i>	49-66
Mapping The Paradigm of Street Children Intervention: A Case Study of Insan Mandiri Children Shelter, Yogyakarta <i>Supardi</i>	67-81
Afiliasi Politik Kaum Santri Pondok Nazzalal Furqan dan Rodhotul Al-Qur'an Salatiga di Era Multi Partai <i>Abdul Syukur</i>	83-107
Pluralisme dalam Pendidikan Agama di SMA Muhammadiyah Kupang, NTT <i>Aji Sofanudin</i>	109-127
Keberpihakan Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo terhadap Partai Politik <i>Khoiruddin Mochtar</i>	129-163

KEPEMIMPINAN KYAI POLITIKUS DALAM MENINGKATKAN ESQ SANTRI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM TAMBAKSELO WIROSARI GROBOGAN

Jasuri

*Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Semarang
jasuri_sofi@yahoo.co.id*

Abstract

The main problems of the research are: (1) what should the leadership pattern of politician Kyai in developing the ESQ of his santri (students)? (2) how to realize the leadership pattern of politician Kyai in developing Emotional Spiritual Quotient (ESQ) of his santri (students)? This is a naturalistic qualitative research, a research method to investigate the natural object condition in which the researcher is as the key instrument using qualitative approach. This research findings are (1) as a leader of pesantren and politician figure, Kyai must understand himself well, how to play his role, assignments and responsibilities, as well as fulfill criteria showing his charisma as a leader. (2) realization of leadership system of politician Kyai in developing the Emotional Spiritual Quotient (ESQ) of his santri (students) has given moral protection to the santri or students by building their belief (aqidah), mentality (aqliyah), morality (khuluqiyah), corporality (jasadiyah), jihad.

Keywords: *Leadership, politician Kyai, ESQ*

Abstrak

Masalah utama penelitian ini adalah: (1) apa pola kepemimpinan Kyai politikus dalam mengembangkan ESQ dari santrinya (siswa)? (2) bagaimana mewujudkan pola kepemimpinan Kyai politikus dalam mengembangkan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dari santrinya (siswa)? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif naturalistik, metode penelitian untuk mengetahui kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini adalah (1) sebagai pemimpin dari tokoh pesantren dan politisi, Kyai harus memahami dirinya dengan baik, cara memainkan perannya, tugas dan tanggung jawab, serta memenuhi kriteria menunjukkan karismanya sebagai seorang pemimpin. (2)

realisasi sistem kepemimpinan Kyai politikus dalam mengembangkan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dari santrinya (siswa) telah memberikan perlindungan moral kepada para santri atau siswa dengan membangun kepercayaan mereka (aqidah), mentalitas (aqliyah), moralitas (khuluqiyah), corporalality (jasadiyah), jihad.

Kata kunci: *kepemimpinan, kyai politikus, ESQ*

Latar Belakang Masalah

Umat Islam cukup kaya dengan lembaga-lembaga pendidikannya, lembaga yang dimiliki ini adalah termasuk "bank" sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya (Fadjar, 1980: 79). Lembaga pendidikan Islam tersebut salah satu diantaranya yang sangat akrab kita kenal adalah Pondok Pesantren, yang secara makro telah berperan menyadarkan komunitas masyarakat untuk mempunyai idealisme, kemampuan intelektual dan prilaku mulia (al-akhlaq al-karimah) guna menata dan membangun karakter bangsa yang paripurna, peran pesantren hingga saat ini masih teruji dengan usahanya di dalam membentuk etika moral dalam kehidupannya dan mampu bertahan mengangkat pesantren menjadi sebuah "bengkel" moral spiritual (Suwendi, 1998: 115). Dan dengan segala dinamikanya pesantren dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat lewat kegiatan dakwah islam, seperti tercermin dari berbagai pengaruh pesantren terhadap perubahan dan pengembangan individu, sampai pada pengaruhnya terhadap politik di antara para pengasuhnya dan pemerintah (Mas'ud, 2002: 39).

Ada beberapa ciri yang secara umum dimiliki oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Zamakhsyari Dzofier mengajukan lima unsur pondok pesantren yang melekat atas dirinya, yang meliputi: pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan kyai. Dari kelima unsur ciri pondok pesantren tersebut di atas, ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren adalah adanya seorang kyai yang berperan sebagai *ikon*, yakni sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai dengan pola

yang dikehendaki. Di tangan seorang kyailah pesantren itu berada. Oleh karena itu kyai dan pesantren merupakan dua sisi yang selalu berjalan bersama. Dan kyai bertindak sebagai koordinator. Dalam kondisinya yang lebih maju kedudukan seorang kyai dalam pondok pesantren tetap sebagai tokoh primernya. Kyai sebagai pemimpin, pemilik, dan guru yang utama dan secara tidak berlebihan kyai adalah raja pesantren. Lebih jauh pengaruh seorang kyai bukan hanya terbatas dalam pesantrennya, ia juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan masyarakatnya bahkan terdengar ke seluruh penjuru nusantara (Ghazali, 2003: 18).

Pola kepemimpinan kyai yang bertindak sebagai poros sentral di dalam sebuah pesantren nampak pada upaya manajerialnya untuk menanamkan berbagai nilai dalam meningkatkan ESQ santri, maka para kyai di dalam memimpin dan menggerakkan pelaksanaan "*Iqomatuddin*" dan memperkuat "*tauhidullah*" juga perlu ditanamkan kesadaran politik islam bagi santrinya. Penanaman rasa kesadaran politik Islam adalah merupakan tuntutan yang penting (Djaelani, 1994: 143). Sejalan dengan statemen tersebut Ibnu Taimiyah berpendapat: ummat wajib untuk mendirikan "pemerintahan Islam" artinya "kewajiban untuk mendirikan pemerintah Islam itu berawal karena ajaran agama islam, dan dengan pemeritahan itu dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT, karena pengabdian kepada Allah itu melalui cara menta'ati Allah dan rasul-Nya ini merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah yang paling baik, sebab Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan keadilan, melaksanakan hukum hudud, menolong orang yang teraniaya, jihad fisabilillah (perang), dan itu semua tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya pemerintahan Islam yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Oleh sebab itu menjadi penting kiranya untuk mengembangkan kualitas individu yang dimiliki oleh santri, Dan melalui potensi ESQ ini kemudian diharapkan seorang santri dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam. Meskipun antara EQ dan SQ berbeda namun keduanya memiliki kekuatan yang sama penting untuk bersinergi dalam menyusun metode yang lebih dapat diandalkan dalam menemukan pengetahuan yang benar dan hakiki.

Dari berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan kecerdasan intelektual (IQ). Kecerdasan otak barulah merupakan syarat minimal untuk meraih keberhasilan. Kecerdasan emosi yang sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju puncak prestasi, bukan IQ. Banyak orang yang mempunyai intelektual tinggi akhirnya terpuruk di tengah persaingan ESQ sebagai sebuah metode dan konsep yang jelas dan pasti dalam menggerakkan kekosongan batin. ESQ adalah konsep universal yang mampu menghantarkan seseorang pada predikat yang memuaskan bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Permasalahan

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka penelitian ini difokuskan pada pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah seharusnya pola kepemimpinan Kyai politikus dalam meningkatkan ESQ santri? (2) Bagaimanakah realisasi pola kepemimpinan Kyai politikus dalam meningkatkan ESQ santri di pondok pesantren Darussalam Dukuh Jatisari Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan? Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pola kepemimpinan kyai politikus dalam meningkatkan ESQ santri dan Untuk mengetahui realitas pola kepemimpinan kyai politikus dalam meningkatkan ESQ santri di pondok pesantren Darussalam Dukuh Jatisari Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

Tinjauan Pustaka

Pola Kepemimpinan Kyai Politikus

Gambaran secara umum hubungan antara Kyai dan politik adalah *ambivalence* dengan hubungan antara Islam dan negara. Kyai merupakan simbol dari Islam dan politik adalah bingkai dari kemasan negara. Mengenai hal tersebut di sepanjang jaman memang selalu menuai kontroversi, dikerenakan terdapat perbedaan background paradigma masing-masing pelaku politik dan bahkan dapat menimbulkan problem politik yang berkelanjutan.

Kenapa umat Islam sampai berlarut-larut dalam menghadapi problem politik ini ?, penyebabnya adalah: Nash al-Qur'an dan sunnah yang dijadikan rujukan utama ajaran umat Islam tidak mengungkapkan secara eksplisit sistem pemerintahan/ketatanegaraan secara tegas dan rinci. (Ma'arif, 1996: 188). Al-Qur'an tidak meyakini bahwa otoritas politik dapat membentuk dan menguasai nurani manusia. Karenanya dalam Islam sangat perlu mempertimbangkan aspek-aspek lokal, kontekstual dan temporal. Islam telah berjalan sesuai dengan sejarah umatnya dalam empat belas abad lebih namun belum ada konsep yang jelas tentang sistem politik yang berimbang pada munculnya beragam teori dan praktek sistem Islam. Terkait dengan kesulitan pertama dan kedua, sejarah umat Islam mengenai konsep politik diawali dengan justifikasi teologis tentang perbedaan konsep-konsep politik Khawarij, Syi'ah dan Sunni. (Sadzali, 1990: 2). Bangunan politik Khawarij didasarkan atas "*labukma illa lillah*", tidak ada hukum kecuali dari Allah Swt.

Dalam sejarah nampaknya juga telah menorehkan serentetan peristiwa yang terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi hubungan intim antara Kyai dan politik. Dalam hal ini penulis mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang antara lain adalah: (1) Keluarga, Masyarakat di seluruh dunia menobatkan keluarga dalam arti yang sakral dan mendasarkan hubungan interpersonal lainnya, termasuk kewajiban masyarakat dan politik, dalam modelnya keluarga merupakan sebuah satuan primer bagi ketaatan moral sebagaimana sebuah tempat bagi pendidikan sekuler dan agama yang berpengaruh, dan penyampaian pengetahuan agama dan keduniaan dari satu generasi ke generasi. (Elman, 1998: 100). (2) Perkawinan, Perkawinan menjadi sebuah cara untuk mengasosiasikan dan mengatur konflik dan persaingan ekonomi dan politik dalam masyarakat yang lebih luas (N. Tapper 1991: XV, 91-93).

Sejarah menjelaskan bahwa dalam pemerintahan sesaat sebelum revolusi islam, seluruh tujuh "sumber-sumber panutan" memiliki hubungan keluarga yang sama. Beberapa keluarga yang berkeagamaan kunci telah melakukan perkawinan campur dengan elite-elite politik dan ekonomi, termasuk bazari, militer dan para

profesional (Fischer, 1980: 88-97). Dampak dari terjalannya jaringan-jaringan keluarga ini digunakan untuk menyatukan dan mengembangkan pengaruh politik. Lebih lanjut tentang "sumber-sumber panutan" tersebut di atas di antaranya adalah terdiri dari keluarga-keluarga ulam'/Kyai, keluarga-keluarga dari petugas agama yang lebih tinggi dan seterusnya. (3) Kharismatik, Sebagaimana yang telah diamati oleh Weber, tokoh karismatik seperti Kyai harus selalu dikagumi oleh pengikutnya. Sehingga Kyai mampu menduduki posisi sentral dalam mensyaratkan Islam dan menyatakan berbagai golongan hingga mampu melakukan tindakan kolektif jika diperlukan. Bahkan masyarakat telah mengabsahkan Kyai sebagai pemimpin dan juru bicara mereka dalam hubungannya dengan sistem nasional. Status yang tinggi itu tak tergoyahkan di hadapan para pejabat pemerintah. Dan ini dimanfa'tkan sebaik-baiknya oleh Kyai untuk kepentingan masyarakat. Prestasi Kyai semasa perjuangan kemerdekaan melawan penjajah belanda selama revolusi ditambah dengan penghormatan masyarakat atas keahliannya di bidang agama dan ketaatan masyarakat kepada perintah-perintahnya menyebabkan para pejabat pemerintah segan mempersulit Kyai. (4) Idealisme, Umat Islam harus menabuh genderang bahwa ini saatnya dijalankan politik rasional dan fungsional, mengurus kepentingan bersama, yakni kesejahteraan, keadilan dan demokrasi.

Emosional Spiritual Qusion (ESQ) Santri

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ESQ (*emotional spiritual qoutiont*) merupakan hasil kolaborasi dari EQ (*emotional Qoutient*) dan SQ (*spiritual Qoutient*). Maka pada pertengahan 1990-an, Daniel Goleman mempopulerkan penelitian dari banyak nuerolog dan psikolog yang menunjukkan bahwa kecedasan emosional, yang disingkat dengan EQ, sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. EQ memberikan kesadaran mengenai perasaan milik diri sendiri dan juga perasaan milik orang lain. EQ memberikan kita rasa empati, cinta, motivasi dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Sebagaimana dinyatakan Goleman, EQ merupakan persyaratan dasar untuk menggunakan IQ secara efektif. Jika bagian-bagian otak untuk "movasra" telah rusak, kita tidak dapat berfikir efektif. (Zahar, 2002:

12). Pun dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh yang menunjukkan tidak sedikit orang dengan kemampuan intelektual luar biasa namun gagal karena rendahnya kecerdasan emosi yang dimiliki.

Pada dasarnya pola pikir IQ, mengindikasikan dominasi rasionalitas. Rasionalitas dapat berbenturan dengan nilai-nilai tradisi yang emosional termasuk nilai-nilai agama. Rasionalitas juga mengimplikasikan dominasi rasio atau nalar dalam kehidupan. Dominasi rasio ini menyebabkan melemahnya kehidupan beragama, sebagaimana dapat dilihat dari perkembangan sekularisme di dunia barat yang menyisahkan agama dari kehidupan bernegara. Setelah perang dunia ke-2, terutama sejak tahun 1970-an banyak pemikir darat menyadari akibat-akibat negatif dari dominasi rasio itu. (Tampubolon, 2001: 12). Baumer (1977) misalnya, mengatakan telah terjadi dekadensi dalam kebudayaan barat, yang antara lain ditandai oleh semakin jauhnya individu dan masyarakat dari agama. (Maksum, 2004: 99). Dominasi rasio berkembang pesat melalui pendidikan di Indonesia. Selama ini pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi yang terlalu menekankan pada aspek akademik, kecerdasan otak/IQ.

Untuk itu perlu didefinisikan kembali tentang pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah suatu keseluruhan kemampuan individual untuk melakukan satu tindakan yang bertujuan untuk menghadapi lingkungan secara efektif. (Mulyadi, 1998: 61). Sedangkan emosi adalah kondisi bergolak "gangguan keseimbangan" respon kuat dan tidak beraturan terhadap stimulus. Kecerdasan emosi (EQ) menunjuk kepada suatu kemampuan untuk mengendalikan, mengorganisir dan mempergunakan emosi ke arah kegiatan yang mendatangkan hasil optimal. Dengan emosi yang dikendalikan akan menjadi dasar bagi otak untuk dapat berfungsi dengan baik. Dengan demikian kecerdasan emosi tidak mengabaikan kecerdasan intelektual, tetapi melengkapinya agar menjadi satu kekuatan inheren dalam diri seseorang. (Shapino, 2001:81).

Jika anak mampu menahan amarah dan kesalahannya, masih dalam batas kata-kata dan sikap "argumentatif" tentunya hal itu sesungguhnya menandakan kematangan jiwanya. Sedangkan

kecerdasan emosi itu sendiri dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut: (1) Kesadaran diri (*self awareness*), yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri yang kuat. *Self awareness* ini meliputi: kepemimpinan, kesadaran emosi yang menyangkut dengan emosi diri sendiri dan efeknya, penilaian diri secara teliti (mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, percaya diri (keyakinan tentang harga diri dan kemampuan diri. (Mustakim, 2001: 154). (2) Pengaturan diri (*self regulation*), yaitu menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu segera pulih kembali dari tekanan emosi. Pengaturan diri ini meliputi: kemampuan mengendalikan diri (mengelola emosi dan desakan hati yang merusak), sifat dapat dipercaya (memelihara norma kejujuran dan integritas), kehati-hatian (bertanggungjawab atas kinerja pribadi), adaptabilitas (keluwesan dalam menghadapi perubahan), inovasi (mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan pendekatan dan informasi-informasi baru) (3) Motivasi (*motivation*), yaitu menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi. Kecenderungan emosi yang mengantar atau memudahkan pencapaian sasaran yang meliputi: dorongan prestasi (mendorong untuk lebih baik atau memenuhi standar keberhasilan), komitmen (kemampuan menyesuaikan diri dengan sasaran kelompok atau lembaga), inisiatif (kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan), optimisme (kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati ada halangan dan kegagalan). (4) Empati (*empaty*), yaitu merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan orang lain. Empati merupakan kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan dan kepentingan. orang lain Kemampuan ini meliputi: memahami orang lain (mengindra perasaan dan perspektif orang dan menunjukkan minat yang aktif terhadap kepentingan mereka), mengembangkan orang lain (merasakan kebutuhan perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan kemampuan

mereka), orientasi pelayanan (kemampuan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan orang lain), memanfaatkan keagamaan (kemampuan menumbuhkan peluang melalui pergaulan dengan orang lain), kesadaran politis (mampu membaca emosi sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan), (5) Ketrampilan sosial (*social skill*).

Manusia merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna derajatnya apabila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Akibat dari unsur kehidupan yang ada pada manusia. Manusia berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan dalam bentuk fisiologis maupun dalam bentuk psikologis. Sejalan dengan hal tersebut, ternyata faktor ESQ lah yang sedikit banyak turut andil di dalamnya. Dan secara umum faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan itu adalah sebagai berikut: (1) *Faktor intern (hereditas)*, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk fitrah yang paling baik, maka seluruh umat manusia secara fitrah adalah baik, karena dikaruniai konstruksi jasmani dan rohani yang sempurna melebihi makhluk-makhluk lain. (2) *Faktor ekstern (lingkungan)*, selain faktor intern, faktor ekstern juga sangat dominan dalam mempengaruhi perkembangan dan pembentukan manusia, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan, jika pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu.

Metode Penelitian

Subyek dan Obyek Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah realisasi pola kepemimpinan Kyai politikus dalam meningkatkan ESQ santri di pondok pesantren Darussalam Dukuh Jatisari Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Penelitian ini mengambil lokasi di pondok pesantren Darussalam Dukuh Jatisari Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kyai yang menjadi tokoh sentral di pondok pesantren Darussalam Dukuh Jatisari Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen, karena ia sekaligus

merupakan perencana, pelaksana pengumpul data analisis dan penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor-pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari seluruh proses penelitian. (Moleong, 1991: 3).

Jenis dan pendekatan penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tujuan utamanya untuk menerangkan apa adanya atau apa yang ada sekarang, namun secara metodologis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*) (Suparlan, 1993:19). Sedangkan jenis penelitian ini adalah *penelitian kualitatif naturalistik*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiono, 2004: 9). Adapaun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Ciri khas pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendeskripsikan keutuhan kasus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada pewujudan satuan-satuan.

Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data yang lengkap dan benar-benar menjelaskan tentang pola kepemimpinan Kyai politikus dalam meningkatkan ESQ santri di pondok pesantren Darussalam Dukuh Jatisari Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Maka peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber data sebagai berikut: (1) Interview/wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan untuk dijawab secara lisan pula (Suparlan, 1993: 19), (2) Observasi/pengamatan, Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian. (3) Dokumentasi, Untuk mendapatkan data yang lebih akurat selain diperoleh dari sumber manusia, juga diperoleh dari dokumen. Dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto, 1998:

238). (4) Triangulasi/gabungan Triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yang berasal dari sumber yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mengecek kredibilitas/keabsahan data yang telah diperoleh (Sugiono, 2006: 330), dan (5) Data dari kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian.

Pembahasan

Pola Kepemimpinan Kyai Politikus

Kyai politikus dalam melaksanakan kepemimpinannya di pondok pesantren pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Kyai yang tidak bergelar politikus, hal ini terlihat dari kepemimpinannya yang optimal yang dituangkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan *emotional* maupun *spiritual* dari pada santri. Sebagaimana diketahui bahwa Kyai yang paling pokok adalah mengajar dan mendidik, keduanya adalah suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, yang menjadi sorotan utama dari sosok Kyai adalah kemampuan memimpin dalam mengajar dan mendidik. Mengajar sebagai salah satu bentuk kepemimpinan Kyai merupakan kegiatan dalam mentransfer pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada santri sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah nabi. Aspek dominan yang dikembangkan dalam mengajar adalah bagaimana aspek *emotional* dan *spiritual* santri dapat terwujud. Dalam tugasnya, terkadang Kyai mempercayakan pada Ustadz pilihan atau pada seorang atau beberapa orang santri yang benar-benar sesuai untuk posisi sebagai ustadz, namun Kyai bukan langsung lepas tangan, akan tetapi Kyai juga mengambil peran dalam kegiatan mengajar *face to face* dengan santri.

Dalam kepemimpinannya Kyai selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam di Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan telah menentukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin baik itu berhubungan dengan aktivitas internal pesantren maupun kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas

eksternal pesantren atau kegiatan yang berhubungan masyarakat. Sedangkan metode yang digunakan adalah sesuai dengan ciri khas pesantren pada umumnya, yaitu; mengintegrasikan antara pendekatan, metode dan tehnik pembelajaran serta mampu memotivasi santri untuk mau belajar. Realisasi kepemimpinan yang lainnya adalah mendidik, karena mendidik merupakan kegiatan Kyai dalam memberikan contoh, tuntunan, petunjuk, dan keteladanan yang dapat diterapkan atau ditiru dalam sikap dan perilaku yang baik (akhlakul karimah). Untuk itu, Kyai harus mengetahui apa yang telah menjadi fungsi dan kewajibannya, yang antara lain:

1. Memimpin dan menggerakkan pelaksanaan "*Iqomatudin*".
Dalam hal ini Kyai menyelenggarakan pembinaan dan pembentukan kader penerus perjuangan "*Iqomatuddin*".
2. Membina persatuan dan kesatuan dalam menunaikan tugas-tugas/kewajiban "*Iqomatudin*".
3. Melaksanakan pengkajian Islam dan pengembangannya.

Ini diartikan dengan menggali ajaran al-Qur'an dan sunnah, menemukan dan mengemukakan gagasan-gagasan baru yang islami untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa Kyai memiliki tugas sebagai pengajar dan pendidik. Akan tetapi, untuk menganalisis bagaimana realisasi pola kepemimpinan Kyai politikus di pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan secara *kaffah* dan *komprehensif* maka perlu diukur dengan berbagai ciri dan indikator sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kyai yang bersifat transformasional

Dalam hal ini Kyai memotivasi, mengubah, menggerakkan dan mengarahkan santrinya ke tingkat intelektual dan spiritual yang lebih tinggi. Dan pada gilirannya para santri akan "mengontrol" Kyai dengan menempatkan Kyai sebagai panutan dan rujukan. Berdasarkan data yang telah terkumpul di jelaskan bahwa tugas Kyai politikus di pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam memotivasi, mengubah, menggerakkan dan mengarahkan santrinya ke tingkat intelektual dan spiritual yang lebih tinggi dapat dikata-

kan telah memuaskan, hal ini dapat dilihat dari rutinitas kegiatan pondok pesantren yang antara lain; pengajian kitab, shalat berjamaah, musyawarah dan diskusi, latihan pidato/tabligh, dan baca al-Barjanji ad-diba'/burdah.

2. Kepemimpinan Kyai yang responsif

Kepemimpinan ini berpegang pada prinsip bahwa pesantren merupakan lembaga untuk memberikan pelayanan kepada komunitas pesantren (santri, walisantri dan Ustadz) serta masyarakat luas. Dan pesantren selalu terbuka dan ikhlas untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat untuk kemajuan pesantren itu sendiri.

3. Kepemimpinan Kyai yang edukatif

Adalah suatu keharusan bahwa pengelolaan pesantren hendaknya memberi keuntungan bagi santri dengan meningkatkan hasil belajar dan kesalehan perilaku mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ini jelas diperlukan pendidikan yang seoptimal mungkin. Maka demi ketercapaiannya perlu ditunjang beberapa hal penting yang antara lain; misi dan tujuan, proses belajar mengajar, iklim belajar dan lingkungan yang mendukung.

Peran Kepemimpinan Kyai Politikus dalam Meningkatkan ESQ Santri

Jika dilihat dari upaya untuk meningkatkan ESQ santri, maka realisasi kepemimpinan Kyai politikus di pondok pesantren Darusalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan nampak terlihat pada pembinaan ummat (santri) menuju kepribadian yang utama dengan mentalitas yang luhur. Hal ini semata-mata bertujuan pada penegakan *Daulah Islamiyyah* yang tentunya akan menjadi tanggung jawab bagi generasi muda Islam. Ini merupakan standar yang lebih signifikan dan detail untuk menimbang kadar kebangkitan ummat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka, Kyai menggunakan jalur tarbiyah yang berorientasi pada pembangkitan potensi ESQ santri. *Ending*-nya adalah bagaimana Kyai mampu mewujudkan perilaku yang mulia (akhlakul karimah) pada diri santri. Lebih lanjut, perihal upaya Kyai politikus untuk meningkatkan ESQ santri di

pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang antar lain:

1. *Aqidah*

Keimanan kepada Allah dan segala bentuk keimanan dalam Islam merupakan tujuan awal dari penciptaan manusia. Orientasi ketuhanan dalam pendidikan amat penting, oleh sebab itu aspek keimanan ini sangat mendasar dan berpengaruh pada kehidupan manusia jika dikaitkan dengan pendidikan Islam yang intinya adalah mewujudkan manusia-manusia yang memiliki keimanan yang kokoh yaitu Iman yang tidak terbatas hanya pada pengertian dan perkataan, tetapi juga harus diimplementasikan dengan praktek-praktek ibadah dan ritualitas agama yang menumbuhkan sikap positif untuk kehidupan pribadi dan masyarakat. Dalam prakteknya Kyai selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan telah mengupayakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan aqidah, hal ini diwujudkan dalam bentuk pengkajian al-Qur'an, kitab-kitab salaf (kitab kuning), dzikir malam, shalat dan lain sebagainya.

2. *Aqliyyah* (pendidikan ilmu dan sains).

Islam adalah agama yang menghargai akal dan menempatkannya sebagai dasar pemberian beban hukum (taklit) dan sebagai tolak ukur penentuan balasan baik buruk bagi perbuatannya. Dalam al-Qur'an telah banyak disebutkan mengenai himbauan Ilahi agar manusia menggunakan akal pikiran, pengertian dan analisa. Hal ini telah diaplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti madrasah, sekolah umum maupun kejar paket, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan seperti beternak, pertukangan kecil (membuat kaligrafi, mengukir hiasan dinding dan lain-lain), dan pertanian.

3. *Khuluqiyyah* (pendidikan kepribadian moral).

Akhlaq merupakan bagian dari Iman dan keselamatan aqidah serta keikhlasan beribadah yang tergambar pula pada kemantapan akhlaq. Pesantren secara langsung maupun tidak langsung telah mengajarkan santri untuk selalu ta'at dan tawadhu' kepada orang

yang lebih tua dan saling menghormati kepada sesama, ini sebanding lurus dengan sikap suri tauladan yang di tunjukkan oleh Kyai. Dan berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan benar-benar telah melaksanakan hal tersebut.

4. *Jasadiyyah*.

Tubuh merupakan sarana penting manusia untuk mencapai maksud serta melaksanakan kewajiban agama dengan baik. Di antara tujuan menyelenggarakan pendidikan jasmani yaitu agar setiap muslim berbadan sehat untuk memelihara keadaan kesehatan mental, jiwa dan pikiran. Kegiatan ini dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan yang bersifat menyehatkan, kegiatan-kegiatan ini antara lain, pertanian, masak memasak, pertukangan kecil (mengukir hiasan dinding, kaligrafi dan lain-lain).

5. *Jihad*.

Pendidikan ini tidak sama dengan pendidikan kemiliteran, karena pengertian jihad dalam hal ini adalah lebih luas darai pada pengertian kemiliteran. Jihad di dalamnya mencakup tentang Iman, akhlak, jiwa, dan pengorbanan di samping disiplin dan latihan pula seperti kemiliteran. Jihad diartikan dalam arti yang luas, untuk tingkatan yang paling tinggi adalah perang pada jalan Allah. Diantara kedua itu adalah jihad lisan, pena, angan, perkataan yang benar di hadapan orang yang dzalim. Bentuk-bentuk kegiatan yang ada di pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan pada dasarnya berporos pada satu tujuan yaitu selalu *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap segala hal.

6. *Ijtima'i* (pendidikan sosial).

Beramal untuk kebaikan masyarakat merupakan bagian dari misi ini. Hal ini mempunyai tiga jalur utama yaitu, ibadah yang merupakan perwujudan dengan hamba Allah, amal kemanusiaan yang merupakan perwujudan hubungan sesama manusia dan jihad melawan musuh-musuh agama. Kegiatan-kegiatan sosial ini telah terlaksana dengan baik melalui pengumpulan pakaian dan beras untuk di kasihkan kepada fakir miskin, penyembelihan hewan qurban dan lain sebagainya.

7. Politik.

Yang dimaksud dengan aspek ini adalah segala apa yang berhubungan dengan pemerintahan, tata negara dan hubungan antar pemerintah dengan rakyat. Pendidikan politik ini didasarkan atas sejumlah prinsip yaitu, memperkuat kesadaran dan wajib membebaskan negeri Islam dari setiap kekuasaan asing dan mengusir penjajah dari negeri Islam dengan segala cara yang syah, membangkitkan kesadaran dan perasaan atas wajibnya mendirikan pemerintahan Islam, membangkitkan kesadaran dan perasaan akan wajibnya untuk mewujudkan persatuan Islam.

Kyai selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi ganda, selain sebagai imam pondok Kyai juga memposisikan dirinya sebagai negarawan. Dalam hal ini Kyai terkadang melibatkan santri untuk ikut mendampinginya manakala ada acara-acara yang bersifat kenegaraan maupun politik. Dari sini santri secara tidak langsung akan mampu menangkap dan merespon apa-apa yang telah didupatkannya kemudian memfilternya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu sikap.

Berdasarkan pada hal-hal yang tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi pola kepemimpinan Kyai politikus dalam meningkatkan ESQ santri di pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan secara umum dapat dikategorikan baik atau dengan kata lain sudah sangat optimal. Hal ini tercermin pada aspek-aspek akhlakul karimah yang merupakan manifesasi dari kecakapan ESQ yang memiliki kedudukan tinggi, karena akhlakul karimah merupakan pilar terpenting yang menyangga pondasi syari'ah, tarbiyah dan penyiapan aqidah Islam yang kelengkapan kandungannya dimaksudkan untuk menyempurnakan akhlak, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pastinya ada beberapa kekurangan yang mungkin saja terlihat, akan tetapi itu sangat manusiawi dan wajar, tergantung dari sudut pandang mana seseorang itu melihatnya dan atas latar belakang pemikiran apa seseorang itu berpendapat.

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Sebagai seorang pemimpin pondok pesantren dan sekaligus sebagai tokoh politikus, maka Kyai harus memahami betul siapakah dirinya, bagaimana melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memenuhi berbagai kriteria yang menunjukkan kharismanya sebagai seorang pemimpin. Hal ini ditandai dengan ciri Kyai yang bersifat transformasional, responsif dan edukatif yang nantinya akan menjadi tonggak awal bagi terciptanya *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ) yang akhirnya bermuara pada pada asas *amar ma'ruf nahi munkar* dan *Li-iqomatuddin*.

Kedua, secara umum realisasi dari pola kepemimpinan Kyai politikus dalam meningkatkan ESQ santri di Pondok Pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dapat dikatatakan telah mencapai hasil yang optimal/baik, hal ini tercermin pada program-program yang telah dilaksanakan oleh pondok pesantren dan dapat menjadi upaya untuk menanamkan kebangkitan Islam, menegakkan nilai-nilai Islam dan yang lebih penting adalah memberikan benteng moral pada santri dengan jalan membangun aqidah, aqliyah, khuluqiyah, jasadiyah, jihad, Ijtima' dan politik yang bertujuan untuk membangkitkan dan meningkatkan *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ) yang ada di setiap pribadi santri.

Lembaga pendidikan pondok pesantren merupakan limpahan tanggung jawab dari orang tua yang mempercayakan sepenuhnya untuk mendidik dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki santri secara optimal serta merubah karakter anak untuk dapat berperilaku yang baik (akhlakul karimah). Untuk itu dengan tanggung jawab yang dilimpahkan tersebut lembaga pendidikan pondok pesantren dipandang perlu untuk bekerjasama dengan pihak yang berkompeten di dalamnya sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi ketercapaian bangunan pendidikan yang berdiri di atas dasar-dasar yang kokoh berupa nilai-nilai norma aqidah Islam sehingga tujuan pendidikan dapat terealisasikan sesuai dengan yang diharapkan. Kyai harus tetap memperhatikan perkembangan dan

karakteristik peserta didiknya agar memiliki ketrampilan-ketrampilan terutama dalam mengamalkan ajaran-ajaran Agama sehingga dapat tercipta tingkah laku dan kepribadian yang mencerminkan manusia yang beriman dan berakhlakul karimah. Santri yang baik adalah santri yang selalu berupaya untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya dengan memperhatikan atas apa yang ia peroleh dan patuh terhadap apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Kyai, sedangkan untuk lebih meningkatkan keilmuan yang dimiliki oleh santri tentunya santri tidak hanya berbekal pada ilmu-ilmu agama dan tidak menafikan ilmu-ilmu yang bersifat umum dan mendidik harus pula dipelajari.

Daftar Pustaka

- Achmadi. 1984. *Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar*, Salatiga: CV. Saudara Salatiga
- Agustin, Ary Ginandjar. 2001. *Rabasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Jakarta: Arga.
- Ali, A. Mukti. 1987. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arikunto. Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy'ari, Zubaidi Hasbullah. 1996. *Moralitas Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKPSM.
- Azis, A. Ghaffar. 2000. *Berpolitik Untuk Ulama', Misi Islam, Kristen Dan Yahudi Tentang Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Azwar, Saifudin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri Ghazali, 2002. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, CV.Prasasti, Jakarta, 2003.
- Chitick, William C. 2001. *Jalan Cinta Sang Sufi*. Yogyakarta: iRCiSoD.
- Elman, Dale F Eick. 1998. James Piscatori, *Politik Muslim, Wacana Kekuasaan Dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Fadjar, Malik. 1980. *Visi Pembaharuan Islam*. Jakarta: PL3NI.

- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Reserarch Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Horikosyi, Hiroko 1987. *Kyai Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Iskandar, Sholeh. tt. *Pokok Pikiran Mengenai Pengembangan Pondok Pesanten*, Bogor: Badan Pelaksana Majelis Pimpinan BKSP Jawa Barat.
- Jaelani, Abdul Qadir. 1994. *Peran Ulama' Dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ma'araif, Syafi'i. 1996. *Islam Dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi. 2004. *Paradigma Pendidikan Universal: Di Era Modern Dan Post Modern "Mencari Visi Baru atas Realitas Baru" Pendidikan Kita*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Asdimahastiya.
- Marzuki. 1983. *Metodologi research*. Yagyakarta: FE UII.
- Mas'ud, Abdurrahman dkk., 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mashall, Danah Zohar dan Ian. 2002. *SQ Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir Integralistik dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Masyhud, Sultjon dan Moh Khusnuldiro. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka.
- Moleong, Lexy. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir. 2001. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Mustakim. 2001. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Poerwanto, Ngalim. 1981. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara.
- Sadzali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI press.

- Shapino, Laurence E. 2001. *Mengajarkan Emotional Intelegence Pada Anak*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemanto, Waaty. 1998. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumidjo, Wahyu. 2003. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritis dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindopersada.
- Suwendi. 1998. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syah, Muhibbin. 2000. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tampubolon, Daulat P. 2001. *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Kecerdasan-21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Walgito, Bimo. 1990. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Woodward, Mark R. 1999. *Islam Java Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKIS.
- Yusuf, Ali Anwar. 2002. *Wawasan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

STRATEGI PENGUATAN SIMBOL KEBERAGAMAAN MASYARAKAT MUSLIM MINORITAS DI SALATIGA

M. Gufron

*Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
gufron@gmail.com*

Abstract

This research tried to address problems: (1) what is the religious condition of the minority muslim society like in Randuares, Kumpulrejo, Argomulyo, Salatiga?; (2) what strategies were made by the minority muslim society in Randuares, Kumpulrejo, Argomulyo, Salatiga to strengthen their religious symbol?; (3) what roles were the religious leaders played to strengthen the minority muslim society's religious symbol in Randuares, Kumpulrejo, Argomulyo, Salatiga?. This research used a qualitative approach with ethno-methodological model. The data collection technique in this method is emphasized to interview. This research uncovered that the minority muslim society in Randuaris tried to use strategies to show their existence, as a type of their reinforcement to the religious symbol. The strategies are; (1) mosque's role optimization; (2) institutionalization of majlis taklim (religious teaching group); and (3) forming religious leaders.

Keywords: *strategies, religious symbols, minority Muslim*

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menangani masalah: (1) apa kondisi keagamaan masyarakat minoritas muslim seperti di Randuares, Kumpulrejo, Argomulyo, Salatiga, (2) strategi apa yang dibuat oleh masyarakat minoritas muslim di Randuares, Kumpulrejo, Argomulyo, Salatiga untuk memperkuat simbol keagamaan mereka, ? (3) apa peran yang dimainkan para pemimpin agama untuk memperkuat simbol keagamaan masyarakat minoritas muslim di Randuares, Kumpulrejo, Argomulyo, Salatiga?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model etno-metodologi. Teknik pengumpulan data dalam metode ini ditekankan pada wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat minoritas muslim di Randuaris mencoba menggunakan strategi untuk menunjukkan keberadaan mereka, sebagai

suatu jenis penguatan mereka terhadap simbol agama. Strateginya adalah; (1) optimasi peran masjid, (2) pelembagaan majlis taklim (kelompok ajaran agama), dan (3) membentuk pemimpin agama.

Kata kunci: *Strategi, agama simbol, minoritas Muslim*

Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang salah satunya diindikasikan dengan terjadinya berbagai interaksi dan hubungan antarindividu manusia dalam sebuah masyarakat. Interaksi dan hubungan dalam masyarakat tersebut yang kemudian menjadi penanda pentingnya hidup berdampingan atau hidup berkelompok. Disadari atau tidak dalam satu masyarakat akan lahir beberapa perbedaan cara pandang selain persamaan-persamaan yang ada dalam kelompok tersebut. Selain itu, melalui komunitas masyarakat tersebut akan terpecahkan beberapa persoalan yang dipandang tidak bisa dipecahkan secara individual.

Hubungan antaragama selalu menjadi isu menarik dalam dunia-dunia sosial. Realitas dunia yang plural semakin disadari umat manusia. Kesadaran ini bukanlah hanya karena manusia telah mampu melihat jumlah etnis atau bangsa yang sangat beragam di dunia ini. Tetapi kesadaran itu pula mengalami perkembangan sesuai dengan epistem zamannya. Ada perbedaan karakteristik pluralisme masa lampau dan masa modern. Pada masa lampau kesadaran

Kebudayaan sebagai produk eksistensi hidup manusia, meliputi berbagai aspek kehidupannya, baik sosial, ekonomi, politik, seni, ilmu maupun agama, yang diwujudkan dalam ruang dan waktu yang berbeda dan beragam, yang menunjukkan pada adanya tempat dan lokasi yang berbeda serta dalam kurun waktu yang berbeda pula, dulu, kinidan esok. Kebudayaan sebagai produk eksistensi mencerminkan sepenuhnya adanya pluralitas dan perubahan. Kebudayaan juga merupakan simbol dari eksistensi manusia yang dibangga-banggakan yang menjadi ciri keberadaannya. Al-Qur'an 30:32 mengatakan: "Tiap-tiap golongan membanggakan apa yang ada pada mereka".

Sebagai wujud simbolik yang mencerminkan makna keberadaan manusia, maka kebudayaan seringkali menjadi wakil keber-

adaan manusia yang dianggap sakral, sehingga penghinaan terhadap produk kebudayaan yang menjadi simbol keberadaan seseorang atau kelompok masyarakat itu, akan dianggap sebagai penghinaan terhadapnya, dan secara emosional ia akan membela mati-matian harga dirinya yang dihinakan itu. Dalam hubungan ini, bendera misalnya, sebagai keberadaannya suatu bangsa seringkali menjadi korban untuk melampiaskan perasaan kebencian atau ketidak-senangan terhadap bangsa, yang diwujudkan dengan pembakaran bendera yang menjadi kebanggaannya.

Berdasarkan rujukan para pemikir Islam klasik terhadap al-Qur'an dan sunnah serta perilaku khulafa' ar-rasyidin, sekalipun para pemikir Islam klasik itu menyanggah ajaran-ajaran agama selain Islam dan tidak mengenal konsep pluralisme beragama, tetapi mereka sangat mementingkan faktor toleransi beragama, hidup rukun, saling menghormati dan bersama-sama membangun peradaban dan kehidupan sosial. Ada beberapa landasan pemikiran mengapa tanpa faktor pluralisme para pemikir Islam meyakini adanya toleransi beragama serta mempraktekkannya, antara lain: Ideologi Islam yang mengajarkan Islam tentang kehormatan umat manusia. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firmanNya: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam" (Al-Isra', 17:70). Karenanya Rasulullah SAW tidak segan berdiri menghormati jenazah, sekalipun itu jenazahnya orang Yahudi. Rasulullah pun tak segan menjamu makan dan minum terhadap tamunya utusan orang-orang Nasrani dan Najran.

Masyarakat desa Randuaris kecamatan Argomulyo Kodya Salatiga merupakan masyarakat pluralis. Beberapa keyakinan dan agama hidup dan berkembang di sana, bahkan Randuaris dianggap sebagai salah satu sentral pendidikan kristen, dibuktikan dengan berdirinya sekolah Teologi untuk pemeluk agama Kristen. Memang konflik tidak begitu terlihat, namun demikian secara lebih mendalam bila diamati, terjadi persaingan dan pergeseran masyarakat lokal dan petang, atau masyarakat mayoritas dan minoritas.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Randuaris bergerak di sektor swasta dan sebagian kecil bergerak dalam sektor tak menentu, atau serabutan sehingga dalam kegiatan keberagamaan tidak begitu terlihat. Sedangkan kegiatan keagamaan masyarakat

non muslim lebih menonjol bila dibandingkan dengan kegiatan keagamaan masyarakat muslim. Ini disebabkan karena adanya lembaga pendidikan yang cukup besar dan peserta yang memiliki kegiatan pendidikan harus dan wajib untuk tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian mereka secara leluasa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. Sehingga dalam jangka waktu yang tidak begitu lama masyarakat non muslim dapat berkembang dengan cukup cepat sedangkan masyarakat muslim sedikit demi sedikit tergeser. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menelisik bagaimana hakikat keberagaman masyarakat minoritas di Randuaris, dan strategi apa yang mereka lakukan untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan: (1) bagaimana kondisi keberagaman masyarakat Muslim minoritas di Dusun Randuares kelurahan Kumpulrejo Kec. Argomulyo Salatiga?; (2) strategi apa yang dilakukan masyarakat muslim minoritas Dusun Randuares Kelurahan Kumpulrejo Kec. Argomulyo Salatiga untuk memperkuat simbol keberagaman?; (3) bagaimana peran tokoh agama Islam dalam upaya penguatan simbol keberagaman masyarakat Muslim minoritas di Dusun Randuares kelurahan Kumpulrejo Kec. Argomulyo Salatiga?. Adapaun tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui kondisi keberagaman masyarakat minorita; (2) mengukur strategi yang dilakukan guna menjaga eksistensi keberagaman masyarakat minoritas; (3) mengetahui seberapa besar peran para tokoh masyarakat dalam penguatan strategi keberagaman di dusun Randuares.

Kajian Pustaka

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa diambil dari istilah yang dikembangkan oleh David C. Korten dan Rudi Klauss. Ada beberapa kecenderungan baru dalam pemikiran tentang pembangunan pedesaan, diantaranya ialah konsep-konsep pembangunan *people-centered development*, *Institution development*, *self-reliance* (kemandirian), dan *sustainability* (kelestarian). Mengingat penelitian

ini mengenai Elit Agama, Integritas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka peneliti ingin menambahkan sebuah lagi, "value-oriented development" – dalam arti kata akan dijelaskan pada paragraf kemudian – pembangunan yang berorientasi nilai. Konsep "people-centered development" menjadi terkenal dengan keluarnya buku David C. Korten dan Rudi Klaus, *People Centered Development*. Korten (1984: 201-209) memberi pengertian "people-centered development" sebagai pendekatan yang mementingkan inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Ia membedakan pendekatan itu dengan apa yang disebutnya sebagai "production-centered development" yang berusaha semata-mata mengejar keluaran produksi yang memenuhi kebutuhan dari penduduk yang berkembang secara pesat, tetapi tujuan itu dicapai dengan jalan yang tidak konsisten dengan kaidah-kaidah dasar dari peran serta, kesamaan, dan kelestarian. Analisis pendekatan "people-centered" dengan pendekatan "human ecology" akan melihat bahwa institusi elit agama dan elit terdidik di masyarakat adalah unit sosio-kultural yang tepat, katakan sebuah "system" yang memadai untuk melakukan pembangunan "people-centered".

Konsep "pembangunan lembaga" dengan penekanan pada pembangunan kelembagaan sosial dapat juga kita lihat pada penelitian-penelitian David Korten. Sebuah penelitian Adi Sasono telah merangkum model pembangunan menjadi tiga jenis, yaitu Model Pertumbuhan, Model Kesejahteraan, dan Model Swadaya (Adi Sasono, 1987: 23-28). Model Swadaya itulah yang disebut sebagai pembangunan yang berfokus kelembagaan sosial. Dalam "pembangunan lembaga", pesantren-pesantren yang tumbuh di wilayah pedesaan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial mempunyai posisi strategis, mengingat daerah cakupannya yang berada di masyarakat akar-bawah. Komitmen sosial pesantren kepada masyarakat sudah terbukti, bahkan dari "abad ke abad".

Konsep kemandirian sekarang ini barangkali pikiran yang paling dominan dari LPSM/LSM/Ornop yang bergerak dalam pembangunan desa. Penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan oleh Jurnal Sekretariat Bina Desa juga telah merangkum masukan-

masukannya dari LSM/LPSM seluruh Indonesia dalam merumuskan pengertian kemandirian itu (1986: 23-31). Kemandirian diartikan sebagai “potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri” “merealisasi sumber daya lokal”, dan “rakyat sebagai pelaku utama dan penerima manfaat terbesar dari usaha-usaha pembangunan”. Dalam hal ini kemandirian juga diartikan sebagai “kemandirian bersama” atau “kebersamaan dalam kemandirian” (*collective self reliance*) dengan maksud menekankan pentingnya saling ketergantungan anggota masyarakat. Dengan cara yang sama, kemandirian itu dapat dikembangkan menjadi “lokal self-reliance”. Pesantren sebagai lembaga yang menjalin hubungan struktural maupun fungsional dengan masyarakat tentu mempunyai kapasitas mengembangkan kemandirian, bagi lembaganya sendiri dan bagi masyarakat. Kemandirian lokal atau teritorial ini juga menjadi tujuan dari pendekatan “people-centered”.

“Sustainability” atau kelestarian pembangunan ditandai dengan adanya kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan. Dalam hasil penelitian yang ditulis pada makalah pendeknya, “Penyusunan Indikator Pembangunan Pedesaan”, Moeljarto Tjokrowinoto (1987: 1-15) menyimpulkan bahwa indikator dari kelestarian pembangunan itu ialah “revolving rate”, “stability of membership”, “continuity of commitment”, dan “resource mobilization”. Dari semua indikator itu pesantren dapat disebut sebagai sebuah lembaga yang mempunyai “revolving rate” yang tinggi. Ada banyak bukti bahwa para lulusan pesantren mempunyai dorongan moral untuk mendirikan pesantren di desanya sendiri, sehingga “revolving rate” dari pesantren dapat diharapkan. Lembaga pesantren mempunyai tingkat “sustainable” yang tinggi. Demikian pula dengan indikator-indikator lainnya, sepanjang yang menyangkut kelangsungan lembaga pesantren, kita tidak ragu-ragu lagi untuk menyatakan hal-hal yang positif. Adapun kaitannya dengan pembangunan desa akan dikaji dalam tulisan ini. Yang jelas, bila kita berbicara tentang pesantren, kita tidak boleh lupa bahwa pesantren adalah juga sebuah *network*.

Mengenai “value-oriented development”, konsep ini dekat dengan pikiran Weberian tentang perlunya sebuah etika. Pembangunan berorientasi nilai ialah aktivitas-aktivitas yang lahir atas

dorongan nilai atau yang mendapat pembenaran dari khazanah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran mengenai perlunya etika atau legitimasi ini tampak misalnya dalam setiap sambutan para pejabat negara yang selalu menyebut ajaran agama sebagai pendorong pembangunan. Dalam bahasa Robert N. Bellah disebut sebagai *civil religion*.

Jadi 'civil religion' itu bukan semacam 'super religion', dengan demikian ia juga bukan saingan pada agama-agama yang ada. Melainkan secara substansial, ia hidup dari agama-agama itu dan nilai serta norma yang dihasilkan oleh mereka untuk menjamin suatu kehidupan bersama yang lestari dalam suasana masyarakat yang plural.

Selanjutnya secara teoritik dapat pula ditegaskan bahwa perubahan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: perubahan akibat revolusi, perubahan secara alamiah, perubahan oleh elit, oleh solidaritas kelompok yang mempengaruhi perubahan, oleh kelompok marginal, dan sebagainya. Kita juga telah menyaksikan bahwa teknologi, ide-ide, konflik, dan faktor struktur sosial, dapat mempengaruhi faktor perubahan. Tentu saja ada unsur-unsur yang tidak cocok atau bertentangan dengan pemikiran teoritis di atas. Sebab peran dan fungsi masing-masing faktor itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi sosial. (Robert H. Launer, 1993 dan 2001, hlm 475)

Di lingkungan masyarakat yang sedang membangun, dimana budaya paternalistik masih dominan, elit mempunyai posisi yang jauh lebih penting untuk mempengaruhi perubahan dibandingkan dengan elemen lainnya. Kategori elit yang dimasukkan disini yang bisa meliputi elit politik, organisator, intelektual, moralis, dan elit agama. Di lingkungan masyarakat yang demikian itu, aktivitas kelompok elit bisa mempercepat sekaligus memperlambat proses perubahan. Karena, itu sangat dipengaruhi oleh heterogenitas elit dalam masyarakat tertentu-asal-usul-dan situasi sosial pasca perubahan/ Sikap itu dipilih sebagai bagian strategi elit untuk tetap eksis di semua jenis perubahan dan berbagai situasi. Karena di sisi lain mereka juga menyadari bahwa posisi akan hilang oleh gerakan dari lapisan bawah yang merasa tidak puas pada proses perubahan

yang tidak membawa perbaikan taraf hidup sebagaimana yang didambakan. (*ibid*, hlm 346-359)

Gambaran lebih konkrit dari teori itu dapat di lihat di Indonesia. Kebijakan politik etis itu, menjadi titik awal munculnya elit modern Indonesia yang berkesempatan lebih luas untuk menempuh pendidikan. Dalam proses selanjutnya pergerakan para elit modern Indonesia itu berhasil mendorong pada proses perubahan besar di negeri ini pada tahun 1945. (Robert Van Niel, 1984)

Sejarah lokal menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari, tidak saja karena masih sedikitnya orang yang memberi pengertian, tetapi juga lokalitas merupakan ekspresi sejarah mereka sendiri, yang berbeda dengan dinamika di tingkat nasional dan sekaligus bisa menawarkan solusi problem di tingkat nasional.

Dengan berkembangnya kemampuan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat itu sendiri yang direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, maka perkembangan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki itu adalah suatu manfaat yang berharga.

Tokoh-tokoh dan pemimpin agama serta cendekiawan Islam baik yang semi formal seperti tokoh-tokoh agama yang ada di pemerintahan desa seperti, Kaur Kesra, serta *Modin*, maupun yang informal seperti Ta'mir Masjid, Ulama serta Kyai adalah merupakan wadah atau tempat bertanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan, menumbuhkembangkan spirit keagamaan, menghidupkan jiwa taqwa sehingga mampu menggerakkan partisipasi dan prakarsa masyarakat melaksanakan pembangunan secara terpadu di desa, baik pembangunan yang idenya berasal dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat itu sendiri.

Mengingat wibawa dan pengaruhnya yang besar dalam masyarakat, maka kegiatan *participation research* ini bagi elit agama Salatiga sangat berguna untuk menjabarkan agama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara Indonesia, manfaat yang bisa digapai adalah: (1) dapat menterjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat, serta menterjemahkan gagasan-gagasan pembangunan kedalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat; (2) memberikan pendapat, saran dan kritik yang

sehat terhadap ide-ide dan cara-cara yang dilakukan untuk suksesnya pembangunan, serta mendorong dan membimbing masyarakat dan umat beragama untuk ikut serta dalam usaha pembangunan.

Selanjutnya dengan berkembangnya potensi yang ada pada elit agama maka sekaligus akan berkembang pula kelembagaan yang mereka pimpin terutama lembaga keagamaan yaitu seperti keta'miran, pengajian bahkan pondok pesantren, dan jamaah-jamaah pengajian. Tokoh agama dalam masyarakat tradisional sering masih lebih dianut daripada tokoh formal, karena kharisma yang dimiliki. Perintah seorang Pemimpin agama atau Kyai akan lebih diikuti daripada perintah lurah/kepala desa. Dengan adanya peningkatan peran mereka maka proses pembangunan seutuhnya dalam masyarakat desa akan semakin lancar dan kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana yang diidamkan akan mendekati kenyataan.

Terkait dengan tema penelitian ini, Beny Ridwan, M.Hum, pernah melakukan penelitian dengan judul "Peran Elit Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Salatiga". Kesamaan penelitian Beny Ridwan dengan penelitian ini adalah sama-sama menanyakan peran elit dan tokoh agama, sementara perbedaannya, kalau peneliti Beny Ridwan mengupas sejauh mana peran elit dan tokoh agama dalam pemberdayaan masyarakat secara umum, sementara penelitian ini memfokuskan pada penguatan peran simbol keberagamaan masyarakat muslim di Randuaris.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah dusun Randuaras kelurahan Kumpulrejo kecamatan Argomulyo kota Salatiga. Sebagai subyek pada penelitian ini adalah umat Muslim minoritas yang hidup di tengah masyarakat mayoritas Kristen. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap Strategi penguatan keberagamaan masyarakat Muslim minoritas Randuaras, dan model etnometodologi menjadi titik tekannya, karena melalui model ini perilaku masyarakat dapat dideskripsikan sebagaimana adanya (Muhadjir:1996). Sehingga penelitian ini memiliki metode deskriptif.

Observasi mutlak dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan akan Statergi penguatan keberagaman masyarakat Muslim minoritas dusun Randuares kota Salatiga. Karena bagi Sutrisno Hadi (1981:136) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Teknik pengumpulan data dalam metode ini adalah lebih ditekankan pada wawancara, sebagaimana dikemukakan Suharsimi Arikunto mengatakan interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. (Arikunto, 1998:67) Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari informan, baik key person maupun masyarakat sebagai subyek penelitian itu sendiri.

Pembahasan

Keberagaman masyarakat Randuaris

Agama berisi ajaran-ajaran agama. Kekurangpahaman tentang ajaran agama bagi para tokoh agama dusun Randuares mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat kelas bawah. Pemahaman agama bagi para tokoh Dusun Randuares sering kali menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sebenarnya perbedaan ini tidak menjadi masalah, jika disertai pemahaman akan makna perbedaan itu dan toleransi atau kematangan dalam beragama. Lebih-lebih jika perbedaan itu bukanlah masalah yang prinsipil.

Pemahaman beberapa tokoh elit agama dusun Randuares adalah bahwa ajaran agama yang bersifat *furu'*, dipahami sebagai sesuatu yang pokok (*ushul*) dan bersifat mutlak. Tidak mengenal adanya perbedaan. Berbeda dalam masalah *furu'* berarti melanggar ajaran agama. Sehingga tidak ada toleransi dan semestinya dibetulkan sebagai bentuk *da'wab*. Pemahaman agama yang kurang mendalam bagi tokoh agama Dusun Randuares berimplikasi pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat awam. Sikap dan aktifitas beribadah masyarakat Islam tidak berlangsung secara optimal disebabkan perbedaan di tingkat elit masyarakat setempat.

Sebagai misal, ustadz x adalah alumni Pondok Pesantren Tebuireng Jawa Timur, melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rekaat dan 3 rekaat sholat witr. Ustadz tersebut mengharuskan jama'ahnya untuk melaksanakan sholat tarawih dengan 23 rekaat. Kondisi ini berakibat pada keaktifan jamaah untuk mengikuti sholat tarawih di Masjid tersebut. Jamaah merasa berat dengan perbedaan sholat tarawih tersebut. Sebenarnya masalah yang pokok adalah menciptakan kondisi yang kondusif sehingga jamaah aktif untuk melaksanakan sholat tarwih.

Contoh lain, posisi sebagai imam masjid. Tugas imam dalam sholat fardhu lima waktu merupakan wewenang dan otoritas pengurus ta'mir masjid setempat dengan tetap memperhatikan kualifikasi keilmuan dan kemampuan bacaan sholatnya. Dengan demikian tugas dan kewajiban imam dalam pelaksanaan lima sholat fardhu itu menjadi jelas. Bahkan idealnya pula segala aktivitas peribadatan dengan tujuan untuk memakmurkan dan meramaikan masjid, merupakan wewenang dan otoritas ta'mir masjid. Untuk itu semua kegiatan peribadatan di masjid tersebut hendaknya dikordinir dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Aktivitas tersebut tidak hanya pelaksanaan sholat lima waktu yang menyangkut imam, muadzin dan jamaah, tetapi semua kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, misalnya peringatan hari besar Islam, sholat jum'ah, pengajian, TPQ dan lain sebagainya.

Idealnya para elit agama masyarakat Dusun Randuares dalam masalah ini adalah menciptakan suasana kondusif sehingga masyarakat awam aktif melaksanakan ibadah puasa sekaligus melaksanakan amalan sunat, *qiyamul lail*, sholat tarawih, membaca al Qur'an. Dan tidak mengedepankan perbedaan rekaat sholat tarawih, yang hanya sunah saja, sementara puasa sebagai ibadah yang wajib yang harus ditumbuh kembangkan.

Dusun Randuares secara geografis berada di sebelah selatan dari kota Salatiga, termasuk wilayah Kabupaten Semarang sebelum pemekaran Kota Salatiga. Dilihat dari kehidupan keagamaan termasuk wilayah yang minim. Sehingga lembaga pendidikan yang berkembang di Dusun Randuares hanyalah TPQ. TPQ di dusun

Randuares pertama kali didirikan tahun 2006, oleh mahasiswa STAIN Salatiga, ketika melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Mahasiswa melihat begitu besar kebutuhan masyarakat dusun Randuares terhadap keberadaan lembaga pendidikan keagamaan dalam hal ini TPQ. Sehingga atas inisiatif dari para mahasiswa STAIN Salatiga tersebut berdirilah TPQ di dusun Randuares. TPQ ini dilaksanakan di masjid setempat selama tiga hari dalam setiap minggunya, mulai jam setengah dua hingga jam empat sore. Peserta didiknya dalam TPQ ini berusia sekitar anak usia sekolah dasar, yang berjumlah sekitar 20 anak.

TPQ dilaksanakan setiap hari senin-kamis pada jam 3 sd 4. keadaan TPQ ini sangat memprihatinkan selain siswa yang datang sangat sedikit guru yang mengajar hanya dua orang. Selain dari pada itu motivasi dari orang tua sangatlah kurang. Ini dikarenakan sebagian besar dari mereka adalah pekerja serabutan dan pekerja pabrik sehingga sedikit sekali waktu yang dimiliki untuk memonitor anak-anak mereka.

Lembaga pendidikan ini berdiri bukan tanpa masalah. Banyak masalah yang menghinggapi TPQ tersebut. Masalah yang mengelayuti TPQ di Randuares, sebagaimana dalam TPQ yang lain antara lain kekurangan *ustadz* dan *ustadzah* sebagai tenaga pengajar. TPQ merupakan lembaga pendidikan yang hanya mengajarkan cara membaca al Quran secara tartil, tidak menuntut kemampuan dan keterampilan yang lain. Walaupun demikian, cukup sulit bagi TPQ tersebut untuk mendapatkan *ustadz* ataupun *ustadzah* yang berasal dari dusun setempat. Dikarenakan *ustadz* atau *ustadzah* yang mengajar di TPQ tersebut berasal dari mahasiswa STAIN Salatiga. Tenaga pengajar yang kurang ini menyebabkan proses pembelajaran di TPQ berjalan kurang maksimal. Kadang siswa sudah menunggu, sementara *ustadz* atau *ustadzah*, tidak hadir. Dikarenakan aktifitas *ustadz* atau *ustadzah* sebagai mahasiswa yang kadang harus mengikuti jam perkuliahan atau kegiatan lain. Atau proses pembelajaran di TPQ dapat berlangsung, tetapi tidak maksimal dikarenakan jumlah guru yang tidak berimbang dengan jumlah peserta didik di TPQ.

Di samping *ustadz*, kesadaran para orang tua wali untuk mendorong anaknya mengikuti proses pembelajaran di TPQ masih

kurang. Tingkat perekonomian masyarakat dusun Randuares, termasuk kurang. Warga hanya mengandalkan mata pencahariannya pada pertanian tanah kering yang produktifitasnya belum bisa diandalkan. Setelah selesai mengolah tanah pertanian kering, biasanya mereka menggunakan waktu luangnya untuk bekerja secara *serabutan*, sebagai tukang batu dan kuli bangunan di Salatiga. Melihat kehidupan ekonomi mereka yang demikian, maka wajarlah perhatian mereka terhadap pendidikan keagamaan mereka rendah. Maka pengawasan terhadap anak-anak mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di TPQ kurang maksimal.

Strategi dalam Upaya Memperkuat Simbol Keberagamaan

1. Optimalisasi peran masjid

Ada banyak kategori masjid yang ada di Indonesia, di antaranya, masjid historis, masjid organisasi, masjid sekolah/kampus, masjid pemerintah, masjid perusahaan, masjid umum dll. Dari beberapa kategori yang ada, masjid yang ada di Randuares adalah termasuk jenis masjid umum. Awal pembangunan masjid Randuares dimulai dari adanya pemberian tanah wakaf dari Orang Tua pak Imam, yang merupakan salah satu tokoh agama di Randuares. Berawal dari tanah wakaf tersebut, kemudian masyarakat Randuares secara swadaya membangun masjid di tanah wakaf tersebut, dan berdirilah masjid tersebut dengan nama masjid al-Hidayah.

Ditinjau dari kegunaan semula masjid, maka masjid merupakan tempat untuk bersujud, yaitu tempat untuk melaksanakan shalat di saat manusia melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ajaran Islam. Begitu halnya masjid al-Hidayah yang ada di Randuares tersebut, digunakan juga sebagai tempat ibadah lima waktu. Sesuai dengan ketentuan shalat yang harus menghadap ke kiblat, maka masjid al-Hidayah pun senantiasa mempunyai arah kiblat ini, yakni salah satu sisi dari dindingnya mengarah ke kiblat, yakni ke arah masjidil Haram tempat ka'bah berada. Sebagaimana kita temukan pada masjid-masjid yang ada di tempat lain, pada sisi dinding yang mengarah ke kiblat itu dilengkapi dengan mihrab, sedang dinding yang berlawanan dengannya menjadi bagian muka masjid al-Hidayah. Sebagai bagian dari arsitektur masjid adalah tempat yang

bertugas untuk menampung segala kegiatan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya.

Satu bentuk kegiatan manusia biasanya segera diikuti oleh kegiatan lainnya, sebab mustahil hanya ada satu-satunya kegiatan terus menerus dilakukan oleh manusia tersebut dengan bentuk kegiatan yang serupa. Oleh karena itu maka bertambahnya kegiatan tersebut juga merupakan perkembangan masjid. Masyarakat Randuaris juga memfungsikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah shalat lima waktu, akan tetapi juga dufungsikan sebagai sentral kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan masyarakat muslim Randuaris. Masjid dengan segala lembaga pelengkapanya yang ada di upayakan menjadi sarana untuk mendidik kaum muslim. Begitu sentralnya fungsi masjid, sehingga mereka memfungsikan masjid disamping digunakan sebagai tempat pendidikan orang dewasa juga untuk tempat belajar kaum wanita dan anak-anak. Bagi orang dewasa masjid berfungsi sebagai tempat belajar, al-Qur'an, hadits, fiqih, dasar-dasar agama, dan bahasa Arab. Bagi anak-anak masjid berfungsi sebagai tempat belajar al-Qur'an, hadits, dasar-dasar agama atau yang sering dikenal dengan TPQ.

Seperti di zaman nabi masih hayatpun ternyata fungsi itupun telah mulai berkembang pula. Pada saat itu ada masjid yang berfungsi sebagai tempat shalat, yang juga sekaligus berfungsi sebagai tempat untuk menerima wahyu dari Tuhan, serta oleh nabi diteruskan sebagai ajaran kepada umatnya di tempat yang sama pula (masjid Nabawi di Madinah). Oleh karena itulah maka fungsinya menjadi bertambah sebagai tempat untuk pelaksanaan dakwah dan tempat pendidikan ajaran Islam. Bahkan wahyu-wahyu yang diturunkan Ilahi di Madinah itu merupakan ajaran tentang hubungan manusia dalam sikap dan perbuatannya, sehingga erat kaitannya dengan kegiatan dengan kegiatan hidup. Secara lebih terurai lagi ajaran tersebut praktisnya menyangkut permasalahan segala aturan kehidupan yang diatur menurut cara-cara ajaran Islam, sehingga berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat-istiadat, masalah kenegaraan dan sebagainya. Dengan demikian maka dimensi kegunaan dari masjid tersebut menjadi perwujudan dari pusat segala kegiatan.

Dimensi kegiatan tersebut lebih berkembang lagi di saat-saat nabi sudah wafat. Sebagai contoh ialah kegiatan pengembangan Islam yang didukung oleh kekuatan fisik. Ada masjid yang dipakai untuk tempat berhimpunnya laskar-laskar muslim dalam mempersiapkan segala keperluannya, sehingga dinamakan masjid jami' askar.

2. Institusionalisasi Majelis ta'lim

Secara sederhana majelis taklim dapat dipandang sebagai perhimpunan orang banyak dengan tujuan untuk mempelajari agama Islam. Ini adalah tujuan utama dari majelis taklim. Jika kemudian muncul tujuan-tujuan lain dalam majelis taklim maka tujuan tersebut dapat disebut sebagai tujuan sekunder. Sebagai gambaran singkat, majelis taklim di Randuaris dilaksanakan satu bulan sekali, setiap malam sabtu, dengan model anjang sana, dan sesekali dilaksanakan di masjid.

Dalam majelis taklim terdapat dua metode yang umum untuk mempelajari agama Islam:

- 1). Ceramah oleh satu orang (atau lebih) ahli agama (*mualim*) kepada sejumlah jamaah peserta (*mustamiin*);
- 2). Saling bertukar pikiran antar jamaah peserta

Dalam pelaksanaannya, metode pertama lebih sering dilakukan dalam majlis taklim di Randuares dibanding dari metode kedua. Dengan demikian, secara umum majelis taklim adalah suatu perhimpunan orang banyak untuk mendengarkan ceramah atau kuliah agama Islam dari seorang mualim. Dalam bahasa ilmu pendidikan, majelis taklim dapat dipandang sebagai sejenis institusi pendidikan agama Islam non-formal.

Hal inilah yang mesti menjadi pemikiran bagi para ustadz-ustadzah yang ada di sana untuk melakukan langkah *diversifikasi* metode dari apa yang selama ini telah berjalan. Seperti apa yang dikeluhkan oleh mereka terhadap metode yang selama ini dipakai, sudah tidak menarik dan membosankan, sehingga menjadikan jama'ah malas untuk pergi.

Orang Indonesia, khususnya orang pribumi Islam tidak terbiasa bekerjasama dalam organisasi modern. Menjalankan organisasi modern memerlukan kemampuan manajemen yang baik, memerlukan manusia penyelenggara dengan sikap mental yang positif, saling percaya, saling hormat, santun dalam berkomunikasi, dan sikap positif lainnya. Sikap-sikap mental seperti itu kurang dipunyai oleh orang-orang pribumi Islam, yang pada umumnya baru satu atau dua generasi keluar dari kehidupan sosial desa dan baru saja mendapat pendidikan yang agak tinggi. Begitu juga kondisi yang terjadi di masyarakat Randuarez, di mana organisasi penyelenggaraan majlis taklim dilakukan dengan tanpa visi yang terarah, pengelolaan yang asal jalan, dan tanpa dilandasi dengan kedisiplinan yang tinggi oleh para penyelenggara organisasi.

Steven R. Covey mengemukakan, persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar sukses dalam sebuah institusi/ organisasi (*Good Corporate Leader*) yaitu: berpandangan jauh ke depan (*vision*), kerja keras (disiplin), semangat (*drive/motivation*) dan nilai-nilai spiritual (*god spot*). Sebagai sebuah organisasi yang nantinya bisa *survive*, majlis taklim harus dipimpin oleh orang yang visioner, disiplin, punya motivasi yang tinggi dan cerdas secara spiriritual.

Ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh majlis taklim yang ada di Randuaris, baik secara internal maupun eksternal, dalam mewujudkan akselarasi dan eskalasi pemberdayaan umat, antara lain sebagai berikut:

1. Keberadaan majlis taklim yang demikian besar tidak didukung oleh manajemen yang baik dan profesional
2. Masih rendahnya guru majlis taklim
3. Lemahnya sistem pembelajaran pada majlis taklim yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat
4. Mayoritas jama'ah majlis taklim pendidikan rendah
5. Tidak memiliki sumber dana yang jelas/tetap
6. Kurangnya sistem yang konduktif, tidak adanya reward dan panishment

7. Metode yang monoton menyebabkan majelis taklim akan ditinggalkan jamaahnya
8. Lemahnya manajemen/pengelolaan majelis taklim akan menimbulkan hilangnya kepercayaan jamaah kepada majlis taklim
9. Terjadinya konflik internal antara pengurus
10. Masih banyak pengurus majelis taklim yang lemah militansi dan ruhul jihad sehingga rendahnya rasa kepemilikan terhadap organisasi.

3. Kaderisasi tokoh agama

a. Kaderisasi lewat TPQ

Ada banyak lembaga pendidikan keislaman yang dikenal dan berkembang dalam komunitas masyarakat muslim, misalnya Pondok pesantren, Madrasah Diniyah dan TPQ. Masing-masing lembaga pendidikan keislaman ini memiliki karakter dan kekhasan sendiri-sendiri.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keislaman yang paling tua di Indonesia, bila dibandingkan dengan madrasah diniyah apalagi TPQ. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keislaman, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di masjid-masjid atau mushola-mushola, yang banyak bertebaran di pedesaan. Oleh karena itu kurikulumnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di Masjid. Adapun karakter khasnya dari pondok pesantren adalah keharusan para peserta didiknya hidup dalam lingkungan asrama, sehingga peserta didik lebih fokus tanpa terganggu dengan kehidupan keluarganya. Di samping itu, keberadaan peserta didik lebih mudah dipantau dan diawasi. Kurikulumnya difokuskan pada kajian kitab-kitab kuning.

Madrasah Diniyah merupakan pengembangan dari lembaga pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren. Di mana sistem pembelajaran di pondok pesantren dilaksanakan dengan sistem *sorogan* atau *bandongan*, tanpa mengenal kelas atau tingkatan. Sedangkan di madrasah diniyah dilaksanakan dengan sistem bertingkat dan berjenjang serta mengenal kurikulum pembelajaran.

Sedangkan TPQ adalah lembaga pendidikan keislaman yang memfokuskan pembelajarannya pada cara membaca al Quran dengan sistem CBSA. Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah metode *qiro'ati*. Metode ini muncul sebagai pengembangan metode *Baghdadi* yang dianggap kurang efektif dalam pembelajaran membaca al Quran. Di samping itu, TPQ merupakan salah satu model pendekatan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (Muhaimin, 2003 : 291) bagi anak-anak.

TPQ merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal bagi komunitas kaum muslimin agar tidak terjadi kemerosotan agama dan generasi qur'ani. Kemampuan membaca dan menulis al-Qur'an merupakan indikator kualitas beragama seseorang muslim. Oleh karena itu, gerakan baca dan tulis al-Qur'an merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas umat khususnya umat Islam dan keberhasilan pembangunan di bidang agama. Karena al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada ummatnya sebagai petunjuk manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an mengarahkan manusia pada jalan yang benar dan lurus, sehingga bisa mencapai kesempurnaan manusiawi yang merealisasikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Taman pendidikan al-Qur'an adalah pendidikan untuk baca dan menulis al-Qur'an di kalangan anak-anak. Tujuan pengajaran adalah merupakan salah satu aspek atau kompromi dalam pendidikan yang harus diperhatikan, karena pendidikan akan dikatakan berhasil apabila tujuan tersebut dapat dicapai atau paling tidak mendekati target yang telah ditentukan.

Islam mempunyai pandangan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah sebagaimana dijelaskan oleh hadis rasulullah SAW. Dan fitrah anak sebagai potensi dasarnya akan tumbuh dan berkembang dengan cepat melalui lingkungan pendidikan keagamaan yang kondusif baik di lingkungan pendidikan keluarga dan lingkungan pendidikan non formal terdekat seperti TPQ. Dalam hal ini, pendidikan Islam lebih dekat dan mirip dengan teori konvergensi. Islam mengakui adanya fitrah sebagai potensi dasar yang berupa fitrah dan potensi ini dapat dikembangkan melalui media pendidikan keagamaan sebagai lingkungan kehidupannya.

Maka peran orang tua dan peranan TPQ sebagai lembaga pendidikan keagamaan bagi pengembangan fitrah anak menjadi sangat penting. Pendidikan keagamaan pada masa kanak-kanak yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lembaga semisal TPQ menjadi pondasi pada pendidikan keagamaan berikutnya. Pendidikan keagamaan pada usia 0 hingga 6 tahun dilakukan oleh orang tua di lingkungan keluarga, sebagai dasar bagi pendidikan keagamaan di TPQ. Pada usia 6 hingga 12 tahun, di samping anak mengikuti pendidikan formal di sekolah dasar (SD), anak juga mengikuti pendidikan non formal di TPQ di sore harinya. Maka ustadz ataupun ustadzah di TPQ merupakan tangan panjang dari orang tua, membantu ataupun mengganti peran orang tua dalam pendidikan keagamaan anak-anak. Oleh sebab itu, ustadz ataupun ustadzah harus mampu mempersonifikasikan dirinya layaknya orang tuanya sendiri.

Anak-anak di TPQ dalam proses pembelajarannya lebih efektif melalui media yang konkret dan realistis, seperti halnya cara berbicara, berpakaian, bersikap dan berperilaku. Maka pendidikan keagamaan di TPQ juga seyogyanya menonjolkan hal-hal yang bersikap konkret seperti halnya latihan sholat secara praktis, bacaan dan gerakannya, membaca surat-surat pendek dan doa-doa lainnya. Demikian karakter khusus pendidikan di lembaga TPQ.

TPQ sebagai lembaga keagamaan bagi anak-anak hanya berlangsung kurang lebih satu jam dalam setiap harinya, dan biasanya berlangsung dalam hitungan 4,5 atau 6 hari dalam setiap minggunya. Sedangkan materi yang harus disajikan adalah membaca al Quran dan praktek sholat secara praktis sebagai materi pokok dan belajar menulis arab, hafalan surat-surat pendek, hafalan ayat-ayat pilihan, hafalan doa-doa harian dan lagu-lagu islami merupakan materi penunjang. Materi-materi ini harus disampaikan bagi anak-anak dalam waktu yang sangat terbatas setiap pertemuannya. Oleh sebab itu, jelas sekali bahwa waktu yang tersedia di TPQ sebagai lembaga pendidikan dengan materi yang banyak dan menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, masih sangat kurang. Tetapi mestinya TPQ harus menciptakan suasana yang relegius dan membuat kreasi yang kreatif untuk menciptakan dan memberi landasan pendidikan keagamaan pada tahapan berikutnya.

Di samping keterbatasan waktu, TPQ biasanya juga dililit keterbatasan personalia, media dan dana. Sangat sedikit sekali orang yang concern terhadap keberadaan TPQ sebagai lembaga pendidikan keagamaan, apalagi mau menjadi ustadz dan ustadzahnya. Sangat susah untuk mencari ustadz atau ustadzah yang berkompoten baik personal maupun sosial yang mau menggeluti di lembaga TPQ. Disebabkan TPQ ini tidak mampu memberikan jaminan masa depan yang menjanjikan bagi kalangan ustadz dan ustadzahnya. Lebih parah lagi, pandangan masyarakat tentang konsepsi *lillabi ta'ala* yang kurang tepat dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mempunyai pandangan bahwa ustadz atau ustadzah TPQ, guru ngaji, semestinya tidak memikirkan berapa besar honor yang diterima sebagai guru ngaji. Padahal semestinya konsepsi *lillabi ta'ala* dipahami dari dua sisi secara obyektif. Dari sisi orang tua, semestinya orang tua menghargai jerih payah dan pengorbanan waktu dan perhatian yang telah diberikan oleh ustadz atau ustadzah sehingga waktunya tersita untuk memberikan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak TPQ. Para ustadz atau ustadzah TPQ telah berperan sebagai orang tua kedua bagi anak-anak TPQ. Sementara dari sisi ustadz dan ustadzah TPQ, mereka telah mengorbankan waktu yang cukup lama untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman sehingga mempunyai profesi sebagai ustadz atau ustadzah. Keahlian ini semestinya dihargai layaknya profesi-profesi lain dalam masyarakat.

Demikian pula, sangat sedikit atau jarang ditemukan para penyandang dana di lembaga pendidikan TPQ, yang mau menjamin dana operasional TPQ setiap harinya. Keterbatasan pada dana operasional ini akan berimplikasi pula pada keterbatasan media pembelajaran yang tersedia.

Terlepas dari hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola TPQ yang ada di Randuares, tentu masih ada harapan untuk mengelola secara lebih profesional. Sebab hanya wadah inilah yang menjadi tumpuhan para orang tua dan masyarakat Randuaris pada umumnya untuk menjaga keberlangsungan simbol keberagamaan mereka dalam bidang keagamaan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu di samping sebagai upaya pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak, TPQ merupayakan wadah yang sangat

strategis sebagai upaya pengkaderan di internal kaum muslimin di Randuares. Secara umum, hakikatnya taman pendidikan al-Qur'an bertujuan dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak didiknya menjadi *generasi qur'ani*, yaitu komitmen dan menjadikan al-Qur'an sebagai pandangan hidup sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, taman pendidikan al-Qur'an perlu merumuskan target yang dijadikan sebagai tujuan dalam waktu lebih kurang selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan petunjuk dalam buku pedoman TPQ nasional, yaitu: dapat membaca al-Qur'an dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid, dapat melakukan shalat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana yang islami, dapat menulis huruf-huruf al-Qur'an, hafal surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan dan do'a sehari-hari.

b. Kaderisasi lewat majlis ta'lim remaja

Sebagai *follow up* dari kegiatan TPQ, maka anak-anak yang sudah lulus TPQ, untuk mengisi kegiatan pasca TPQ mereka masih diwadahi dalam bentuk kegiatan majlis ta'lim remaja. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat masa-masa inilah masa yang paling rawan bagi mereka untuk cenderung mencari jati diri, yang kadang kontra produktif sehingga tidak jarang mereka menerjang norma-norma atau bahkan ajaran agamanya sendiri.

Kegiatan majlis taklim remaja ini dilaksanakan pada hari Jum'at malam Sabtu, dengan model anjungsana seperti halnya yang dilakukan pada majlis taklim bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang sesekali pelaksanaannya menggunakan masjid sebagai tempat kegiatan. Sebagai materi pada kegiatan tersebut adalah ceramah agama dari seorang ustadz atau ustadzah yang didatangkan dari luar dusun Randuares. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para remaja untuk menambah pengetahuan dan wawasannya tentang agama.

c. Kaderisasi lewat masjid

TPQ untuk anak-anak dan majlis ta'lim sebagai lembaga kelanjutan TPQ, sedangkan masjid adalah sebagai ruang publik, yang menyangkut berbagai lapisan masyarakat. Tentunya *needs* jama'ahnya juga akan terpenuhi dalam kegiatan masjid tersebut. Oleh karena itu idealnya takmir masjid mesti harus mempunyai *data profil* jama'ahnya. Sehingga dari identitas mereka kita bisa

mengklasifikasi sesuai dengan *needs* mereka masing-masing. Hal inilah yang dilakukan oleh pengurus takmir masjid al-Hidayah untuk mendata para jama'ahnya sehingga kegiatan yang diselenggarakan di masjid sesuai dengan *need* jama'ahnya.

Sebaliknya, ketidakpedulian pada profil jama'ah ini, tentu saja membawa implikasi negatif, berupa proses peredusiran (degradasi) makna masjid. Dari masjid sebagai pusat perjuangan *multi vaset* umat, sebagaimana dulu nabi pernah memperlakukan masjidnya, menjadi masjid tidak sekedar sebuah tempat untuk ritual *mahdoh* seperti salat saja. Salah satunya berdampak pada ketidakmampuan untuk menyusun aktivitas yang mampu memberikan pemberdayaan yang terstruktur, baik bagi umatnya maupun bagi fungsi masjid itu sendiri. Kegiatannya masih nampak tradisional, dalam arti masih *parsial-seremonial*, seperti: kegiatan keagamaan, shalat jama'ah, shalat jum'at dan peringatan hari besar.

Beberapa kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid al-Hidayah Randuares adalah sebagaimana berikut:

- Sholat jama'ah disamping sebagai ritual keagamaan yang bersifat mingguan juga merupakan media atau ajang silaturahmi dari berbagai komonitas masyarakat muslim. Jadi shalat jama'ah di samping mempunyai tujuan intrinsik juga mempunyai tujuan instrumenl. Shalat juga mengajarkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kita diajarkan untuk saling menolong, melihat lingkungan kiri-kanan kita.
 - 1) Sholat jum'at di sana relatif lebih ramai ketimbang shalat jama'ah, karena memang masjid al-Hidayah sekaligus digunakan sebagai masjid jami'. Masyarakat muslim Randuares meluangkan waktunya seminggu sekali untuk menyempatkan shalat jum'at di masjid al-Hidayah. Salah satu materi khutbah membahas tentang kepemimpinan, generasi muda, generasi qur'ani, moral remaja, sehingga hal itu bisa dipergunakan untuk menambah dan memperdalam wawasan keislaman.
 - 2) Peringatan hari besar Islam dilaksanakan disamping sebagai media dakwah, juga bertujuan untuk *show force platform* masyarakat muslim di Randuares. Sebagai media dakwah,

peringatan hari besar Islam mempunyai tujuan secara substansial berfungsi untuk pencerahan nilai-nilai keislaman dan pendalamannya. Sedangkan peringatan hari besar Islam sebagai *show force* untuk menunjukkan kepada masyarakat umum di sekitar Randuares dan sekitarnya.

- 3) Dengan mencermati fungsi dan peran tiga lembaga tersebut di atas, maka Tiga lembaga pendidikan dan pengajaran merupakan ikhtiyar dan upaya kaderisasi, dan seleksi kepemimpinan secara alamiah dari masyarakat sendiri.

Peran Tokoh Agama dalam Penguatan Simbol Keberagamaan

Dalam pembangunan masjid-masjid di masa sekarang, di saat pengaruh dan kemajuan Islam telah jauh memasuki negara, sistem kenegaraannya dan para penguasa negara yang telah memeluk agama Islam dan menjadi pendukungnya membangun masjidnya dengan ukuran yang telah sedemikian maju sehingga merupakan penampilan yang megah, besar serta berwibawa.

Pada saat ini selain tujuan utama dari kegunaan masjid seperti pada awalnya, maka penampilannya juga mewakili kekuasaan maksimal dari kekuasaan negara yang telah memeluk agama Islam dan menjadi pendukungnya, membangun masjidnya dengan ukuran yang telah sedemikian maju sehingga merupakan penampilan yang megah besar serta berwibawa.

Dalam konteks ini, masjid al-Hidayah di Randuares juga menjadi sebuah simbol terhadap eksistensi Islam dalam kehidupan di masyarakat di sana. Secara fisik fungsi bangunan masjid pada saat itu telah menampilkan jawaban terhadap tantangan fungsinya sendiri yakni sebagai konfigurasi ruang yang besar dan luas, tempat pelaksanaan ibadah kaum muslimin dalam arti yang luas, termasuk segala penambahan kelengkapan bangunannya. Jadi perkembangannya sesungguhnya identik dengan jumlah penganut agama Islam yang semakin banyak jumlahnya yang memerlukan tempat pelaksanaan ajaran agamanya yang cukup besar pula.

Berdasarkan pengertian proporsi maka membesarnya tempat sebagai konfigurasi ruang tidak mungkin hanya melebar terus pada

garis-garis horisontal saja tanpa memperhitungkan pembesaran pada ukuran tingginya. Dengan demikian maka tercapailah proporsi skalastis yang menerap pada ukuran tinggi bangunan masjid tersebut yang mengimbangi ukuran melebarnya secara serasi. Bangunan masjid al-Hidayah di Randuaris mensimbolkan juga bagaimana eksistensi Islam di sana dalam kehidupan sehari-harinya, meski tidak besar akan tetapi cukup luas untuk menampung jama'ah sewaktu diselenggarakan kegiatan keagamaan.

Agar kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid bisa berjalan secara optimal maka takmir masjid perlu berperan secara maksimal sebagai motor kegiatan. Sehingga memberi kesan bahwa masjid betul-betul sebagai sentral kegiatan keagamaan dengan dipelopori pengurus takmirnya.

Sebagai proses pengkaderan maka generasi muda mulai dilibatkan dalam komposisi kepengurusan takmir masjid al-Hidayah. Keterlibatan generasi muda dalam kepengurusan itu merupakan ajang latihan mereka berorganisasi. Di samping dilibatkan dalam kepengurusan takmir masjid, generasi muda juga dilibatkan dalam kepanitian kegiatan peringatan hari besar Islam.

Kesimpulan

Kekurangpahaman tentang ajaran agama bagi para tokoh agama dusun Randuares mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat kelas bawah. Pemahaman agama bagi para tokoh Dusun Randuares sering kali menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sebenarnya perbedaan ini tidak menjadi masalah, jika disertai pemahaman akan makna perbedaan itu dan toleransi atau kematangan dalam beragama. Lebih-lebih jika perbedaan itu bukanlah masalah yang prinsipil.

Idealnya para elit agama masyarakat Dusun Randuares adalah menciptakan suasana kondusif sehingga masyarakat awam tidak terjebak dalam konflik dan justru mendorong untuk bisa aktif melaksanakan ibadah, dan tidak mengedepankan perbedaan masalah furu'iyah, yang hanya sunah saja.

Kondisi keberagaman masyarakat di Randuares sungguh sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut diperkuat dengan kondisi

keberagaman umat agama mayoritas yang semakin mendesak golongan minoritas dalam hal ini masyarakat muslim. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dari 7 RT dalam satu RW hanya 2 ketua RT yang beragama Islam sedangkan yang lainnya beragama non muslim. Perlu dipertegas bahwa masyarakat Randuares berada pada wilayah pengembangan pendidikan non muslim dimana di tempat itu telah berdiri sekolah teologi yang khusus untuk pemeluk agama Kristen.

Berangkat dari kondisi tersebut maka masyarakat muslim minoritas di Randuares berupaya melakukan strategi-strategi untuk menunjukkan eksistensi mereka, sebagai bentuk penguatan terhadap simbol-simbol keagamaan. Upaya tersebut antara lain (1) Optimalisasi peran masjid. Sebagaimana model yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw. ketika beliau sampai di Madinah yang pertama kali dibangun adalah masjid sebagai tempat ibadah *mahdab*;sholat yang sekaligus juga digunakan sebagai pusat dakwah dan penyelenggaraan pendidikan agama.(2) Institusionalisasi majlis taklim. Dengan cara meningkatkan manajemen pengelolaan majlis taklim tersebut secara modern, melalui penentuan visi yang jelas dan terarah, meningkatkan kedisiplinan yang tinggi bagi pengurus dan anggota serta motivasi yang kuat dengan dilandasi spiritualitas yang tinggi (3) Kaderisasi tokoh agama. Kaderisasi tersebut dilakukan melalui sistem pendidikan non formal, yaitu TPQ, Majlis taklim dan melalui masjid. TPQ misalnya di samping sebagai upaya pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak, TPQ merupakan wadah yang sangat strategis sebagai upaya pengkaderan di internal kaum muslimin di Randuares. Hakikatnya taman pendidikan al-Qur'an bertujuan dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak didiknya menjadi *generasi qur'ani*.

Selanjutnya sebagai upaya yang terpandu dalam proses kaderisasi, anak-anak yang telah lulus TPQ, mereka masih diikat dalam wadah perkumpulan majlis taklim remaja. Dengan begitu mereka masih punya kesempatan untuk menambah wawasan dan pengetahuannya tentang agama, sekaligus sebagai upaya kaderisasi di internal masyarakat muslim Randuaris.

Tak kalah penting dari hal tersebut di atas adalah peran masjid dan segenap perlengkapannya, termasuk peran takmir

sekaligus para tokoh agama yang memberikan fasilitas masjid sebagai tempat sekretariat kegiatan bagi majlis taklim tersebut. Sehingga hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi para remaja untuk lebih giat menjalankan segala aktivitasnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah dan Suharto, Toto. 2005. *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anon. 2003. *Pengawasan dengan Pendekatan Agama*, Jakarta: Depag RI.
- Ancok, Djamaludin dan Anshori Soroso, Fuad. *Psikologi Islam: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Kadir, Muslim. 2003. *Islam Terapan: Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Research II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- HM, Arifin. 1977. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Jalal, Fasli dan Supriyadi, Dedi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Jurnal Attarbiya, No, 2 Th. XV/ Juli-Desember 2004, STAIN Salatiga.
- Jumantoro, Totok. 2001. *Psikologi Dakwah dan Aspek-Aspek Kejiwaan yang Qur'ani*, Wonosobo.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Amin, Miska. 1983. *Epistemologi Islam Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta: UI-Press.
- M. Gordon, Milton. 1978. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.
- M. Polama, Margaret. 1984. *Assimilation in American Life, the Role of Race, Religion and National Origins*, New York: Oxford University Press.

- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Salatalohy, Fahmi dan Pelu, Rio. 2004. *Nasionalisasi Kaum Pinggiran dari Maluku, Tentang Maluku Untuk Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.
- Sumadiningat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**MAPPING THE PARADIGM OF STREET CHILDREN
INTERVENTION:
A Case Study of Insan Mandiri Children Shelter, Yogyakarta**

Supardi

*Mahasiswa of Interdisciplinary Islamic Studies-Social Work
Graduate Studies, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta
supardi_abdillab@hotmail.com*

Abstract

The present study is a field research on the paradigm of street children intervention in Indonesia. This qualitative research is based on a case study of Insan Mandiri Children Shelter Yogyakarta. This study finds that Yayasan Insan Mandiri employ the reformist paradigm of NGO. This could be treasured from the Insan Mandiri's point of view on the phenomenon of street children. On their perspective, the street children is caused by the negative mentality of the children and the social condition of the society. This paradigm influenced their activities on street children intervention such as setablising children shelter and providing skill trainings. Rather than solve the problem, the use of the reformist paradigm will perpetuate the existing street children on the street.

Keywords: *Paradigm, street children, intervention*

Abstrak

Studi ini merupakan penelitian lapangan tentang paradigma penanganan anak jalanan. Studi kualitatif ini mengambil kasus pada Rumah Singgah Insan Mandiri Yogyakarta. Studi ini menemukan bahwa Yayasan Insan Mandiri dalam menangani anak Jalanan menganut paradigma reformis. Hal ini terlihat dalam cara mereka memandang anak jalanan dimana menurut mereka disebabkan oleh mentalitas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya keluarga anak jalan tersebut. Paradigma yang dianut ini mempengaruhi program yang mereka lakukan dalam penanganannya yaitu dengan mendirikan rumah singgah dan memberikan pelatihan ketrampilan. Paradigma kerja yang seperti ini dibaratkan mengentaskan bayi yang dibuang orang ke sungai tanpa mempertanyakan mengapa orang membuang bayinya ke sungai.

Dengan kata lain, penanganan anak jalanan yang tidak ditelusuri dari akar munculnya masalah anak jalanan hanya akan melestarikan esistensi anak jalanan itu sendiri.

Kata kunci: *Paradigma, anak jalanan, intervensi*

Background of The study

One of the greatest social welfare challenges confronting developing world in this decade is the growing number of street children seeking their survival on the city street (Raffaelli, 1997). Based on the data from the United Nation Children Fund (UNICEF), the number of street children is 40 millions worldwide, with an estimated 25 million found on the streets in Latin America (Trussell, 1999). Meanwhile, in Indonesia, the number of street children before the monetary crisis was approximately 50.000 children. According to a survey undertaken by Social Affairs Department (Departement Sosial) of Republic of Indonesia in cooperation with Atmajaya University and National Development Bank, the newest data shows that 40 thousands street children found in 12 big cities. This number increase dramatically up to 100% yearly since the monetary crisis (Depsos, 1999).

Street children have high potential to create some problems covering sex exploitation, traffic accident, catching by the police, conflict with other gang and children, criminal, and rejected by their social environments.(Depsos,1999). Rude treatment toward children always happens in our daily life that can be seen from television news and newspapers such as *child abuse, child emotional abuse, verbal abuse, psychological abuse, sexual abuse*, etc toward children, especially street children.

Indonesia is a country, which has ratified the *Convention on the Rights of the Children 'CRC'*. This convention prompt values statement attaching right not only to the children but also to parents, the state, and workers: *First*, every child is unique human being and their individual wishes and feeling must be respected; *second*, the best interest of the child must always be the primary consideration of the adult on whom their depend; *third*, Children wherever possible

could be brought up within their own families; *fourth*, parents have rights through responsibilities in regard to their children, *fifth*, parents are individual who deserve respect for their rights and the range of needs and strengths they have; *sixth*, the state should be ultimate guarantor of every child's right to safety and protection (Pinkerton, 2002).

Consequently, Indonesia has to commit on the protection on the right of children. To implement this ratification, Indonesia through Social Department in cooperation with United Nation Development Bank (UNDP) and Non Government Organization (NGOs) has done a project to create welfare of street children in thirteen cities. One of the NGOs was Yayasan Insan Mandiri, Yogyakarta in which this research took place. The issue of street children, actually, has received a great deal of attention from academic and Social workers and activists to give both solutions and interventions.

In response to the condition of street children above, some NGOs which focus on street children care established. These NGOs work based on different perspectives and methods. One of the methods which mostly popular recently is establishing children shelter for street children. Hopefully the children could stay anytime they want in the shelter. Other shelter also educate them with skills and undertake an empowerment programs to help the children live by themselves. Unfortunately, some people claimed that these shelters only sell the social issues to get jobs and earn money both from the government and from the society. Other people also claimed that these shelter was just the government hand which had no significant contribution to the improvement of the social condition in Indonesia in general which the street children problem still exist and becoming more complex.

This condition lead to critically question to the intervention that given by NGOs, among others, do their intervention toward children really keep them out from the street? There is strong impression that what the NGOs and shelter done tend to perpetuate the children on the street. This fact can be seen that their intervention toward street children do not reach the root of the problem. It did not reduce the number of street children on the street.

This also leads to other critical question on the vision, mission and paradigm. Paradigm will determine the theory that the NGO uses to see the problem. The theory will determine the methodology of their action. Methodology will determine the activities that they undertake. As a result, by looking at the point of view and the practical activities of the activists of the NGO toward street children intervention will be found the position of the NGO on the NGO paradigm map. This step is very crucial to be undertaken as starting point to reconstruct the work pattern of several NGOs dealing with street children intervention in order to keep them out from the street.

The present study focuses on one NGO that works on street children intervention namely Yayasan Insan Mandiri Yogyakarta. This foundation is one of the NGOs which deals with children care. By analyzing the data concerning with the point of view of the activists of the Yayasan Insan Mandiri on the phenomenon of street children and their programs and activities on children care, it can be identified the paradigm of this NGO.

Research Questions

Based on the preliminary remark above, this research poses to answer the following questions:

1. What kind of activities and programs did Yayasan Insan Mandiri undertake in coping with street children?
2. What is the paradigm used by Yayasan Insan Mandiri on viewing and coping with the street children phenomenon?

Conceptual Framework and Literature Review

In the review of the literature, we shall discuss: the paradigm of NGO in Indonesia in order to provide a conceptual framework of analysis, and the prior field research on street children phenomenon to orient the readers toward various conceptual tensions in the field.

Mansour Fakhri (2004) through his participatory action research has mapped the Indonesian NGO's paradigm. This mapping was done as a manifestation of the NGO's curiosities and dissatisfaction of their roles on democratization and social transformation in

Indonesia. The mapping hopefully become tool for the NGO activists to develop their understanding about NGO typologies. This mapping was based on the NGO activists' opinion concerning with how they defined social problem faced by society and its implication on their programs in coping with social problems. In general, the NGOs could be categorized into three major typologies (Fakih, 2004: 121-135).

1. Conformist

This type of NGOs do their activities based on a *caricative* paradigm, known as '*working without theory*'. In other words, their main motivation of their activities is helping the society to cope their social problems. Socio (-economic) issues refer to a condition caused by many factor endemic to particular society that systematically disadvantages or harm a particular segment or significant number of society's population, this issues covering poverty, unemployment, homelessness, social inequality, etc. (Currant & Ranzetti, 1996: 13).

2. Reformists

This type of NGOs do their activities based on modern and developmentalist ideologies. They cope social problems by undertaking partisipatory methods through developing social participation in the process of development. Besides, their main thesis is that the social problem is stem from negative mentality and value believed. In this case, achievement motivation training become major tool to encourage people capacity building and alter social problems.

3. Transformists

The main characteristics of this NGOs are the question of main paradigm and ideology that generate social problem in the society. As a result of this paradigm, they view social problems and their solutions from the root of the problem and they attempt to find alternative paradigm which will transform the oppressed existing structure and superstructure of the society and open the possibilities for the society to build their capacities and potentialities. Based on this perspective, one of the roots of social problems is the oppressing structure. The methods that they employ to halt social problem are

community development, income maintenance, and health care. Those activities become *a starting point* to organize the community, farmers, and labour toward social transformation. Critical or popular education become very important for their long term goals. To easily recognize these paradigm, it can be seen on this table below:

Table 1. The Map of NGO's Paradigm

	Conformist	Reformist	Transformist
Causes of social Problem	- society condition - God's fate - negative values orientation	- low education - over population - tradisional values - corruption	- exploitation - oppressing structure - capitalist hegemony
Targets	- lessen the burden - praying for the victims - hoping	- reasing production - making the existing structure works - changing society's values	- againts exploitation - develop new economic and political structure - contra-discourse
Programs	- child care - material help - clinic - shelter	- technical trainings - small and micro enterprises, SMES - law advocation - supplementary services	- conciousness raising - economic empowerment - labour organiation - cooperation
Type of social change	Functional / equality		Structural critics
Type of Leaderships	- belief on government policy - consultative	- Participoatory - Having mutual responsibility	- Participatory facilitator - Strong discipline
Type of social services	- carity to the needy. - welfare	- help the society to help themselves - Green Revolution - Community development - Nonformal education - Vocational education	- land reform - participatory research - popular education
Inspiration	- conformation	Reformation	Emansipation Transformation

With regard to the previous works on street children, there have been several studies dealing with street children, both from the country and foreigners, among others: Raffaelli (1997), 'The family situation of street youth in Lati America: across-national review' examines the problem encountered by the family of street children. This research highlights the family characteristic of street children focusing on parental loss or absence, physical and sexual abuse, and migration. This research suggested that there are important differences in the needs of subgroup of street youth and their family. Trussel (1999), wrote *The children's street: an ethnographic study of street children inm Ciudad Juárez, Mexico*'. This study found that there are varying levels of distrust, hosility, and aggression between

street children and gangs, police and the general public. This findings imply the need to develop program which address these issues.

Husna (2005) wrote '*Factors Cousing Street Children Coming Back to the Street*'. This work attempts to look at the exact faktor that make Children becoming street children. This study found that the main factors that causes the phenomenona of street children are: poverty and unharmonius life of a family or broken home. Musyaddad (2005) , '*What happens in children shelter to address the problem that led to children being on the street?*' deal with the intervention on children shelter that lead children still being on the street. Affandi, 2003, '*Falling the forgotten*', studies the characteristic of intervention given children shelter in Indonesia. All of these studies reveal that there has been no studies deal with the paradigm behind the intervention that the shelter do to the street children. The present qualitative research examine the paradigm of street children intervention in Yayasan Insan Mandiri Yogyakarta.

Research Methods

This study involves field research using a qualitative method. The techniques used are basically interview, document analysis, and narrative account. A series of interviews was carried out in Insan Mandiri Street Children Shelter Yogyakarta between the Second and third weeks of November, 2008 with the head of the Shelter, the secretary and social workers. The documents were obtained from various primary resources such as Insan Mandiri Shelter's profile, annual report, previous research. and some Insan Mandiri's advertisement leaflets.

Discussion

In this discussion we would like to: *first*, describe the profile of Yayasan Insan Mandiri covering its vision, mission, programs and activities and examine their point of view about street children; *second*, analyze its paradigm on coping with street children phenomenon based on Mansour Fakhri's NGO paradigm conceptual framework.

Profile of Insan Mandiri Shelter

Yayasan Insan Mandiri located on Jl. Perintis Kemerdekaan No. 33 Yogyakarta was established on May, 20, 1999 based on letter of Decision of Kakanwil (Head of Regional) social Ministry of Indonesia no. 054.99/psl/kwl/vii/99. This foundation has been established due to the intention of some social workers who took care street children in Rumah Singgah Anak Mandiri, who mostly deal with street children in Yogyakarta province since April 1997.

The vision of this foundation is to create welfare for street children through 'pendampingan' (assistancy) and protection on children's right based on Convention on the Right of Children (CRC), while the mission of this foundation is to encourage society to be aware and conscious on the importance of the right of the children to grow well and live normatively as children.

Yayasan Insan Mandiri's View on Street Children

What they mean by street children is based on Convention on the Right of the Child (CRC) which states that street children means "*all human being below the age of eighteen years old who spend almost their times on the streets and in other public areas both for socialization or doing economic activities*".

When the researcher asked about bases of which the foundation works and undertakes their activities, the head of the foundation implicitly said that their activities are based on theological reasons because they propose a verse from the Holy Qur'an that stated "*who want to help others, God will help him*". Besides, they also proposed some reasons concerning with humanity issues.

The question is why they become street children. According to the head of Yayasan Insan Mandiri, actually they were victims from many inter-related factors that lead them to become street children. These factors, among others, were: *first*, they did not get enough parental love and attention so that they wanted to make their parent embarrassed. *Second*, they were frustration because they have been left by his/her parent since the earlier period of his/her life. *Third*, it was because of disharmony in their family life or

broken home. And *last*, it was due to the national economic crisis that yield this condition worse. In other words, they become street children due to of the economic condition of their parent.

Furthermore, there were also some factors that promoted them remain to be street children. The first was because of negative attitude from their parent, the acceptance of their peer group, freedom from rules and norm, facilities from social workers that make them more prosperous. The second was due to the family's factor that the family did not accept and regard them as ordinary children, curiosity from the society, the environment that did not support them to adapt with normative life, and bad coping strategies.

In addition, he also mentioned the part that influences street children was culture. He states all parts of the society were respponsible for the process. For example, the government involves in making the regulation, even thought the government has made regulation on children welfare, the government did not apply this regulation well. Another part is NGOs and social department since their program only based on project oriented. Still others, the police officer, they only took out the children from the street and did not propose any solution. And the last part was the society who gives street children negative stereotype.

The other question the researcher asked was why the number of street children in Yogyakarta very significant compared to other cities. According to him, the Yogyakarta society was very tolerant and accepted the existance of street children. People said that Yogyakarta was the paradise of street children.

With regard to their relation to the government, the foundation did not want tobe dictated, eventhough they received the government's assistance and donation. They told that the government had even put the government's workers in the shelter, but the foundation rejected the workers to avoid the futher involvement of the government on their policy. Dealing with donation from the society, the foundation separated one donation to the others on spending and reporting.

Program Areas

To implement its vision and mission, the foundation has several programs:

- a. Establishing Rumah Singgah (Children Shelter) for the street children.
- b. Establishing Panti Asuhan (boarding houses for caring) for the ex-street children
- c. Establishing Padepokan/Pesantren (boarding houses) for the final treatment and guidance for the ex-street children.
- d. Empowering street children's parent and parent whose children has potentiality of becoming street children.

Manifestation of the programs:

- a. Rumah Singgah (Children Shelter) Anak Mandiri I on Jl. Perintis Kemerdekaan no. 33B. This Children Shelter had been used to take care and educate street children since April 1997 until July 1999 in cooperation with UNDP and Social Department Republic of Indonesia. In 1999 until 2000, the shelter held cooperation with Social Department on JPSBS anak jalanan program, continuing until 2002 in cooperation with ADB and Social Department. Nowadays, the foundation holds the shelter.
- b. *Rumah Singgah Anak Mandiri 2* on Jl. Arteri/ Ringroad Selatan. This held in cooperation with Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta Regency.
- c. *Panti Sosial Putra Marga in Gambiran V/319 Umbul Harjo* Yogyakarta. This house was used to give guidance for the ex-street children (elementary, secondary, high school students).
- d. *Padepokan Insan Mandiri*. This program had not been implemented. The foundation had already have land area to build it.

Cooperation

To support the work of the foundation, Yayasan Insan Mandiri did some cooperation with some foundation, among others: UNDP, Social Department, Dinsos Yogyakarta province, BKKBS, Gajah

Mada University, IKIP, Akademi Bahasa Asing, RRI, Dompot Sosial Umul Qura and PMI. .

Result

Based on the program above, YIM had taken care about 1800 children in Yogyakarta province. From these numbers, about 60 children has been returned back to their families, ten could get alternative parents, ten could study at school, some street children had become drivers, technicians, cleaning services, farmer, waiters, and a soldier.

The Shelter Activities

Applying the programs, the shelter provided some services for intervention to the children (Laporan, 2003). These services comprise:

1. Identification

The Identification was a beginning process of intervention, which would determine the sort of services that the shelter would give. This process included outreaching and identification of children's personal data, such as name, age, origin, address, background and causes of becoming street children.

2. Assistance

In this step, the social workers become *big brothers* for the children who were in the shelter, on the street, and payed a visit for children who were in their own house. The objectives of this activity were to build a trust of the workers from the children and to give guidance, counseling, motivation, both for the children and their parent, so that the children did not drop out from schools (for children who were still studying), decreased their activities on the street. Meanwhile, the main objective was to motivate the children not to stay at the street anymore and live in a normative life.

3. Feeding

The shelter provided food services for the children who drop or stay in the shelter, before the children get their job training or permanent job, school or foster parents.

4. Health Services

The health services constituted funding for health care especially first checking, then the shelter sent the sick children to public hospital or private hospital funded by the Social Affairs Department and Local government. Besides, the shelter also provided first aid kit of medicines for the children.

5. Recreation Services

The main objective of this services was to entertain the children and give opportunities to children for playing and getting acquaintance with others and to build sense of brotherhood and togetherness. In this case, the shelter brought the children to tourist resorts such as Tawang Mangu Water Fall, Parang Tritis beach, etc.

6. Counseling and Motivations Services

The Shelter provided counseling programs for the children and their parents on scheduled and regular meetings. The ultimate goal of this service was to give parents practical guide of good parenting activities. For the parents, the workers taught them techniques and values of raising their children individually or collectively. In addition, the social workers also guide them how to manage a family and small-scale business. The children were motivated in order that they can live a normal, normative, and independent life. Further, the shelter provided management education for the children who wanted to run a business, and the access of vacancies for those who wanted to work. This activities was actually the preparation stage before the children and/or their parents were got involved in the activity of empowerment.

6. Empowerment

it is the final intervention in which both the children and their parents were hoped to be able to run their business individually or collectively. This activity mainly focused on economic empowerment and entrepreneurship both for the parents or the children. This activity did mainly through small-scale business such as giving modalities for vendors. The shelter has done all of the activities that mentioned above during the period from July to September 2008.

The position of Yayasan Insan Mandiri on NGO Map

Based on the data mentioned above, we can see the position of Yayasan Insan Mandiri on ngo paradigm map. In general, YIM is the follower of reformist paradigm which most of the Indonesian NGOs followed. This can be seen from several fact that yoim belief and base their activities. First, the fact can be seen on how they see the cause s of the street children phenomenon. According to YIM, the causes of street children phenomenon is problem related to mentality. It means that the children has weak mentality toward life. As a result of this belief, they give stret children motivation in their intervention and services through both careing and other activities in order to live normatively and coming back to their family or changging their profession from becoming street children to productive activities. In this case, YIM employ David McClelland's *Achievement Motivation Training* as a tool tove motivation.

Still other fact is that the reformist paradigm can also be seen from the way YIM copes with streetchildren, they raise knowledge, skills, to live by themselves and participate in development. This impression can be seen from the indicator that YIM proposes to the succes on street children intervention that is to what ec\xtend the street children coming back to their family or move to other profession.

Other evident can be show from the attitude of YIM toward the government tend to show the sign of reformist paradigm. In this case, although YIM accept the government support and donation, they try not to cooptate by the government. Unfortunetely, this attitudede did not make them being critical to the structure and proces of development undertake by the government. YIM rejected to say that the main factor that cuse social problem including street children phenomenon is the economic structure of the society but they argued that the cause of the problem is the mentality.

Bisedes, some activities that undertoken tend to be in the characteristic of conbformist paradigm. This can be seen at their view that social condition of yogyakarta society as factor that contribute to the existance of street children in Yogyakarta. This because, according to YIM, Yogyakarta society are very tolerant to the existancace of street children. The conformist evidance can also

be treasure from the establishment of children shelter of this foundation.

Table 2. Yayasan Insan Mandiri on NGO Paradigm Map

No	Factors	YIM fact and Evidance
1.	Causes of social Problem	weak motivation to ward life and social condition as factors that cause the street children come up in the society.
2.	Targets	move the street children out from the street and come cack to their families or change to other profession.
3.	Programs	Provide shelter and trainings
4.	Type of social change	Based on functional theory without critizing the oppressing structure.
5.	Type of Leaderships	Participoatory and having an assumption that the responsibility of street children care is all part of society, govern,ent, and community.
6.	Type of social services	Help children having formal or nonformal education and street children empowerment
7.	Inspiration	Reformation

This data discribed on the table above indicate that Yayasan Insan Mandiri from their point of view abot the problem of street children, its programs and activities are identical to the characteristics of reformist paradigm of NGOs as discribed above.. From tansformative perspective, it seem that there is no indicator on their program and activities that are parallel to transformative paradigm.

Conclusion

The findings indicates that Yayasan Insan Mandiri employ the reformist paradigm of NGO. This could be treasure from the Insan Mandiri's point of view on the phenomenon of street children. On their perspective, the street children are caused by the negative mentality of the children and the social condition of the siociety. This paradigm influenced their activities on street children intervention such as setablising children shelter and trained them skills. This work paradigm could not reach the root and solve the problem but perpetuate the existing street children on the street. Consequently, the shelter must critisize more the micro, mezzo, and macro level of causes of street childrem problems to gain a better solution.

Bibliography

- Currant, Daniel J. & Claire M. Ranzetti, 1996, *Social Problem: Society in Crisis*. London: SAGE Publication.
- Departemen Sosial Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, 2001. *Intervensi Pekerjaan Sosial Professional: Intervensi Psikososial*, Jakarta: Depsos.
- Fakih, Mansour. 2004. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Idiologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Husna, Aida. 2005. *Factor Leading Children Coming Back to the Street*, Yogyakarta: Magister Thesis UIN Sunan Kalijaga, Unpublished.
- Insan Mandiri Brochure. 2005. *Selayang Pandang Insan Mandiri Yogyakarta*.
- Musyadad, Tufeil Najib, 2005. *'What happens in children shelter to address the problem that led to children being on the street?'* Yogyakarta: Magister Thesis UIN Sunan Kalijaga, Unpublished.
- Pinkerton, Peter John, 2002, 'Child Protection' in Robert Adam, Lena Dominelli, and Malcom Payne (eds.) *Critical Practice in Social Work*, NY: Palgrave Macmillan.
- Raffaelli, Marcela, 1997. *'The family Situation of Street Youth in Latin America: A Cross National Review'* in *International Social Work*, London: SAGE Publication.
- Rumah Singgah Anak Mandiri, Yayasan Insan Mandiri, 2008. *Laporan Pelaksanaan Rumah Singgah Anak Mandiri I Porpinsi DI Yogyakarta Periode Juli-September 2008*.
- Trussel, Robert P., 1999. 'The Children's Street: An Ethnographic Study of Street Children in Ciudad, Juarez, Mexico' in *International Social Work*, Vol.1(2): 15.

PANDANGAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI BAJOE TERHADAP FAHAM *FREE WILL* DAN *PREDESTINATION*

Muhammad Hasbi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone
muh_hasbi@yahoo.com

Abstract

This research addressed problems: (1) What is the opinion of beach society in Bajoe about free will or predestination?; and (2) What is the influence of free will and predestination to the Bajoe beach societies who work as fishers in their daily activities life. This research is characterized into a field research study with phenomenological approach of ethnography-ethno-methodology. The findings of the research are: (1) the society of Bajoe beach was mostly influenced by predestination. Therefore, many of them saw that humans had not a freedom to determine their deeds; (2) on the other hand, some of them perceived that humans were given a freedom to work and to struggle. This opinion has in common with Mu'tazilah school.

Keywords: *Free Will, Predestination, beach society.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini: (1) Apa pendapat masyarakat di pantai Bajoe tentang kehendak bebas atau predestinasi, dan (2) Apa pengaruh kemauan bebas dan takdir pada masyarakat pantai Bajoe yang bekerja sebagai nelayan dalam kegiatan hidup sehari-hari mereka?. Penelitian ini ditandai ke dalam studi penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis etnografi-etno-metodologi. Temuan dari penelitian ini adalah: (1) masyarakat dari pantai Bajoe sangat dipengaruhi oleh predestinasi. Oleh karena itu, banyak dari mereka melihat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan perbuatan mereka, (2) di sisi lain, beberapa dari mereka merasa bahwa manusia diberi kebebasan untuk bekerja dan berjuang. Pendapat ini memiliki kesamaan dengan sekolah Mu'tazilah.

Kata kunci: *Kemauan bebas, predestinasi, masyarakat pantai.*

Latar Belakang Masalah

Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk manusia itu sendiri. Selanjutnya Tuhan bersifat Maha Kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Di sini timbul pertanyaan sampai dimanakah manusia sebagai ciptaan Tuhan, bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dalam menentukan perjalanan hidupnya? Apakah manusia diberi kebebasan dalam mengatur hidupnya atau manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan?

Dalam menghadapi masalah tersebut, kaum *Free Will* berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan berusaha dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut faham *Free Will* bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam istilah Inggrisnya faham ini dikenal dengan nama *free will* dan *free act*. (Harun Nasution, 1986: 31). Oleh karena itu, *Free will* lebih dikenal dengan nama *Qadariyah*. Nama *Qadariyah* berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai *qudrat* atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada *qadar* atau kadar Tuhan. *Qadariyah* tidak dapat diketahui dengan pasti kapan faham ini timbul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, faham *Qadariyah* kelihatannya ditimbulkan buat pertama kali oleh seorang bernama Ma'bad al-Jauhani. Ma'bad al-Jauhani dan temannya Ghailan al-Dimasyqy mengambil faham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. (Ahmad Amin, 1965: 255).

Dalam faham ini manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Di sini tidak terdapat faham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, dan manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak zaman azali.

Kaum *Predestination* berpendapat sebaliknya. Manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam hal ini terikat pada kehendak mutlak

Tuhan. Dalam Istilah Inggrisnya faham ini disebut *predestination* atau *fatalism*. Oleh karena itu, *predestination* lebih dikenal dengan nama *Jabariyah*.

Nama *Jabariyah* berasal dari kata *jabara* yang mengandung arti memaksa. Memang dalam aliran ini terdapat faham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh *qada* dan *qadar* Tuhan. (Harun Nasution, 1986: 31).

Perbuatan-perbuatan yang diciptakan Tuhan di dalam diri manusia, tak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati. Oleh karena itu, manusia dikatakan berbuat bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti *majazi*. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya termasuk perbuatan-perbuatan, seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala dan menerima siksaan. (Al-Syahrastaniy, : 87).

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang didominasi oleh perairan laut yang luasnya mencapai 62% dari luas wilayah Indonesia. Perairan laut merupakan ruang yang relatif dominan dengan berbagai pola permukiman perairan. Dari sekian banyak perairan di Indonesia, salah satu di antaranya adalah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Secara geografis Bajoe terletak 6 km dari kota Watampone dengan tipe iklim tropis basah dan didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian seperti nelayan, pedagang, niaga transportasi dan petani. Dari aktivitas yang heterogen ini ditunjang oleh suatu pemukiman dengan material pendukung, umumnya berasal dari alam dan berdiri di atas perairan laut di sepanjang garis pantai yang permukaan lahannya selalu digenangi air laut pada hampir sepanjang waktu, kecuali pada waktu-waktu surut akibat pengaruh pasang surut permukaan air laut .

Masyarakat pesisir pantai Bajoe yang mayoritas beragama Islam dengan bermatapencaharian adalah sebagai nelayan. Penghuni pemukiman masyarakat pesisir pantai Bajoe, mata pencaharian pokoknya menangkap ikan dengan menggunakan perahu layar. Apalagi suku Bajo, suku ini terkenal sebagai suku bangsa pelaut di Indonesia yang telah mengembangkan suatu kebudayaan maritim

sejak beberapa abad lamanya, sehingga dikenal dengan sebutan "manusia perahu".

Sebagai manusia perahu, mereka mengenal budaya *Alloping* yaitu pedoman atau aturan membangun perahu. Budaya *Alloping* inilah yang kemudian berkembang menjadi budaya *Appabolang*, setelah mereka menetap dalam suatu hunian dan mengelompok menjadi suatu permukiman. Budaya *Appabolang* itu sendiri adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Suku Bajo untuk mendirikan/membangun rumah tinggalnya. Faktor-faktor tersebut adalah agama/kepercayaan, hubungan sosial, mata pencaharian, pengetahuan, pola hidup, dan lingkungan alam. Yang menjadi fenomena menarik disini adalah kemampuan rumah tinggal suku Bajo yang tercipta dari hasil budaya *Appabolang*, untuk tetap bertahan dan eksis dalam menghadapi lingkungan alam yang sangat keras.

Dapat digambarkan bahwa di perairan Bajoe dikenal dengan jenis pasang surut ganda campuran (*mixed tide, prevailing semidiurnal*) yaitu 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Keadaan ini menjadi tantangan bagi rumah tinggal yang berhubungan langsung dengan laut untuk tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan air pasang dan kelembaban yang ditimbulkannya. Kencangnya angin yang bertiup dari laut maupun dari darat dapat merubah suhu udara menjadi sangat dingin. Curah hujan terjadi sepanjang tahun sehingga sulit menentukan musim hujan atau musim kemarau. Untuk itu harus selalu siap menanti turunnya hujan. Hal-hal seperti inilah yang banyak mendatangkan masalah dan sangat penting diperhatikan untuk mengetahui paham mereka, khususnya paham *free will* dan *predestination*. Untuk itu, ketangguhan rumah tinggal Suku Bajo untuk mengatasi pengaruh iklim sehingga kenyamanan thermal dalam bangunannya dapat tercapai,

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sebagai manusia perahu, mereka melakukan segala aktivitas dan menghabiskan hidupnya di atas perahu. Sejalan dengan bertambahnya waktu manusia perahu ini menetap dalam suatu hunian dan mengelompok membentuk suatu pemukiman. Namun, budaya laut mereka masih mempengaruhi hidupnya sampai sekarang. Untuk itu perlu diteliti secara mendalam, karena tidak menutup kemungkinan umat Islam

suku Bajoe dalam menjalankan aktivitas keseharian dan agamanya sebagai hamba ciptaan Allah, ada yang beraliran atau sekurang-kurangnya sefaham dengan *free will* atau *qadariyah* dan *predestination* atau *jabariyah*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari urian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan masyarakat pesisir pantai di Bajoe tentang *Free will* atau *Predestination*?; (2) bagaimana pengaruh faham *Free will* dan *Predestination* terhadap masyarakat pesisir pantai Bajoe yang bermatapencaharian sebagai nelayan dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya?

Tinjauan Pustaka

Faham *Free will* dan *Predestination* telah banyak dikemukakan oleh pakar teologi Islam. Membicarakan *Free will* dan *Predestination* justru menimbulkan pro dan kontra bagi sebagaimana pakar teologi Islam sejak awal perkembangannya. Ada pakar yang cenderung menguatkan pemahamannya bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri secara mandiri dengan tidak ada lagi bantuan dari selainnya termasuk bantuan dari Tuhan. Manusia mempunyai otoritas sepenuhnya untuk menentukan perbuatan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Syahrastaniy, dalam *al-Milal wa al-Nihal*, Ahmad Amin dalam *Fajr al-Islam* dan 'Ali Muataafa al-Ghurabiy dan *Tarikh al-Firaq al-Islamiyah*.

Sebaliknya terdapat pula pandangan yang berbeda dan bahkan bertentangan sama sekali, bahwa manusia sama sekali tidak mempunyai daya dan kemampuan sedikitpun dalam menentukan perbuatan dan jalan hidupnya. Tak ubahnya sebagaimana disebut, air mengalir, batu bergerak, matahari terbit dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abd al-Jabbar ibn Ahmad dalam *Syarb al-Usul al-Khamsah*, al-Baqhdadiy dalam *al-Farq bain al-Firaq* sampai kepada Harun Nasution dalam bukunya *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*.

Ada pula yang bersifat moderat bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, tetapi manusia mempunyai bahagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan itu. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan manusia. Hal ini dijelaskan oleh Abu Hasan ibn Ismail al-Asy'ariy dalam *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin*. Dalam faham ini Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan manusia, manusia tidak lagi dipaksa. Faham ini adalah faham yang mengambil jalan tengah sebagai faham *Predestination* yang bersifat moderat.

Berdasarkan dari landasan konsep tersebut di atas bahwa masyarakat pesisir pantai Bajoe tidak menutup kemungkinan ada yang sefaham dengan *free will* dan *predestination* atau sebaliknya, Demikian pula, yang moderat dan ada yang ekstrim. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup dari sumber daya laut seperti nelayan, buruh, pembudidaya, dan sebagainya. Masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.

Menurut Dahuri, sebagaimana diungkapkan dalam bukunya "*Membangun Indonesia yang Maju, Makmur dan Mandiri Melalui Pembangunan Maritim*", masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Oleh karena itu, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang membahas secara detail dan memfokuskan pokok bahasannya pada faham *free will* dan *predestination* masyarakat pesisir pantai Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi dalam bentuk *ethnography-ethnomethodology* yang pembahasannya tentang Fahaman *Free Will and Predestination* Masyarakat Pesisir Pantai Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian *ethnography* termasuk penelitian kualitatif yang memerlukan partisipasi cukup lama bagi peneliti di lapangan. Penelitian *ethnography* mengenal dua macam desain penelitian, yaitu penelitian studi kasus dan *multiple site and subject studies*. Penelitian ini termasuk desain penelitian *multiple site and subject studies*. *Multiple site and subject studies* dalam penelitian ini dalam bentuk deskriptif.

Dengan *ethnomethodology* ada beberapa hal yang penting untuk diketahui dalam kaitannya dengan penelitian ini, yaitu (1) obyek dapat ditelaah secara holistik, secara keseluruhan sebagaimana adanya, (2) Berangkat dari emperi di lapangan dan teori dikonstruksikan di lapangan, dan bukan berdasar konseptualisasi peneliti, melainkan berdasarkan konseptualisasi masyarakat yang diteliti itu sendiri, (3) mengambil sample yang memiliki ekstrimitas tertentu, dengan harapan hal-hal yang esensial lebih jelas muncul, dan (4) secara terus menerus menyesuaikan pada empiri di lapangan, hasil analisis perlu di *check* apakah sesuai dengan persepsi masyarakat yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Karena metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu masalah, kejadian, fenomena yang ada sampai pada masa sekarang. Atau dengan kata lain metode deskriptif dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena yang ada, dan berlaku sampai sekarang.

Metode penelitian deskriptif dapat mendeskripsikan satu variable atau lebih. Metode deskriptif sangat tepat digunakan untuk meneliti hal yang berkenaan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk bentuk, proses, dan karakteristik masyarakat atau suatu lembaga.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi populasi utama (pokok) dan populasi penunjang (skunder). Pada populasi utama meliputi seluruh masyarakat pesisir pantai BajoE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Sedangkan sampel penelitian dipilih dari populasi penelitian tersebut, sekitar beberapa sampel penelitian yang ada.

Dari beberapa jumlah sampel penelitian utama telah digunakan metode acak atau *calaster random sampling* dengan mengacu pada pertimbangan jangkauan tempat penelitian, yaitu seluruh seluruh masyarakat pesisir pantai BajoE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang akurat atas segala yang dibutuhkan, karena penyampaian data dan informasi melalui daftar pertanyaan.

Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dilakukan teknik sebagai berikut:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masyarakat pesisir pantai BajoE Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Melakukan pencatatan dapat dibagi menjadi dua yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif lebih menyajikan lebih rinci, mengutip pernyataan orang, bukan meringkaskan apa yang dikatakan itu merupakan catatan yang lebih baik, sebagai catatan deskriptif. Sedangkan catatan reflektif lebih mengetengahkan kerangka pikiran, ide dan perhatian dari peneliti, dan lebih menampilkan komentar peneliti. Dan catatan reflektif berisi materi-materi.
2. Wawancara merupakan salah satu metode dalam penelitian ethnometodology, juga bagi penelitian dengan pendekatan fenomenologi pada umumnya. Wawancara dapat difungsikan dalam dua cara, yaitu (1) sebagai metode utama penelitian, dan (2) sebagai pelengkap dari metode observasi.
3. Angket yaitu dengan melakukan pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan yang diberikan kepada seluruh anggota sampel dengan menggunakan sistem perwakilan masing-masing 5 orang, yaitu pada masyarakat pesisir pantai BajoE Kecamatan

Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Dengan metode ini data yang akan diberikan oleh responden akan lebih akurat dan diharapkan objektif, mengingat angket yang diberikan mencakup pertanyaan-pertanyaan yang cukup simple dan jelas.

Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, angket dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari *meaning*.

Pembahasan

Pandangan Masyarakat Pesisir Pantai di Bajoe tentang Free will atau Predestination

Dalam ranah pemikiran Islam, perbuatan manusia diinterpretasikan oleh dua aliran yang paradoks. Pertama, ada yang memandangnya sebagai kehendak bebas manusia (*free will*). Bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu adalah diciptakan manusia sendiri. Manusia yang berkehendak. Apa yang dia inginkan, dia bisa lakukan. Sebaliknya, yang tidak diinginkan, dia bisa saja untuk tidak melakukannya. Kedua, bagi kelompok ini perbuatan manusia itu bukan diciptakan oleh manusia (*predestination*). Melainkan oleh Allah swt. Bagi kelompok ini, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, manusia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan. Manusia hanyalah dikendalikan Allah swt. Aliran pertama ini, dalam pemikiran Islam dikenal dengan sebutan Qadariyah. Sementara yang kedua disebut Jabariyah. Menurut Abd. Rahman, ia secara jujur mengatakan bahwa istilah *free will* dan *predestination* betul-betul tidak dipahami dan bahkan baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Akan tetapi, ia berusaha berbisnis atas kemauannya sendiri. Kalau demikian, ada kesamaannya dengan *free will* atau Qadariyah.

Konsepsi tentang perbuatan manusia pun sering dijadikan hal dalam menentukan maju dan mundurnya, berkembang dan

terbelakangnya keadaan umat Islam sekarang. Bagi kalangan liberalis, faham Jabariyah yang menurut mereka kemudian diformulasikan oleh Asy'ari dan dianut oleh Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, merupakan faktor utama mundurnya umat Islam sekarang ini. Bagi mereka, jika umat Islam ingin maju, Qadariyahlah atau Mu'tazilah yang harus dianut atau dijadikan worldview untuk mengembalikan kemajuan peradaban Islam, seperti yang dilakukan oleh Abd. Rahman. Menurutnya manusia harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis dengan punya semangat "kalau orang bisa kenapa kita tidak bisa" dan tidak boleh terlebih dahulu tunduk kepada takdir karena tidak ada manusia yang mengetahui takdirnya, karena itu adalah rahasia Tuhan.

Hal ini berbeda dengan Mare yang mengatakan bahwa manusia tiada memiliki daya dan upaya untuk menentukan nasibnya, Semuanya tergantung pada takdir Tuhan, Sedangkan Abd. Rahman berpendapat sebaliknya, melainkan tergantung sejauh mana usaha manusia itu untuk menentukan perjalanan hidupnya, namun demikian manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah ia perbuat.

Dalam perjalanan pemikiran Islam dari zaman ke zaman munculnya kedua kelompok ini, yakni *free will* dan *predestination* sampai saat ini terus saja menjadi perbincangan dikalangan ulama' dan para pemikir kontemporer. Hal ini kemungkinan besar adalah disebabkan kedua faham ini dianggap bertentangan dengan nas-nas syari'at walaupun benar salahnya kedua pemahaman ini masih belum dapat dipastikan, hal ini diakibatkan karena perbedaan interpretasi dari teks-teks agama dan perbedaan teks-teks agama yang dijadikan dasar pijakan berfikir oleh masing-masing kelompok.

Demikian pula, H. Samsuddin tidak memahami yang disebut dengan Qadariyah dalam istilah inggrisnya dikenal dengan nama *free will*. Dan ia juga tidak mengenal istilah Jabariyah atau dengan sebutan *predestination* atau *fatalism*. Menurutnya, manusia mempunyai daya yang besar lagi bebas. Memandang bahwa manusia mampu mewujudkan perbuatan-perbuatannya untuk berusaha dan berbisnis. Apalagi perbuatan baik maupun perbuatan buruk seperti pandangan Mu'tazilah (kalangan rasionalis Islam). Karenanya,

manusia berhak mendapatkan upah dan siksaan terhadap apa yang dilakukannya di akhirat nanti. Tuhan itu bersih dari penyandaran keburukan dan kedzaliman, dari kekufuran dan kemaksiatan. Seandainya kezaliman itu diciptakan Tuhan, berarti Dia zalim.

Manusia dalam pandangan H. Samsuddin diberi kebebasan untuk berbuat atau berusaha sedangkan Manusia dalam pandangan Mu'tazilah adalah pencipta perbuatannya. Kehendak berbuat adalah kehendak manusia. Jika kita perhatikan, pandangan Mu'tazilah dalam masalah ini hampir mirip, untuk tidak mengatakannya sama, dengan pandangan Qadariyah. Karenanya, tidaklah mengherankan jika ada yang menyebut Mu'tazilah itu adalah Qadariyah. Bahkan Fazlur Rahman menyebut Mu'tazilah sebagai aliran bentukan dari pengembangan Qadariyah. Meskipun demikian, sebenarnya dari awal Mu'tazilah menolak stigma tersebut. Sebagaimana disebut Syahratsani, bagi Mu'tazilah sebutan Qadariyah itu lebih tepat diberikan kepada orang yang percaya Qadar Tuhan, baik dan buruknya. Sedangkan Mu'tazilah itu menganut paham *ikhtirariyyah* (pilihan bebas).

Kembali pada kehendak manusia. Menurut peneliti, dari pemaparan tokoh Mu'tazilah di atas, tidak dijelaskan apakah daya yang dipakai untuk mewujudkan perbuatan itu adalah juga daya manusia sendiri, bukan daya Tuhan. Dalam hubungan ini, perlu kiranya ditegaskan bahwa untuk terwujudnya perbuatan, harus ada kemauan atau kehendak dan daya untuk melaksanakan kehendak itu dan kemudian barulah terwujud perbuatan. Bagi Mu'tazilah ternyata daya untuk mewujudkan itu adalah daya manusia bukan daya Tuhan. Ini bisa dilihat bahwa yang dimaksud dengan "Tuhan membuat manusia sanggup mewujudkan perbuatannya" ialah bahwa Tuhan menciptakan daya di dalam diri manusia dan pada daya inilah bergantung wujud perbuatan yang telah dibuat manusia. Tidaklah mungkin bahwa Tuhan dapat mewujudkan perbuatan yang telah diwujudkan manusia.

Untuk itu, manusia perlu berterima kasih kepada sesamanya dalam arti manusia dalam berterima kasih kepada manusia atas kebaikan-kebaikan yang diterimanya, menyatakan terima kasihnya kepada manusia yang berbuat baik itu pula. Demikian pula, dalam

melahirkan perasaan tidak senang atas perbuatan-perbuatan tidak baik yang diterimanya, manusia menyatakan rasa tidak senangnya kepada orang yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tidak baik itu. Lebih lanjut lagi, bahwa manusia berbuat jahat terhadap sesama manusia. Jika sekiranya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia, perbuatan itu mestilah perbuatan Tuhan dan Tuhan dengan demikian bersifat zalim. Hal ini tidaklah mungkin, tidak bisa diterima akal.

Untuk menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kemauan dan kekuasaan mutlak Tuhan, al-Asy'ari memakai kata al-*Kasb* (*acquisition*, perolehan). Dalam kitabnya al-*Maqalat*, sebagaimana dikutip Harun Nasution, Arti al-*kasb* menurut al-Asy'ari, ialah bahwa sesuatu terjadi dengan perantaraan daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perolehan atau *kasb* bagi orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul. Di kitabnya yang lain, al-*Luma'*, al-Asy'ari juga memberi penjelasan yang sama. Arti yang sebenarnya dari al-*Kasb* ialah bahwa sesuatu timbul dari al-*Muktasib* (*acquirer*, yang memperoleh) dengan perantaraan daya yang diciptakan.

Pendapat al-Asy'ari seperti di atas, dapat dilihat dari urainya mengenai perbuatan-perbuatan involunter dari manusia. Dalam perbuatan-perbuatan involunter, kata al-Asy'ari, terdapat dua unsur, yaitu: *Pertama*, penggerak yang mewujudkan gerak. *Kedua*, badan yang bergerak. Penggerak dalam hal ini maksudnya adalah Tuhan, sedangkan yang bergerak maksudnya adalah manusia. Yang bergerak bukanlah Tuhan, sebab, gerak menghendaki tempat yang bersifat jasmani, sedangkan Tuhan tidak mempunyai bentuk jasmani. Dari sinilah kemudian al-Asy'ari mengemukakan teori *kasb*-nya. Menurutnya, al-*Kasb* juga serupa dengan gerak *involunter*, yakni mempunyai dua unsur, yaitu; *Pertama*, pembuat (Tuhan). *Kedua*, yang memperoleh perbuatan (manusia). Pembuat yang sebenarnya dalam *kasb* adalah Tuhan, sedangkan yang memperoleh perbuatan adalah manusia. Tuhan tidak menjadi yang memperoleh perbuatan, karena *kasb* terjadi hanya dengan daya yang diciptakan, dan Tuhan tidak mungkin mempunyai daya yang diciptakan.

Jika dilihat uraian al-Asy'ari di atas, jelaslah sebenarnya tidak ada perbedaan antara perbuatan *involunter* dan al-*kasb*. Dua-

duanya merupakan dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pembuat sebenarnya dari perbuatan-perbuatan manusia. Manusia hanyalah sebagai tempat mewujudkan dan berlakunya perbuatan-perbuatan Tuhan. Jika demikian, kata Harun, *kasb*, sebagaimana halnya dengan perbuatan-perbuatan *involunter*, merupakan perbuatan paksaan dan perbuatan di luar kekuasaan Tuhan. Namun, bagi al-Asy'ari, demikian Harun Nasution, kedua hal itu berbeda. Dalam perbuatan *involunter*, manusia terpaksa melakukan sesuatu yang tidak dapat dielakkannya, walau bagaimanapun ia berusaha, namun dalam *al-kasb* paksaan yang demikian tidak teradapat. Gerak manusia yang berjalan pulang pergi berlainan dengan gerak manusia yang menggigil karena demam. Meskipun keduanya sama-sama mengandung unsur gerak, namun tetap saja berbeda. Dalam hal yang pertama terdapat daya yang diciptakan, sedangkan dalam hal yang kedua terdapat ketidakmampuan. Karena dalam hal pertama terdapat daya, kata Asy'ari, perbuatan itu tidak dapat disebut paksaan; kepadanya diberi nama *al-kasb*. Begitupun, kedua perbuatan itu adalah ciptaan Tuhan.

Di sini belum jelas, daya yang menyebabkan manusia mewujudkan perbuatan itu apakah bersatu dengan diri manusia atau tidak? Apakah daya itu ada sebelum perbuatan atau ada bersama-sama perbuatan? Menurut al-Asy'ari, daya itu lain (berpisah) dari diri manusia sendiri, karena manusia terkadang berkuasa dan terkadang tidak berkuasa. Daya tidak terwujud sebelum adanya perbuatan; daya itu ada bersama-sama dengan adanya perbuatan dan daya itu ada hanya untuk perbuatan yang bersangkutan saja.

Kalau peneliti cermati, baik pendapat Abd. Rahman dan H. Samsuddin. Demikian pula, pendapat Mare, pada dasarnya ingin membela Allah swt. Abd. Rahman dan H. Samsuddin dengan tidak difahami secara mendalam dengan teologi seperti ini, mirip dengan Qadariah, membela Allah swt dalam masalah keadilan. Bagi mereka, Allah swt itu harus adil. Dia tidak mungkin dinisbatkan dengan kejahatan dan kezaliman, yang keduanya itu, terdapat dalam perbuatan manusia. karenanya, bagi mereka perbuatan zalim, buruk, jahat dan juga perbuatan baik itu merupakan perbuatan murni manusia. Namun, tanpa disadari, dengan teologinya ini mereka menafikan kekuasaan dan kehendak Mutlak Allah swt. Di lain sisi,

dengan penekanan yang berbeda, bahkan mungkin bisa dikatakan bertentangan, Mare menganggap bahwa Tuhan itu berkuasa dan berkehendak secara Mutlak. Cuma di sini Mare berbeda dengan Asy'ari. Menurut al-Asy'ari bahwa Allah bisa saja melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya. Dia bisa saja memasukkan orang yang suka berbuat maksiat ke dalam surga. Karena dari awal, surga dan Neraka sudah ditetapkan penghuninya. Namun, Asy'ari juga terjebak. Dia, disadari atau tidak, menafikan keadilan, rahmat dan hikmah-Nya. Mungkin perkataan Muthahhari ada benarnya juga. Dengan memberi tekanan kuat pada prinsip keadilan, kata dia, Mu'tazilah telah mengorbankan tauhid *af'al*, tetapi dengan memberi tekanan kuat pada tauhid *af'al*,

Pengaruh Fahaman Free Will dan Predestination terhadap Masyarakat Pesisir Suku Bajo Pantai Bajoe.

Teologi takdir adalah sangat penting, ia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan maju dan mundurnya umat Islam. Ada paham takdir yang dapat menyebabkan umat Islam mundur dan lemah; sebaliknya ada pula paham takdir yang dapat mendorong umat Islam kepada kemajuan dan kekuatan. Dua pemikiran mengenai takdir tersebut adalah paham *Predestination* dan paham *Free will*. Menurut H. Samsuddin bahwa tidak ada satu pun manusia mengetahui takdirnya. Olehnya itu, manusia wajib berikhtiar dalam arti berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kebahagiaan dan kesenangan di dunia. Demikian pula, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dalam hal ini, berbeda dengan pandangan Mare, walaupun kita berusaha banting tulang untuk mencari dan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dunia, tapi kalau memang Tuhan takdirkan menjadi orang miskin, maka manusia itu akan menjadi miskin. Mengamati kedua pandangan tersebut, kelihatannya pandangan H. Samsuddin berfahaman *free will*. Sedangkan Mare berfahaman *predestination*.

Oleh karena itu, ada benarnya sebagaimana diungkapkan oleh pada umumnya para pemikir pembaharuan dalam Islam mempunyai pandangan bahwa lemahnya umat Islam adalah pengaruh dari paham "*Predestination*". Menurut versi *Predestination*, takdir Tuhan sedemikian rupa, sehingga manusia tidak ubahnya seperti

wayang, yang berbuat begitu rupa mengikuti kelihaihan pengendalianya. Paham *Predestination* mulai meluas, sejalan dengan meluasnya paham Asy'ariah dan paham tarekat menguai dunia Islam, sejak hancur Baghdad sekitar 1200 M.

Versi lain dari paham takdir adalah apa yang disebut paham "*free will*". Kelihatannya paham seperti ini adalah paham minoritas dikalangan umat Islam. Menurut paham ini, takdir Tuhan adalah ketentuan Tuhan bagi mahluk-Nya. Takdir ini menjelma dalam bentuk sifat-sifat alam atau hukum-hukum sebab-akibat yang pasti berlaku. Manusia diberi kebebasan dalam kemauan dan perbuatan, diberi tanggung jawab, supaya manusia dapat diuji apakah beriman, beramal saleh atau sebaliknya. Dengan paham ini, manusia diberi landasan untuk bekerja keras, bekerja semaksimal kemampuan dan bertanggung jawab demi dunia dan akhirat. Ada juga mengambil sikap tengah antara *predestination* dan *free will*, yang disebut paham "*kasab*". Namun, dalam sejarah teologi Islam, hanya membagi paham takdir kepada dua paham yang disebutkan di atas.

Menurut Abd. Rahman bahwa Tuhan itu mempunyai sifat, seperti pandangan al-Asy'ary. Berbeda dengan Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Al-Asy'ari berpendapat, bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil Tuhan sendiri merupakan pengetahuan (*Ilm*). Yang benar, Tuhan itu mengetahui (*Alim*). Tuhan mengetahui dengan pengetahuan-Nya, bukanlah dengan Zat-Nya. Demikian pula bukan dengan sifat-sifat seperti, sifat hidup, berkuasa, mendengar dan melihat.

Disini terlihat, al-Asy'ari menetapkan sifat kepada Tuhan seperti halnya kaum Salafi. Namun cara penafsirannya cukup berbeda. Kaum Salafi hanya menetapkan sifat kepada Allah, sebagaimana teks ayat, tanpa melakukan pembahasan mendalam. Mereka hanya menerima arti dengan jalan kepercayaan, bahwa sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk-Nya. Begitu hati-hatinya mereka dalam menjaga persamaan Allah dengan makhluk-Nya, sehingga mereka mengatakan, "Siapa yang tergerak tangannya, lalu ketika membaca ayat yang berbunyi "Aku (Allah) ciptakan dengan tangan-Ku," lalu ia langsung mengatakan, wajib dipotong tangannya."

Lain halnya dengan al-Asy'ari, baginya arti sifat tidak jauh berbeda dengan pengertian sifat bagi Muitazilah. Bagi al-Asy'ari, sifat berada pada Zat, tetapi sifat bukan Zat, dan bukan pula lain dari Zat. Bagi Mu'tazilah, sifat sama dengan Zat. Sifat tidak mempunyai pengertian yang sebenarnya. Jika dikatakan, yang mengetahui ('Alim), maka artinya menetapkan pengetahuan ('Ilm) bagi Allah, dan yang mengetahui itu adalah Zat-Nya sendiri. Dalam hal ini, menetapkan sifat hanya sekedar untuk memahami bahwa Allah bukanlah jahil. Seperti juga mengatakan yang berkuasa (*qadir*) adalah menetapkan kekuasaan (*qudrat*) bagi Allah. Kekuasaan itu adalah Zat-Nya sendiri. Artinya, menafsirkan kelemahan Allah.

Dalam teori *kasb*, untuk terwujudnya suatu perbuatan dalam perbuatan manusia, terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan adalah hakiki dan perbuatan manusia adalah majazi (sebagai lambang). Al-Baghdadi mencoba menjelaskan kepada kita sebagai berikut. Tuhan dan manusia dalam suatu perbuatan adalah seperti dua orang yang mengangkat batu besar; yang seorang mampu mengangkatnya sendirian, sedangkan yang seorang lagi tidak mampu. Kalau kedua orang tersebut sama-sama mengangkat batu besar itu, maka terangkatnya batu itu adalah oleh yang kuat tadi, namun tidak berarti bahwa orang yang tidak sanggup itu tidak turut mengangkat. Demikian pulalah perbuatan manusia. Perbuatan pada hakekatnya terjadi dengan perantaraannya daya Tuhan, tetapi manusia dalam pada itu tidak kehilangan sifat sebagai pembuat.

Menurut al-Asy'ari, untuk terwujudnya perbuatan perlu ada dua daya, daya Tuhan dan daya manusia. Tetapi daya yang berpengaruh dan efektif pada akhirnya dalam perwujudan perbuatan ialah daya Tuhan, sedangkan daya manusia tidaklah efektif kalau tidak disokong oleh daya Tuhan. Karena manusia dalam teori *kasb* al-Asy'ari tidak mempunyai pengaruh efektif dalam perbuatannya, maka banyak para ahli menilai bahwa *kasb* adalah sebagai Jabariyah moderat, bahkan Ibn Hazm (w. 456 H) dan Ibn Taimiyah (w. 728 H) menilai, sebagai jabariyah murni (*predestination*). Harun Nasution juga berpendapat demikian. Alasannya karena menurut al-Asy'ari kemauan dan daya untuk berbuat adalah kemauan dan

daya Tuhan, dan perbuatan itu sendiri adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia.

Peneliti menilai al-Asy'ari dengan konsep *kasb*-nya yang hendak menengahi antara faham *free will* dengan *predestination*. Menurut peneliti, *Kasb*-nya al-Asy'ari itu telah membawa para pengikutnya berfaham *predestination*, yang mengingkari sama sekali adanya kemampuan pada manusia untuk berbuat. Memang, al-Asy'ari menegaskan bahwa *kasb* manusia itu tidak mempunyai efek nyata dalam mewujudkan perbuatan manusia itu.

Faham teologi al-Asy'ari manusia selalu digambarkan sebagai seorang yang lemah, yang tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa disaat berhadapan dengan kekuasaan yang absolut, apalagi berhadapan dengan kekuasaan mutlak Allah. Karena teologi al-Asy'ari didirikan atas kerangka landasan yang menganggap bahwa akal manusia mempunyai daya yang lemah, maka disinilah letak kekuatan teologi itu, yaitu ia dengan mudah dapat diterima oleh umumnya umat Islam yang bersifat sederhana dalam pemikiran.

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pertama, pandangan masyarakat pesisir pantai Bajoe tentang *free will* dan *predestination* berbeda-beda. Di satu sisi ada masyarakat yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah swt. Manusia dalam kelemahannya banyak bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan dalam arti manusia tidak dapat menentukan perbuatannya. Dan di sisi lain juga terdapat masyarakat yang berpendapat bahwa manusia diberi kebebasan untuk berbuat dan berusaha. Pandangan ini ada unsur kesamaannya dengan Mu'tazilah. Kedua, masyarakat pesisir pantai Bajoe mayoritas dipengaruhi oleh faham *predestination*, sehingga manusia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan perbuatannya.

Daftar Pustaka

- Al-Asy'ari, Abu Hasan Isma'il, Tahqiq, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. 1998. *Prinsip-Prinsip Dasar Aliran Theologi Islam, I*, Alih Bahasa, H.A. Nasir Yusuf dan Karsidi Diningrat, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia.
- Amin, Ahmad. 1975. *Fajar al-Islam*, Cairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mijriyah.
- As-Al-Asy'ariy, Abu Hasan 'Ali ibn Isma'il. 1954. *Maqalat al-Islamiyyin wa Iskhtilaf al-Musallin*, Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.
- Al-Bagdadiy. Tt. *Al-Farq Bain al-Firaq*, Mesir: Maktabah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladuh.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1987. *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam*, Cet.I; Jakarta: Beunebi Cipta.
- Dahuri, R. 2004. *Membangun Indonesia yang Maju, Makmur dan Mandiri Melalui Pembangunan Maritim*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2000. *al-Qur'an dan Terjamahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Ensiklopedi Indonesia*. 1982. Jilid III, Jakarta: Icgtiar Baru-van Hoeve.
- Hanafi, A. 1978. *Teologi Islam (Ilmu Kalam)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Haq, Hamka (ed.). 1998. *Corak Qadariyah dalam pemikiran Islam*, dari kumpulan makalah-makalah Harun Nasution, Jakarta: t.p.
- Kusnadi. 1998. *Nelayan Buruh: Lapisan Sosial yang Paling Miskin di Desa Pantai*, Makalah dipresentasikan di Pusat Studi Komunitas Pantai, 5 Januari.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab Iindonesia*, Jogjakarta Ponpes al-Munawwir.
- Nasution, Harun. 2002. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Edisi Kedua, Cet. I, Jakarta: UI-Press.
- Al-Syahratsani, Abd al-Karim. 1948. *Al-Milal wa al-Nihal*, al-Juz al-Awwal, Tahqiq. Al-Ustad al-Syaikh Ahmad Fahmi Muhammad, Cet. I, Bairut, Libanon: Dar al-Surur.

AFILIASI POLITIK KAUM SANTRI PONDOK NAZZALAL FURQAN DAN RODHOTUL AL-QUR'AN SALATIGA DI ERA MULTI PARTAI

Abdul Syukur

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga
abd_sukur@gmail.com*

Abstract

The objectives of this research are to answer the questions: (1) how is the party affiliation of santri (students of Islamic Boarding School) in the multiparty era of 2009?; (2) what factors did influence the party affiliation of santri in the multiparty of 2009?; (3) how is the socio-political and economical implication of their party affiliation in the multiparty era of 2009?. This study used qualitative approach by which the data were collected by in depth interview, participant observation, and (3) study of document. The findings of this research are: (1) the party affiliation of santri in the multiparty era of 2009 shows a choice dissemination; (2) factors influenced the party affiliation are interest to the elites party performance, such as a kiai or religious leader who became a party manager, similarity of ideology, party's programs, and aspiration concord; (3) socio-political and economical implication of the party affiliation influenced positively and constructively even though there were some lacks and weaknesses on the practical level.

Keywords: *Party affiliation, multiparty, pesantren (Islamic Boarding School).*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimanakah afiliasi partai santri (siswa pondok pesantren) di era multipartai tahun 2009?, (2) faktor-faktor apa yang tidak mempengaruhi afiliasi partai santri di multipartai tahun 2009?, (3) bagaimana implikasi sosial-politik dan ekonomis dari afiliasi partai mereka di era multipartai tahun 2009?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan (3) studi dokumen. Temuan dari penelitian ini adalah: (1) afiliasi partai santri di era multipartai tahun 2009 menunjukkan sebuah

penyebaran pilihan, (2) faktor yang mempengaruhi minat afiliasi partai adalah kinerja partai elit, seperti pemimpin kiai atau agama yang menjadi manajer partai, kesamaan ideologi, program partai, dan aspirasi kerukunan, (3) implikasi sosial-politik dan ekonomis afiliasi partai dipengaruhi secara positif dan konstruktif meskipun ada beberapa kekurangan dan kelemahan pada tingkat praktis.

Kata kunci: Afiliasi partai, multipartai, pesantren (Pesantren).

Latar Belakang Masalah

Memasuki millennium ketiga dewasa ini, sejarah pergerakan umat Islam Indonesia belum menunjukkan hasil yang sepadan dengan besarnya umat yang ada. Dalam hal hubungan politiknya dengan Negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu. Baik pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial dan dapat merobohkan landasan Negara yang nasionalis (Effendy, 1988 : 3). Terutama karena alasan ini, lebih dari empat dekade kedua pemerintahan di atas berupaya untuk melemahkan dan “*menjinakkan*” partai-partai Islam (Karim, 1999 : 25).

Salah satu kebijakan penting dalam pembangunan politik pada masa Orde Baru adalah “*penciutan*” partai-partai Islam dan juga partai-partai lain pada umumnya. Melalui kebijakan penyederhanaan dan fusi partai tahun 1973, hanya dikenal dua partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu Golongan Karya (Golkar). Partai-partai politik yang beraliran Islam berfusi ke dalam PPP yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti. Sementara PDI merupakan fusi dari partai-partai politik yang beraliran nasionalis-relegius seperti PNI, MURBA, Parkindo dan Partai Katolik. Oleh karena itu, melalui penyederhanaan kepartaian ini muncullah satu kekuatan politik besar yang dominan (*one and a half party system*) yaitu Golkar (Kantaprawira, 1985 : 98).

Pada masa Orde Baru, PPP merupakan pencerminan dari afiliasi kepartaian umat Islam terutama kaum Santri (dalam pengertian yang sempit) terhadap pilihan politiknya. Akan tetapi, perubahan dan perkembangan politik Islam di Indonesia masa Orde Baru yang sarat dengan gambaran tentang transformasi sosial-

budaya, ekonomi dan politik Indonesia yang secara struktural telah merubah orientasi politik umat Islam Indonesia.

Sebagai salah satu akibat adanya perubahan orientasi politik tersebut di atas, maka tidak selamanya umat Islam menyalurkan aspirasi politiknya ke PPP, namun juga ke Golkar bahkan tidak sedikit pula yang masuk ke PDI. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam setiap Pemilu Orde Baru, dengan tidak mengingkari intervensi penguasa yang ada ketika itu, Golkar selalu keluar dan menjadi pemenang mayoritas yaitu sebagai partai yang beraliran nasionalis-sekuler dari mayoritas umat Islam, agama yang dianut oleh sebagian terbesar penduduk Indonesia.

Memasuki era multi partai dalam kehidupan perpolitikan Indonesia saat ini, maka PPP bukan lagi merupakan satu-satunya partai politik Islam yang menyuarakan kepentingan Islam dan kaum Santri. Kemunculan partai politik Islam baru saat ini yang telah mengikuti Pemilu 9 April 2009 yang lalu, menunjukkan adanya basis massa dan dukungan yang berbeda terhadap partai politik tersebut dari kaum Santri.

Permasalahan

Permasalahan yang dikedepankan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah afiliasi kepartaian kaum Santri dalam era Pemilihan Umum multi partai 2009?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi afiliasi kepartaian kaum Santri dalam era Pemilihan Umum multi partai 2009?
3. Bagaimanakah implikasi sosial-politik dan ekonomi dari afiliasi kepartaian kaum Santri dalam era Pemilihan Umum multi partai 2009?

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang kaum Santri berikut dengan segala perilakunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pesantren, karena hubungan di antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

Sejauh yang dapat ditelusuri, selama ini penelitian yang berkaitan dengan kaum Santri dan Pesantren memang cukup banyak dan fariatif terutama apabila dilihat dari sisi fokus, masa dan cakupan kajian. Di antaranya adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti senior tentang Pesantren semisal Abdurrahman Wahid (1974), Zamakhsari Dhofier (1982), M. Dawam Rahardjo (1985), Nurcholish Madjid (1988), Masdar Farid Mas'udi (1990), Martin Van Bruinessen (1990, 1994, 1995), Greg Fealy (1997), Andree Feillard (1999), dan Greg Fealy-Greg Barton (1999), Syamsuddin Arief (2008).

Apabila diperhatikan dengan seksama, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan kepada nilai-nilai intrinsik ke-Pesantrenan dengan segala corak dan keunikan masing-masing.

Temuan dari Abdurrahman Wahid (1974) misalnya, menjustifikasi bahwa Pesantren merupakan sub-kultur, karenanya kehidupan Pesantren bila dilihat dari struktur pengajaran yang diberikan didapati jenjang pelajaran yang berulang-ulang dari tingkat ke tingkat tanpa terlihat kesudahannya. Persoalan yang diajarkan seringkali pembahasan serupa yang diulang-ulang selama jangka waktu bertahun-tahun walaupun buku teks yang dipergunakan berlain-lainan. Karena itu, kurikulumnya bersifat sangat fleksibel, lentur dan *luwes*.

Sementara itu, corak lain dari kehidupan Pesantren adalah sangat kuatnya kekuasaan seorang Kyai. Menurut Abdurrahman Wahid (1974 : 41-43), seorang Kyai dengan para pembantunya merupakan hirarki kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui dalam lingkungan Pesantren. Ditegakkan di atas kewibawaan moral, sang Kyai bertindak "*sebagai penyelamat*" para Santrinya dari kemungkinan-kemungkinan melangkah ke arah kesesatan, kekuasaan ini memiliki perwatakan yang mutlak. Hirarki intern ini, yang sama sekali tidak mau berbagi tempat dengan kekuasaan dari luar dalam aspek-aspeknya yang paling sederhana pun, juga membedakan kehidupan Pesantren dari kehidupan umum di sekitarnya. Demikian besar kekuasaan seorang Kyai atas diri Santrinya, sehingga si Santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa merasa terikat dengan Kyainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moril dalam kehidupan pribadinya.

Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Zamakhsari Dhofier (1982 : 44) menemukan adanya hubungan sinergis elemen pokok sebuah Pesantren yaitu pondok, masjid, Santri, pengajaran kitab-kitab klasik Islam dan Kyai. Kelima elemen utama Pesantren tersebut keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

M. Dawam Rahardjo (1985 : 3-8) menemukan adanya jatidiri Pesantren sebagai lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Agama Islam. Karenanya, tidak dapat diragukan lagi apa-apa yang diajarkan di Pesantren bukanlah hal-hal yang sifatnya semata-mata "*ukbrawi*", melainkan pula yang sifatnya "*duniawi*", hanya saja sifatnya yang masih terangkum dalam apa yang disebut ilmu-ilmu agama yang belum mengalami proses diferensiasi dan spesialisasi dalam cabang-cabang ilmu seperti yang dikenal dunia modern.

Sementara itu, Syamsuddin Arief (2008: 23-38) dalam kajiannya menemukan adanya jaringan-jaringan yang terdapat di kalangan Pesantren yaitu Jaringan Genealogis, Jaringan Intelektual, Jaringan Spiritual (Tasawuf), Jaringan Teologis dan Mazhab, dan Jaringan Sosial Politik.

Upaya teoritis untuk memahami Islam politik di Indonesia didasarkan kepada kisah mengenai kekalahan-kekalahan politik Islam secara formal. Upaya teoritis itu berkembang menjadi kurang normatif dibandingkan dengan upaya-upaya serupa di wilayah Islam, baik pada periode klasik maupun modern. Untuk alasan-alasan yang sebagian besarnya belum terungkap dengan jelas, teori mengenai Islam politik di Indonesia secara substantif dibangun di atas landasan empirik dimana perjumpaan antara Islam dan politik di kepulauan ini berlangsung.

Untuk memahami fenomena Islam politik di Indonesia di atas, maka harus ada upaya teoritis untuk menjelaskan Islam politik di Indonesia. Menurut Bahtiar Effendy, ada lima pendekatan teoritis untuk menafsirkan fenomena Islam politik di Indonesia, yakni *domestikasi Islam*, *skismatik aliran*, *trikotomi*, *Islam kultural* dan *dekonfessionalisasi*.

Teori domestikasi Islam yang dikembangkan oleh Hery J Benda, teori ini menggambarkan perebutan kekuasaan antara Islam dan unsur-unsur non Islam (unsur-unsur non Islam ini diidentifikasi oleh Benda sebagai unsur ke-jawa-an), dimana unsur terakhir selalu mengalami kemenangan.

Kemudian muncul teori skismatik aliran yang dipelopori oleh tim peneliti *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) pada tahun 1950-an di Mojokuto, Jawa Timur. Teori ini muncul untuk menjawab mengapa perebutan kekuasaan itu terjadi. Pada awal permulaannya, perebutan ini terjadi pada tatanan agama, dimana aliran-aliran yang diidentifikasi oleh Gertz berupaya untuk mempenetrasi aliran lain. Tetapi kemudian perebutan kekuasaan ini bergerak menuju permasalahan politik.

Teori berikutnya adalah pendekatan trikotomi yang dikembangkan oleh Allan Samson. Teori ini dirumuskan berlandaskan pada pertanyaan bagaimana para aktivis politik Islam memberikan respon terhadap tantangan yang diberikan kepada mereka oleh kelompok elit penguasa. Para aktivis politik Islam ini menemukan tiga pendekatan politik Islam yakni *fundamentalis*, *reformis* dan *akomodisionis* di dalam masyarakat politik Islam.

Selanjutnya adalah pendekatan Islam kultural, dimana teori ini dikembangkan oleh Donald K Emmerson. Teori ini mengarahkan kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan-kegiatan non politis. Jadi, teori ini lebih menekankan kepada menumbuhkan kembali tradisi kultural Islam, untuk menghindari kekecewaan politik. Sehingga dengan Islam kultural ini, akan memunculkan sebuah Islam yang lebih simpatik dan lebih substantif.

Berbeda dengan keempat tinjauan teoritis yang menguraikan penafsiran Islam politik di Indonesia, masih ada satu tinjauan teoritis lagi yang perlu dijelaskan yakni pendekatan *dekonfessionalisasi*. Pendekatan ini menawarkan penjelasan yang konstruktif mengenai hubungan politik yang antagonistik antara Islam dan negara. Proses konstruksif ini bisa ditemukan dalam proses pembentukan identitas bangsa Indonesia.

Pendekatan dekonfessionalisasi ini dikembangkan oleh CAO Van Nieuwenhuijze pada pertengahan 1960. Ia berusaha menjelas-

kan hubungan politik antara Islam dan negara nasional moderen Indonesia dalam kerangka teori dekonfessionalisasi. Teori dekonfessionalisasi ini dipinjam dari kecendrungan akomodasionis kelompok-kelompok sosio-kultural dan politik Belanda. Di mana dalam konteks sosial keagamaan di Belanda, ada ciri khas yang menonjol dalam kehidupan sosial keagamaan, dimana terdapat "tingkat kesulitan tertentu yang tidak dapat dihindari dalam hubungan antar berbagai kelompok denominasi".

Asal usul konsep dekonfessionalisasi ini menurut Nieuwenhuijze, pada mulanya digunakan di Belanda untuk menunjukkan bahwa, agar dapat menyelenggarakan suatu pertemuan tertentu, wakil-wakil dari berbagai kelompok peribadatan akan menyepakati sebuah landasan bersama yang dirumuskan bersama, yakni tentang persetujuan bahwa implikasi-implikasi tertentu dari sejumlah doktrin peribadatan mereka akan dihindari sebagai topik pembicaraan.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, bisakah dalam suatu pertemuan bisa didekonfessionalisasikan dan bagaimana pula suatu topik diskusi, yang dalam prespektif agama dipersengketakan, bisa dihindarkan?. Tradisi akomodasi Belanda memberikan landasan bagi argumen bahwa tujuan seperti itu hanya dapat dicapai jika para pesertanya, yang berasal dari berbagai latar belakang agama, sepakat untuk berinteraksi atas dasar sebuah kerangka bersama yakni dengan menggunakan istilah-istilah dan kosa kata yang dapat dipahami dan diterima semua kelompok.

Berdasarkan dari kesepakatan ini, interaksi dari latar belakang keagamaan akan menghasilkan suatu kesepakatan demi kepentingan bersama. Pertemuan yang di "dekonfessionalisasi" ini mampu menjembatani jurang yang tajam dalam eksklusivitas keagamaan di Belanda.

Menurut Nieuwenhuijze, keyakinan tidak akan berubah, ketika berubahnya terminologi yang dipakai. Artinya, seorang katolik roma yang menyampaikan pembicaraan yang telah di "dekonfessionalisasi", tetaplah seorang pengikut katolik roma. Dari latar belakang kultural ini, Nieuwenhuijze mencoba untuk meneliti relasi antara Islam dan negara disaat situasi sosial keagamaan di

Indonesia memungkinkan untuk menggunakan pendekatan dekonfessionalisasi. Untuk itu, teori dekonfessionalisasi ini harus diterapkan secara lintas kultural dan kebangsaan di Indonesia.

Pasca kolonial, pemerintahan republik yang baru dibentuk oleh koalisi muslim dan beberapa partai nasionalis antara lain Masyumi, Nahdatul Ulama, PNI dan PKI meskipun selama bertahun-tahun peperangan pihak muslim merupakan kekuatan-kekuatan organisasi politik yang terbesar, sekarang ini kekuatan mereka berada di bawah kekuasaan partai nasionalis Indonesia. Pemerintahan yang dibentuk pada periode ini oleh aktor-aktor yang memiliki latar belakang sosial keagamaan yang berbeda seperti muslim, nasionalis, kristen, sekuler, sosialis, modernis dan ortodoks.

Realitas membuktikan bahwasanya bagi mereka yang memiliki latar belakang sosial keagamaan yang sama, tetap saja terjadi perbedaan dalam pandangan keagamaan. Oleh karena itu, menurut Nieuwenhuijze, orang-orang seperti ini menghadapi tantangan untuk bagaimana merelaisasikan negara Indonesia yang merdeka dalam pengertian modern.

Tidak hanya itu, bagi mereka yang berlatar belakang sosial keagamaan pun diharuskan untuk menjawab tantangan bagaimana membentuk negara Indonesia yang modern. Dalam rangka mencapai tujuan untuk membangun negara modern inilah para aktor mengenyampingkan sifat-sifat eksklusivitas keagamaan mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Islam, menurut Nieuwenhuijze, adalah faktor yang dominan dalam revolusi nasional. Dan bahkan, ia melihat bahwa situasi dimana Islam harus memainkan peran dalam proses pembangunan bangsa menyerupai jenis dekonfessionalisasi yang berkembang di Belanda. Kalangan Islam, dalam interaksi mereka dengan aktor-aktor lain, rela melepaskan orientasi mereka "yang formal dan kaku" ini. Katanya lebih lanjut, "agar daya panggil mereka mencakup jangkauan yang lebih luas, dan pada saat yang sama tetap ada jaminan bahwa umat Islam mengakui peran yang telah mereka mainkan" dalam kasus ini, dekonfessionalisasi adalah konsep yang digunakan untuk memperluas penerimaan umum, mencakup semua kelompok yang berkepentingan, terhadap konsep-konsep "atas dasar pertimbangan kemanusiaan bersama".

Teori dekonfessionalisasi yang dikembangkan oleh Nieuwenhuijze ini, ia menggambarkan fenomena Islam politik yang terjadi disaat itu. Pertama ia mencontohkan dengan penerimaan Pancasila sebagai idiologi yang digunakan Indonesia untuk menjalin kehidupan bernegara. Kasus kedua lebih pada adanya pembentukan departmen agama sebagai jaminan keagamaan bagi umat Islam.

Dalam pandangannya, penerimaan Pancasila bukan Islam, sebagai dasar negara tidak serta merta berarti kekalahan politis umat Islam, seraya menyajikan analisis tesktual panjang mengenai isi Pancasila, ia percaya bahwa "apa yang relevan di sini adalah masing-masing sila dari Pancasila itu punya kaitan dengan pemikiran Islam. Kaitan tersebut meski tidak bersifat formal dapat ditemukan dalam prinsip keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan, karena itu dalam pandangannya, Pancasila mengandung perspektif religus yakni sebuah unsur penting yang berfungsi sebagai landasan sosial politis bersama bagi umat Islam untuk mengekspresikan kaitan dengan keinginan mereka terhadap kelompok lain.

Untuk memuaskan kepentingan pihak muslim, konstitusi yang berlandaskan Pancasila menyediakan pembentukan kementrian urusan agama. Kementrian ini dibentuk untuk melindungi kebebasan beragama dan untuk menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda namun tujuan yang utama adalah menangani urusan agama muslim, seperti urusan perkawinan dan perceraian, urusan wakaf, kemesjidan dan urusan haji. Gagasan pembentukan departemen agama adalah untuk memberikan jaminan kelembagaan, terutama bagi umat Islam di Indonesia, bahwa negara akan sungguh-sungguh memperhatikan masalah-masalah agama.

Dari kasus pembentukan agama ini, CAO menggambarkan teori dekonfessionalisasinya. Menurutnya, dalam konteks negara nasional Indonesia modern, sudah dapat dipastikan bahwa jaminan kelembagaan itu tidak boleh eksklusif hanya bagi orang Islam. Itu berarti bahwa konsekuensi politis pembentukan departemen agama tidak akan menjurus kepada penerapan cita-cita Islam dalam pengertian sempit atau skriptualistik, tetapi pembentukan itu berhasil memberikan rasa aman bagi umat Islam bahwa mereka sungguh-sungguh diperhatikan.

Pendekatan teoritis Nieuwenhuijze terhadap Islam politik di Indonesia modern barangkali adalah keharusannya untuk menampilkan diri dalam bentuk yang obyektif, dan karenanya tidak "skriptualistik". Dalam konteks ini, teori dekonfessionalisasi harus dilihat sebagai "penafsiran kreatif atas prinsip-prinsip Islam secara sedemikian rupa, dalam rangka memapankan kembali relevansinya dengan kehidupan di Indonesia di atas segalanya, umat Islam kini hidup dan ingin terus berkipar di abad ke-20 dan seterusnya dan yang lebih penting di zaman Indonesia kontemporer.

Islam politik kontemporer di Indonesia tengah berusaha untuk mengidentifikasi eksistensinya dalam politik nasional sehingga tidak dapat dihindari bahwasanya terjadi transformasi format Islam politik di Indonesia. Untuk itu, Islam politik berupaya untuk merubah formatnya dari legalistik-formalistik menuju substantif. Dengan perubahan seperti ini, Islam politik akan diterima dalam perpolitikan nasional.

Salah satu cara paling tepat (?) untuk menghadirkan Islam politik dewasa ini bukanlah melalui apa yang disebut Nieuwenhuijze sebagai jalan dekonfessionalisasi, melainkan dengan penampilannya yang lebih obyektif dan substantif. Itulah jenis Islam politik yang dapat mentransendenkan diri dari kepentingan-kepentingan formalistik, legalistik dan eksklusif dan lebih berusaha mencapai kepentingan-kepentingan yang substantif, integratif dan inklusif. Sejauh politik memberi ruang bagi aritkulasi nilai-nilai individual dan kelompok, Islam politik baru ini lebih memfokuskan perhatian kepada substansi nilai-nilainya sendiri.

Disadari sepenuhnya bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam seperti STAIN Salatiga memiliki peran strategis dalam upayanya untuk menumbuh-kembangkan *Civil Society* yang cerdas dan bermoral di Indonesia mengingat di Perguruan Tinggi telah tersedia adanya berbagai sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya budaya. Hal ini mengandung maksud bahwa keberadaan bangunan dan tegaknya demokrasi Indonesia yang berkeadaban pilar-pilar dasarnya dapat disemaikan secara pasti dan *genuine*. Karena itulah dengan semangat akademis yang tinggi, kajian yang hendak dilakukan dalam penelitian ini di samping untuk menambah literatur kajian tentang Pesantren, penelitian ini

berupaya untuk memberikan “*warna lain*” dari salah satu elemen dasar Pesantren yakni Santri jika dilihat dari perspektif afiliasi kepartaiannya dalam era Pemilu multi partai sekarang ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau naturalistik, karenanya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang luas dan mendalam tentang afiliasi kepartaian kaum Santri dalam era Pemilihan Umum (Pemilu) multi partai. dalam penelitian ini pondok Pesantren yang dipilih menjadi objek penelitian adalah pondok pesantren *Nazzalal Furqon dan Rodhotul Al-Qur'an* yang berlokasi di sebelah timur terminal bus kota Salatiga di bawah asuhan Simbah K.H. Muhammad Munawir Munajad *al khafidz*, dan pondok Pesantren An-Nur Candirejo Tuntang Semarang yang diasuh Simbah K.H. Mawahib Makmun. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif sebagai data utama dan data kuantitatif sebagai pendukung. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik; yaitu (1) wawancara mendalam (*indepth interview*), (2) obsevasi partisipan (*participant obervation*), dan (3) studi dokumentasi (*study of ducumen*). Tiga teknik tersebut merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif yang disepakati oleh sebagian besar penulis (Nasution, 1988: 28). Dalam menganalisis data dilakukan dua tahap, yaitu (1) menganalisis data kasus individu (*individual case*), dan (2) analisis data lintas kasus (*cross case analysis*).

Pembahasan

1. Sejarah berdiri dan tujuan Pondok Pesantren Nazzalal Furqon dan Rodhotul Al-Qur'an Kota Salatiga

Berdirinya pondok pesantren *Nazzalal Furqon dan Rodhotul Al-Qur'an* Kota Salatiga tidak dapat dilepaskan dari *riyadlob* yang serius dan berkesinambungan selama bertahun-tahun yang dilaksanakan oleh Simbah K.H. Munajat yang merupakan ayahanda dari Simbah K.H. Munawir *alkhafidz* melalui wadah *toriqob*. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sangat lazim di kalangan pengikut *toriqob* adalah kehidupan duniawi yang apa adanya dan

jauh dari gemerlapan apalagi “*pamer*” materi, karenanya *toriqob* ini pun berlangsung dan hidup dengan fasilitas *gubug* atau *padepokan* yang teramat sederhana. Aktifitas atau kegiatan yang paling menonjol dari *toriqob* ini adalah kegiatan dzikir yang dilaksanakan secara rutin pada setiap hari kamis. Pada perkembangan selanjutnya, sepeninggal Simbah K.H. Munajat, *toriqob* ini berubah menjadi pondok pesantren pada tahun 1991 karenanya kemudian pondok pesantren ini di samping tetap menjalankan aktifitas ke-*toriqob*-an juga melaksanakan *sema'an* dan hafalan Al-Qur'an di bawah bimbingan Simbah K.H. Munawir *alkhafidz* yang merupakan pembina dan pengasuh utama (wawancara dengan Simbah K.H. Munawir *alkhafidz* di kediamannya, 1 Maret 2010).

Perubahan bentuk dan wadah dari *toriqob* menjadi pondok pesantren ini, tidak serta merta diikuti dengan penciptaan administrasi yang rapi dan *njilmet* sebagaimana kebiasaan-kebiasan institusi sosial yang ada pada umumnya. Bahkan pemasangan papan nama pondok pesantren pun tidak dilakukannya hingga sekarang. Sifat ikhlas, tanpa pamrih apalagi *riya* betul-betul ditanamkan dan diamalkan secara mendalam dan terus menerus kepada para santri yang belajar di pondok pesantren ini.

Pondok pesantren yang terletak di sebelah timur terminal bus Tingkir Salatiga ini, sampai sekarang memiliki santri tidak kurang dari 250 orang, sebuah jumlah santri yang terbesar di kota Salatiga untuk saat ini. Pilar-pilar utama seperti keberadaan masjid, *padepokan* santri, kajian-kajian kitab tertentu terdapat juga di pondok pesantren ini. Akan tetapi, kurikulum utama pondok pesantren ini adalah *tahfidzul* Qur'an sehingga kajian-kajian kitab seperti kitab *Fathul Qorib* dan *Sulam Taufiq* hanyalah merupakan bekal tambahan yang diberikan kepada para santri.

Tujuan utama pondok pesantren ini adalah menghasilkan *khafidz* dan *khafidzoh*. Guna mendukung terhadap ketercapaian tujuan tersebut, setiap saat para santri dibimbing dalam membaca Al-Qur'an untuk kemudian setiap selesai jama'ah sholat fardlu para santri melakukan “*setoran hafalan*” kepada pengasuh dan inilah kegiatan utama para santri setiap harinya. Akan tetapi dalam rangka menghasilkan seorang *khafidz* atau *khafidzoh* yang mumpuni, pengasuh sering mengikutsertakan juga para santrinya dalam

kegiatan-kegiatan di luar pondok pesantren yang berkaitan dengan membaca dan menghafal Al-qur'an.

2. Sejarah berdiri dan tujuan Pondok Pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Semarang

Seperti halnya berdirinya berbagai pondok pesantren di Indonesia yang lain, berdirinya Pondok Pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Semarang juga tidak dapat dilepaskan dari peta sosio-kultural masyarakat setempat. Dukuh Klego desa Candirejo merupakan salah satu desa di kecamatan Tuntang yang berpenduduk besar dan luas wilayahnya. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk terkadang tidak sebanding dengan penguasaan ke-Islam-an yang mumpuni. Hal ini terlihat bahwa banyaknya anak muda yang belum atau tidak menguasai ilmu-ilmu ke-Islam-an.

Berangkat dari kondisi seperti inilah Simbah K.H. Mawahib Makmun pada tanggal 9 Oktober 1985 mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama pondok pesantren "An-Nur". Pemberian nama yang demikian ini mengandung maksud bahwa pondok pesantren ini diharapkan nantinya benar-benar dapat menjadi cahaya yang menerangi masyarakat sekitar, dan menjadi "kiblat" masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan keagamaan, di samping *penisbahan* nama kakek yang merupakan sesepuh dan cikal-bakal desa yakni Simbah K.H. Nur Salim. Dengan ketekunan, kesabaran dan didukung mujahadah yang tinggi dan terus menerus kepada Allah SWT para santri dibimbing untuk dapat menguasai ilmu-ilmu ke-Islam-an secara memadai untuk selanjutnya dapat mendakwahkan Islam kepada masyarakat di mana pun berada. Untuk mendukung tercapainya tujuan ini, para santri sejak dini sering diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan dakwa di masyarakat sekitarnya.

Adanya masjid, padepokan santri dan kajian-kajian kitab tertentu yang merupakan komponen adanya pondok pesantren sebagaimana di kemukakan oleh Zamakhsari Dhofier (1986:43), di pondok pesantren ini pun ada. Kitab-kitab dasar seperti *Aqidatul Awam*, *Sulam Munajat*, dan *Sulam Taufieq* menjadi kajian utama untuk membekali para santri di pondok pesantren ini.

Untuk melangsungkan pembelajaran kepada para santri yang berjumlah kurang lebih 100 orang di pondok pesantren ini, Simbah K.H. Mawahib Makmun sebagai pengasuh utama dibantu oleh beberapa *asatidz* sesuai dengan bidang kemampuan dan kesempatan yang ada masing-masing.

3. Jaringan Pesantren

Pola-pola jaringan Pesantren sebagai berikut:

a. Jaringan Genealogis

Jaringan genealogis terbentuk melalui hubungan darah atau kekerabatan antara Kyai yang satu dengan yang lainnya. Kyai sangat teliti dalam memilih calon menantu. Bahkan, biasanya calon menantu itu dari kalangan santri mereka yang terpandai. Santri yang paling *alim* dan patuh biasanya menjadi calon pengganti Kyai.

Menurut Zamakhsari Dhofier (1994:62-62) sarana utama yang ditempuh para Kyai dalam melestarikan dan mempertahankan tradisi Pesantren adalah membangun solidaritas dan kerjasama melalui tiga cara. *Pertama*, adalah tradisi ke-Kyai-an, keluarga yang terdekat harus menjadi calon kuat pengganti kepemimpinan Pesantren. *Kedua*, para Kyai mengembangkan jaringan alienasi perkawinan (endogamous) antar keluarga Kyai. *Ketiga*, Kyai dan keluarganya mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan mata rantai intelektual di antara mereka.

b. Jaringan Intelektual

Jaringan intelektual lahir dari hasil pembelajaran baik formal maupun non formal antara guru murid (Kyai-santri). Pembuktian jaringan intelektual ini dapat dilihat dan dibuktikan dari kurikulum atau kitab-kitab yang pernah dipelajari dan kemudian diajarkan kepada murid-murid generasi berikutnya. Di samping itu, jaringan intelektual juga lahir dari hubungan horizontal antar guru (sesama Ulama) dan antar murid.

c. Jaringan Spiritual (Tasawuf)

Pada umumnya jaringan ini terbentuk melalui organisasi tasawuf yaitu tarekat. Istilah tarekat sendiri berasal dari bahasa arab "*thariqat*" yang berarti jalan atau metode. Menurut istilah tasawuf, tarekat berarti sebagai petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai jalan Rasulullah SAW., sahabat, para tabi'in turun-temurun sampai pada guru, Ulama-ulama yang bersambung hingga kini. Para ahli tasawuf berpendapat (Suwito dan Muhib, 2000:91) bahwa tarekat itu bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT., melalui latihan jiwa (*riyada*) dan berjuang melawan hawa nafsu (*mujahadah*)serta membersihkan diri dari sifat tercela (*tazkiyah al-nafs*).

Keterlibatan Kyai Pesantren dalam afiliasi tarekat turut mempengaruhi corak Pesantren yang dibina dalam hal bacaan shalawat, wirid, tradisi haul, tawassul dan sebagainya.

d. Jaringan Teologis dan Mazhab

Jaringan teologi ini terbentuk atas dasar kesamaan paham teologi yang diyakini dan dianut oleh para Kyai dan buku-buku ajar yang digunakan di Pesantren. Aspek lain yang membentuk jaringan teologis dan mazhab ini dapat dilihat dan dilacak pada kitab-kitab referensi yang digunakan dalam lingkungan Pesantren. Ditemukan banyak persamaan buku dan kitab antara satu dengan yang lainnya. Lebih jauh, adalah munculnya kelompok-kelompok pengajian (Majlis Ta'lim) yang menggunakan Ustaz dan para Kyai Pesantren sebagai penceramah turut mengambil peran signifikan dalam diseminasi paham teologis dan mazhab (Suwito dan Muhib 2000: 93-94).

e. Jaringan Sosial Politik

Jaringan ini didasarkan pada fakta bahwa Kyai bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai elit sosial dan banyak memberi andil dalam perkembangan politik baik dalam skala lokal maupun nasional. Keterlibatan Kyai pada jaringan ini tarafnya berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan sosial dan politik Kyai yang kemudian berimbas pada Pesantren yang diasuhnya. Munculnya beberapa

organisasi Islam seperti NU, Persatuan Islam, al-Irsyad, al-Ittihad Islamiyah (Sukabumi), Persatuan Ulama seluruh Aceh (Sigli), al-Jami'ah al-Washiliyah, Majelis Islam A'la Indonesia yang selanjutnya berubah menjadi Masyumi pada 1935 merupakan bukti kuat bahwa Kyai memiliki afiliasi sosial politik tersendiri.

4. Peranan Santri

a. Masyarakat Umum

Salah satu tujuan pendidikan pondok pesantren *Nazzalat Furqon dan Rodhotul Al-Qur'an* Kota Salatiga dan Pondok Pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Semarang adalah *menyiapkan* para santri untuk kehidupannya dalam masyarakat setelah menyelesaikan dari pesantren. Para santri dididik agar memiliki pengetahuan keislaman yang memadai, aqidah yang benar dan mantap, akhlaq yang terpuji, keterampilan hidup yang mandiri dan menghayati tugas dan perannya menurut ajaran Islam di dalam masyarakat sebagai seorang muslim dalam pengertian yang purna. Oleh karenanya, teori santrinisasi tersebut dipraktikkan di kedua pondok pesantren tersebut. Setiap kali pulang kampung pada musim libur, santri-santri membawa ilmu barunya ke rumah dan menyebarluaskan apa-apa yang dipelajari dan didapatkan di pondok pesantren. Akan tetapi terdapat juga santri yang mendakwahkan Islam terbatas hanya pada lingkungan keluarganya semata dan itu pun jika dikehendaki. Memperhatikan kenyataan sebagai mana tersebut, tidaklah mengherankan apabila para santri ketika sudah menyelesaikan pendidikannya dari pesantren, mereka pada umumnya sudah siap untuk berperan serta secara aktif sebagai seorang alim yang hendak mengabdikan dirinya untuk masyarakat guna memperkuat dan baik dalam pengamalan ajaran-ajaran Islam.

Sekolah-sekolah pendidikan Islam “tidak hanya memberi kontribusi pada menyebarkan agama Islam atau paling tidak “menjadi contoh” yang perbaikan pendidikan Islam di Indonesia, melainkan juga pada proses santrinisasi masyarakat Muslim.” (Azra, 2001:79) Namun, saya merasa penting untuk

menyebut di sini bahwa peran santri dalam proses kebangkitan Islam tersebut walaupun penting, juga terbatas dan beberapa macam fakta lain seperti keadaan politik di Indonesia dan di arena internasional yang mempengaruhi perkembangan agama Islam di Indonesia.

b. Masyarakat Lokal

Para santri di pondok pesantren *Nazzalal Furqon dan Rodhotul Al-Qur'an* Kota Salatiga yang disiapkan untuk menjadi seorang *khafidh* atau *kahafidhob* keberadaannya di masyarakat sekitar sangat strategis terutama dalam menyiapkan generasi-generasi muda Islam untuk berkemampuan membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Sementara itu para santri dari Pondok Pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Semarang memiliki peran yang tidak kecil dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam di masyarakat sekitarnya. Banyak kegiatan *tabligh* yang diselenggarakan oleh mereka mulai dari pengajian rutin setelah sholat subuh, pengajian ahad pagi, mujahadah selapanan pada malem Jum'at kliwon, peringatan hari-hari besar agama seperti pada peringatan maulid Nabi, *rojabiyah* dan lain-lain. Dalam hemat peneliti, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para santri sebagaimana dijelaskan di atas memiliki dampak positif baik bagi penguasaan dan pengembangan kemampuan ajaran-ajaran agama Islam para santri sekaligus bagi masyarakat di sekitarnya.

5. Profil Kehidupan Sehari-hari Santri

Tidak ada banyak keragaman bagi para santri dalam kehidupan sehari-hari baik di pondok pesantren *Nazzalal Furqon dan Rodhotul Al-Qur'an* Kota Salatiga maupun pondok pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Semarang. Jadwal *ngaji* dan kegiatan-kegiatan sehari-hari tetap, jarang berubah. Jadwal harian santri diatur menurut jam salat wajib lima waktu karenanya sangat rapi dan teratur.

Kegiatan-kegiatan dasar yang memenuhi hari-hari para santri di pondok pesantren *Nazzalal Furqon dan Rodhotul Al-Qur'an* Kota Salatiga maupun pondok pesantren An-Nur Klego pada umumnya bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. kegiatan pribadi, misalnya mandi, mencuci pakaian, membersihkan kamar, makan, membaca, dan istirahat; dan
- b. kegiatan *ngaji* (hafalan Al-Qur'an) dan sembahyang di masjid.

Salah satu aspek yang lain dari kehidupan sehari-hari para santri adalah ketidakperluannya untuk diawasi atau dikelola oleh para guru atau Kiai. Tentu saja kadang terjadi kasus spesifik di mana Kiai perlu ikut campur, tetapi pada umumnya kedisiplinan para santri di pondok pesantren *Nazzalal Furqon dan Rodbotul Al-Qur'an* Kota Salatiga maupun pondok pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Semarang sangat tinggi sehingga saya tidak pernah melihat seorang santri diperintah mengerjakan sesuatu yang seharusnya dia sudah kerjakan.

Pada sisi yang lain kehidupan sehari-hari bagi para santri di pondok pesantren *Nazzalal Furqon dan Rodbotul Al-Qur'an* Kota Salatiga maupun pondok pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Semarang adalah kurang banyak keragaman dalam kegiatan yang bisa dilakukan selama waktu istirahat tersebut dan kurang banyak kesempatan untuk bergaul dengan orang dari luar pondok. Maksud saya adalah kalau santri tidak lagi mandi, makan, atau sholat, maka biasanya mereka lagi *ngaji* atau belajar. Dan kalau tidak ada tamu yang datang ke pondok untuk bertemu dengan para santri (seperti saya!), selama mereka menetap di pondok, mereka tidak pernah akan bergaul dengan orang lain, para Ustad dan keluarga Kiai.

Budaya ini saya mencoba membandingkan dengan kehidupan sehari-hari para pemuda maupun pemudi di luar pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren, kegiatan hiburan bagi santri sangat terbatas untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Pada umumnya, mereka bisa membaca majalah dan buku yang dibawa dari rumah, mendengarkan musik dan radio, mengobrol dengan temannya atau paling jauh kadang-kadang menonton televisi di rumah Kiai pada akhir minggu. Keadaan ini berebeda sangat jauh apabila dibandingkan dengan pemuda-pemudi yang tinggal di luar pondok pesantren di mana mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih bebas karena ada televisi, mainan komputer, internet, bioskop, tempat wisata seperti taman rekreasi, mall dan kesempatan untuk jalan-jalan.

6. Santri dan Afiliasi Politik

Bentuk dan afiliasi kepartaian pada kaum santri dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1
Distribusi responden santri yang mengikuti kampanye Pemilu

NO	Menghadiri kampanye	F	%
1	Ya	95	5 %
2	Tidak	5	95 %
Jumlah total		100	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang santri yang menjadi responden dalam penelitian ini, terdapat sembilan puluh lima orang (95 %) yang menghadiri kampanye dan hanya lima orang (5 %) yang tidak mengikuti kegiatan kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan santri tingkat partisipasi dan kesadaran politiknya termasuk tinggi.

Tabel 2
Distribusi alasan santri menghadiri kampanye Pemilu

No	Alasan menghadiri kampanye Pemilu	F	%
1	Program partainya bagus	32	32
2	Tertarik pada penampilan elit partai	68	68
3	Karena hiburan artis	-	-
4	Karena dibayar	-	-
5	Disuruh Kiai	-	-
Jumlah total		100	100

Mencermati tabel di atas, ternyata santri yang mengikuti kegiatan kampanye Pemilu paling banyak karena tertarik pada penampilan elit partai yakni 68 orang (68%), sementara santri yang mengikuti kegiatan kampanye karena alasan program partainya bagus mencapai 32 orang (32%). Fenomena ini menarik karena mereka hadir dalam kegiatan kampanye bukan karena disuruh Kiai, hiburan artis bahkan bukan karena bayaran sekalipun.

Tabel 3

Jawaban responden santri yang menghadiri kampanye partai politik Islam

NO	Menghadiri kampanye partai politik Islam	F	%
1	PPP	30	24
2	PBB	2	4
3	PKS	1	5
4	PKB	67	67
5	PAN	-	-
Jumlah total		100	100

Memperhatikan tabel di atas, jumlah responden santri yang mengikuti kampanye Pemilu partai politik Islam yang terbesar adalah kampanye yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mencapai 67 orang (67%), urutan selanjutnya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 30 orang (30%), Partai Bulan Bintang (PBB) dua orang (2%) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu orang (1%). Salah satu makna yang dapat ditarik dari data ini adalah di kalangan santri terdapat ikatan primordial yang kuat dengan PKB.

Tabel 4

Distribusi jawaban responden santri berdasarkan pilihan partai politik Islam

No	Pilihan partai politik Islam dalam Pemilu	F	%
1	PPP	16	15
2	PBB	1	2
3	PKS	1	1
4	PKB	82	82
5	PAN	-	-
Jumlah total		100	100

Sebanding lurus dengan kehadirannya mengikuti kegiatan kampanye, berdasarkan tabel di atas pilihan partai politik Islam di kalangan santri yang terbesar adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejumlah 82 orang (82%), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat 16 orang (16%), sementara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing 1 orang (1%).

Tabel 5
Distribusi faktor-faktor yang mempengaruhi ikut Pemilu di kalangan santri

No	Faktor-faktor yang mempengaruhi ikut Pemilu	F	%
1	Kesadaran sendiri	14	14
2	Mengetahui Pemilu adalah hak warga Negara	86	86
3	Disuruh Kiai	-	-
4	Disuruh pengurus/aktivis partai	-	-
5	Disuruh aparat pemerintah	-	-
Jumlah total		100	100

Berdasarkan tabel di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi responden santri dalam Pemilu adalah karena mereka mengetahui bahwasanya Pemilu merupakan hak sebagai warga negara yang mencapai 86 orang (86%), sementara itu karena kesadaran sendiri terdapat 14 orang (14%). Kenyataan ini mengindikasikan bahwasanya kesadaran politik di kalangan para santri untuk berpartisipasi dalam bidang politik tinggi adanya. Pada sisi yang lain berdasarkan tabel di atas dapat dimaknai bahwasanya tidak terjadi mobilisasi di kalangan para santri dalam mengikuti kegiatan Pemilu.

Tabel 6
Distribusi responden santri tentang alasan memilih partai politik Islam

No	Alasan memilih partai politik Islam	F	%
1	Tertarik dengan penampilan elit partai	49	49
2	Program partai	12	12
3	Adanya kesamaan ideologis	13	13
4	Sesuai dengan aspirasi	10	10
5	Karena Kiai sebagai pengurus partai	16	16
Jumlah total		100	100

Mengacu pada tabel tersebut di atas, alasan para responden santri memilih partai politik Islam ternyata yang paling banyak adalah tertarik dengan penampilan elit partai 49 orang (49%), setelah itu karena faktor Kiai yang menjadi pengurus partai 16 orang (16%), karena adanya kesamaan ideologis 13 orang (13%), karena program partai 12 orang (12%) dan karena adanya kesesuaian aspirasi 10 orang (10%).

Menurut Ramlan Surbakti (1999 :14) dari sisi alasan memilih partai politik tertentu, terdapat sekurang-kurangnya tiga unsur dari setiap partai politik yang dapat mempengaruhi pilihan seorang pemilih yakni lambing partai, program dan alternative kebijakan (*platform* politik) yang diperjuangkan, dan kualifikasi calon wakil rakyat yang diajukan oleh suatu partai. Apabila terdapat pemilih yang memilih suatu partai semata-mata karena pertimbangan lambang partai, maka perilaku pemilih seperti ini dapat dikategorikan sebagai pemilih secara tradisional, dan perilaku memilih seperti ini didasarkan pada loyalitas kepada pimpinan.

Tabel 7

Distribusi derajat kesantrian

No	Derajat kesantrian	F	N
1	Tinggi	83	83
2	Sedang	12	12
3	Rendah	5	5
Jumlah total		100	100

Dari 100 orang responden, derajat kesantrian (ketaatan beragama) mereka delapan puluh tiga orang di antaranya (83%) termasuk dalam klasifikasi tinggi, sementara duabelas orang (12%) yang lain termasuk dalam kategori sedang, dan 5 orang lagi (5%) berada pada ketaatan rendah.

Derajat kesantrian dikatakan tinggi apabila responden santri menjalankan shalat lima waktu, puasa wajib, membaca Al-Qur'an selesai shalat fardlu, melaksanakan shalat-shalat sunah, dan menjalankan puasa-puasa sunah. Sementara itu, responden santri dikategorikan berderajat kesantrian sedang jika mereka hanya menjalankan shalat lima waktu, puasa wajib, dan membaca Al-Qur'an selesai shalat fardlu, akan tetapi kurang dalam menjalankan shalat-shalat sunah dan kurang menjalankan puasa-puasa sunah. Sedangkan derajat kesantrian disebut rendah apabila santri hanya menjalankan shalat lima waktu, puasa wajib, membaca Al-Qur'an selesai shalat fardlu, akan tetapi tidak melaksanakan shalat-shalat sunah, dan tidak menjalankan puasa-puasa sunah.

Menurut Abdul Munir Mul Khan (1988 : 94), terdapat hubungan yang erat antara agama dan politik di kalangan santri dan bahkan tidak dapat dipisahkan. Bagi kaum santri, mengkaji Islam secara sempurna berarti juga harus mendukung organisasi sosial dan politik yang memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini lebih menjelaskan bahwa faktor agama merupakan salah satu dasar identifikasi seseorang dengan partai politik tertentu, sehingga kaum santri akan mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam.

Tabel 8

Cara memperoleh informasi tentang partai politik Islam

No	Cara memperoleh informasi	F	N
1	Media cetak (Koran, majalah, tabloid)	3	3
2	Media elektronik (televisi, radio)	7	7
3	Pengurus /aktivis partai	20	20
4	Aparat pemerintah	5	5
5	Kiai/Pengasuh/Pengurus pondok pesantren	65	65
Jumlah total		100	100

Berbeda dengan lapisan masyarakat yang lain, berdasarkan tabel tersebut di atas peranan Kiai/Pengasuh/Pengurus pondok pesantren memiliki peran terbesar dalam memberikan informasi tentang Pemilu di kalangan para santri dan mencapai angka tertinggi yakni enam puluh lima orang (65%), kemudian pengurus/aktivis partai ada duapuluh orang (20%), media elektronik (televisi, radio) ada 7 orang (7%), dan terakhir Media cetak (Koran, majalah, tabloid) ada 3 orang (3%).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dimaknai juga bahwa demikian intensifnya komunikasi antara Kiai dengan para santrinya sampai kepada persoalan-persoalan politik sekalipun. Karenanya, Kiai juga berperan sebagai sumber informasi utama bagi para santri dalam memperoleh pengetahuan sekaligus sebagai agen sosialisasi yang strategis.

Kesimpulan

Bertolak dari analisis hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut.

1. Afiliasi kepartaian kaum Santri dalam era Pemilihan Umum multi partai 2009 menunjukkan adanya penyebaran pilihan. Sebanding lurus dengan kehadirannya dalam mengikuti kegiatan kampanye, pilihan partai politik Islam di kalangan santri yang terbesar adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejumlah 82 orang (82%), kemudian diikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat 16 orang (16%), sementara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing 1 orang (1%).
2. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi afiliasi kepartaian kaum Santri dalam era Pemilihan Umum multi partai 2009. Faktor-faktor yang dimaksudkan adalah karena ketertarikan dengan penampilan elit partai 49 orang (49%), setelah itu karena faktor Kiai yang menjadi pengurus partai 16 orang (16%), karena adanya kesamaan ideologis 13 orang (13%), karena program partai 12 orang (12%) dan karena adanya kesesuaian aspirasi 10 orang (10%).
3. Implikasi sosial-politik dan ekonomi dari afiliasi kepartaian kaum Santri dalam era Pemilihan Umum multi partai 2009 lebih bersifat positif dan konstruktif meskipun terdapat juga berbagai kekurangan dan kelemahan dalam tataran praksisnya. Bergulirnya era reformasi politik tahun 1998 telah membuka peluang yang luas terutama bagi kalangan santri untuk bukan saja mendirikan partai-partai politik baru, tetapi sekaligus juga memberikan banyak alternatif pilihan terhadap partai politik. Dalam kondisi semacam ini, posisi tawar kaum santri begitu diperhatikan oleh para elit politik yang ada. Implikasi sosial, politik dan ekonomi yang dapat dilihat secara langsung adalah meningkatnya standar kualitas sarana dan prasarana pondok pesantren.

Daftar Pustaka

- Arief, Syamsuddin, *Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan (1928-2005)*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008.
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Kalimasaha Press, 1993.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung, Mizan, 1994.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning : Pesantren dan Tarekat*, Bandung, Mizan, 1999.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta : LP3ES, 1986.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Politik*, Jakarta, Paramadina, 1999.
- Hidayat, Syahrul, *Memastikan Arab Baru Demokrasi*, Bandung, Mizan, 2000.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Limbau Sejarah*, Bandung, Pustaka, 1989.
- , *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES, 1986.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : INIS, 1994.
- Muchtar, Maksum, *Pesantren Masa Depan : Wacana dan Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1998.
- Muhbib dan Suwito, *Jaringan Intelektual Pesantren di Jawa-Madura Abad XX*, Jakarta, Depag RI, 2000.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pandangan Politik Santri Pada Masa Orde Baru*, PPS UGM, 1988.
- Rahardjo, M. Dawan, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta, LP3ES, 1988.
- Surbakti, Ramlan, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1999.
- Ubaedillah, A. Dan Rozak, Abdul, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.

PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA DI SMA MUHAMMADIYAH KUPANG, NTT

Aji Sofanudin

*Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama Semarang
ajirakhma@yahoo.com*

Abstract

The objectives of this research are to know: (1) curriculum's development and implementation; (2) it's implementation impact; (3) factor which influenced the implementation of religion education curriculum in SMA Muhammadiyah Kupang NTT. The method used in this research is qualitative approach using perceptive data. This research found: (1) education in SMA Muhammadiyah Kupang applied "pluralist" model in which the students received two kind of "pendidikan agama" (inter-religious studies), Islam and non Islam; (2) SMA Muhammadiyah Kupang accepted students without scrutinizing or looking at their religious background; (3) the development process of religion education curriculum in SMA Muhammadiyah Kupang was based on standards developed by Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah in 2007; (4) in the practical level, attitude and behavior of the students with different religions in SMA Muhammadiyah Kupang went in harmony.

Keywords: *Education, religion, curriculum*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengembangan kurikulum dan implementasi, (2) dampak implementasi, (3) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum pendidikan agama di SMA Muhammadiyah Kupang NTT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data perseptif. Penelitian ini menemukan: (1) pendidikan di SMA Muhammadiyah Kupang diterapkan model "pluralis" di mana siswa menerima dua jenis "Pendidikan Agama" (studi antar-agama), Islam dan non Islam, (2) SMA Muhammadiyah Kupang menerima siswa tanpa meneliti atau melihat latar belakang agama mereka, (3) proses pengembangan kurikulum pendidikan agama di SMA Muhammadiyah Kupang didasarkan pada standar yang dikembangkan oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

pada tahun 2007, (4) dalam sikap, tingkat praktis dan perilaku siswa dengan agama yang berbeda di SMA Muhammadiyah Kupang masuk kedalam harmoni.

Kata kunci: *Pendidikan, agama, kurikulum*

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 telah menggariskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib untuk semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia. Dalam pasal 12 ayat 1 point a disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan atau sekolah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pendidikan agama. Pelaksanaan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut peserta didik merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan.

Secara umum sekolah-sekolah swasta umum yang berada di bawah Yayasan Keagamaan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan agama. Kesadaran ini biasanya dilakukan dengan menambah materi keagamaan maupun kegiatan keagamaan di luar jam pelajaran inti. Masing-masing yayasan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Dalam lembaga Maarif milik Nahdlatul Ulama dikenal ke-NU-an, sedangkan dalam Muhammadiyah dikenal dengan sebutan Ismuba; al-Islam, Kemuhammadiyah, dan bahasa Arab. Terkait dengan pendidikan dalam Muhammadiyah misalnya, Direktur Maarif Institut Fajar Ul Haq mengungkapkan bahwa cetak biru pendidikan Muhammadiyah tidak hanya memunculkan toleransi dan keterbukaan, namun juga praksis Islam yang memihak keadilan dan kemanusiaan. ([www.maarif Institut.com](http://www.maarif.institut.com))

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah swasta yang berada di bawah Yayasan Keagamaan, maka perlu ada kajian yang lebih mendalam melalui penelitian. Pelaksanaan Pendidikan Agama yang

diselenggarakan pada sekolah umum ini menekankan pada aspek kurikulum yang dikembangkan, implementasi kurikulum pada tataran praktis, dampak pelaksanaan kurikulum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Dari hasil kajian ini juga sekaligus dapat dilihat input peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran, proses yang dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama, dan *output* yang diharapkan oleh sekolah atau Yayasan.

Berdasarkan hal di atas, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang memandang perlu untuk mengadakan penelitian terkait dengan Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Sekolah di bawah Yayasan (Muhammadiyah). Terutama, SMA Muhammadiyah yang berada di lingkungan mayoritas agama lain (Kristen). Dipilihlah *locus* di Nusa Tenggara Timur tepatnya di kota Kupang.

Permasalahan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah Kupang NTT?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah Kupang NTT?
3. Bagaimana pelaksanaan kurikulum pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah Kupang NTT?
4. Bagaimana dampak pelaksanaan pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah Kupang NTT?

Tinjauan Pustaka

Menurut Abdul Mu'ti (2008) secara umum terdapat tiga model sistem pendidikan agama di sekolah-sekolah agama, yaitu: Pertama model "eksklusif", di mana siswa yang berbeda-beda agama hanya menerima satu pendidikan agama *confessional* yang sesuai dengan agama sekolah yang diajarkan oleh guru agama. Kedua model "inklusif", di mana siswa yang berbeda-beda agama mempelajari ajaran beberapa agama. Dalam model ini pendidikan agama bersifat *non-confessional* yang menekankan aspek kognitif siswa memahami

dan membandingkan ajaran beberapa agama, menemukan nilai-nilai persamaan antaragama. Ketiga model “pluralis”, dimana siswa mendapatkan dua “pendidikan agama”. Model ini siswa menerima pendidikan agama *confessional* sebagaimana diatur di dalam undang-undang pendidikan. Selain itu, siswa wajib mengikuti “pendidikan keagamaan” *non confessional* sesuai dengan agama sekolah.

Disertasi Abdul Mu'ti (2009) di UIN Syarif Hidayatullah tentang “Pluralisme Keagamaan dalam Pendidikan Muhammadiyah: Studi Kasus di Ende, Serui, dan Putussibau” mengkaji tentang sekolah-sekolah Muhammadiyah [SMP, SMA, dan SMK] yang berada di mayoritas agama Kristen dan Katholik. Penelitian tersebut dilakukan di SMA Ende Flores yang mewakili mayoritas agama Katholik, Serui Papua yang mewakili mayoritas agama Kristen, dan Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang mewakili interaksi antara Muhammadiyah dengan budaya lokal.

Hasil penelitian Mu'ti memperkuat tesis Abul Munir Mulkhan mengenai empat varian paham keagamaan Muhammadiyah: Al-Ikhlash, Kiai Dahlan, Marchaenisme Muhammadiyah (Marmud) dan Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama (MuNU). Menurut Mulkhan (2004), ada empat varian di dalam Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah *al-Ikhlash*. Kelompok ini memiliki orientasi keagamaan yang menekankan aspek akidah dan purifikasi ajaran Islam dengan menentang keras takhayul, bid'ah, khurafat (TBK), tradisi lokal, dan cenderung konfrontatif terhadap pemeluk agama lain. Kedua Muhammadiyah *Kiai Dahlan*. Kelompok ini bersikap rasional dan memahami agama secara terbuka. Mereka mengamalkan ajaran Islam yang murni tetapi bersikap toleran terhadap kelompok lain serta dapat memahami praktik TBK. Ketiga kelompok MuNU (Muhammadiyah-NU). Kelompok ini bergabung dengan Muhammadiyah karena amal-amal sosialnya. Meskipun telah menjadi anggota Muhammadiyah mereka masih memegang teguh tradisi keagamaan sebagaimana warga Nahdlatul Ulama. Keempat kelompok *Marmud* (Marhaenisme-Muhammadiyah). Kelompok ini agak dekat dengan tradisi abangan. Sebagian mereka bahkan masih terbiasa menyelenggarakan tradisi keagamaan dan kebudayaan yang cenderung sinkretik. Orientasi politiknya sangat nasionalis. Mayoritas anggota Muhammadiyah adalah kelompok *MuNU* yang

terdiri atas para petani yang tekun dan menjadikan TBC (*Takhayul, Bid'ah, Churafat*) sebagai tradisi. Berdasarkan penelitian Abdul Munir Mulkhan, konfigurasi warga Muhammadiyah didominasi oleh kelompok pluralis yang toleran terhadap tradisi.

Di antara temuan Mu'ti dalam disertasinya adalah sebagai berikut. Pertama, di lembaga pendidikan Muhammadiyah, siswa non Muslim mendapatkan pendidikan agama *confessional* sebagaimana ketentuan UU Sisdiknas: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yg dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Selain itu, mereka mengikuti mata pelajaran ciri khusus: Ismuba. Kedua, memperkuat temuan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan puritanisme Islam memiliki sikap sosial yang inklusif, terbuka, dan toleran baik kepada budaya lokal maupun pemeluk agama lain. Ketiga, menunjukkan bahwa model pendidikan agama *confessional* dan *non confessional* mampu melahirkan sikap pluralisme positif: terbuka, toleran, apresiatif, dan akomodatif terhadap pemeluk agama lain. Penelitian ini menemukan terjadinya konvergensi Muslim-Kristen dan munculnya gejala varian baru: Kristen-Muhammadiyah (KrisMuha)

Penelitian yang dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang (2009) tentang "Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Sekolah Swasta di Bawah Yayasan Keagamaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY: Studi Komparasi Perilaku Keagamaan Peserta Didik sebagai Dampak dari Pelaksanaan Pendidikan Agama di SMA" di antaranya dilakukan oleh Aji Sofanudin di kota Surabaya.

Di antara hasilnya ditemukan bahwa terdapat perbedaan nama mata pelajaran agama untuk berbagai sekolah di bawah yayasan keagamaan.

1. SMA Kartika di bawah Yayasan Al-Azhar: PAI [2 jam pelajaran]
2. SMA Al-Falah di bawah Yayasan Al-Falah: Salat Akhlak [4 jam pelajaran]
3. SMA Khadijah di bawah Yayasan Khadijah: Tafsir al-Qur'an (2), hadits (3) tauhid (4) fiqh, ushul fiqh, dan faraid (5), tarikh Islam (6), nahwu shorof (7), tartil al-Qur'an (8), matrikulasi PAI (pendalaman ibadah) [8 jam pelajaran]

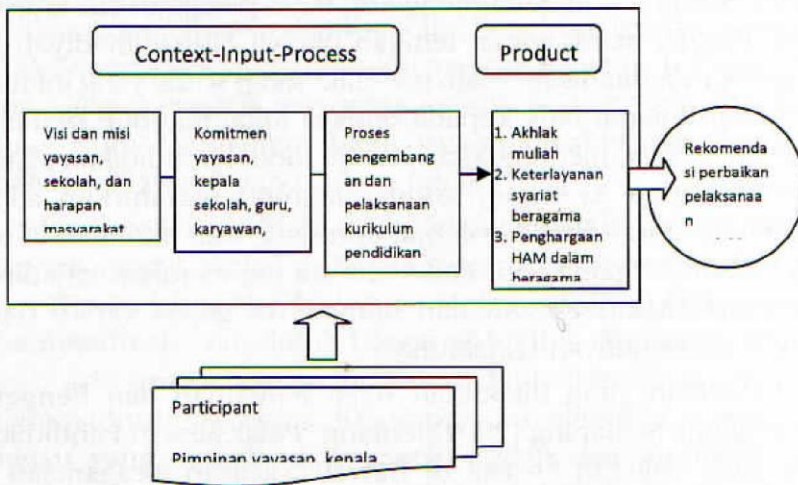
Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dihimpun berupa data kualitatif yang dilengkapi data kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, telaah dokumen, dan angket persepsi.

1. Desain

Desain penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar : 1
Desain Penelitian

Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah SMA Muhammadiyah Kupang yang beralamat di Jl KH Ahmad Dahlan No 17 Kupang Nusa Tenggara Timur. Lokasi SMA satu kompleks dengan Universitas Muhammadiyah Kupang.

Sumber Data

Sumber datanya adalah *Paper, Place, dan Person*. Terkait data orang (*person*) terdiri atas: satu (1) orang pengurus Dikdasmen PWM NTT, satu (1) orang kepala sekolah, lima (5) orang guru, dan 43 siswa.

Alat Pengumpul Data Persepsi

Alat pengumpul data penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skala penilaian yang meliputi (1) instrumen A berupa skala penilaian untuk pimpinan yayasan, kepala sekolah, dan guru; dan (2) instrumen B berupa skala penilaian untuk siswa.

1. Instrumen A mencakupi indikator: pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Kedua indikator tersebut dirinci informasinya dari input, konteks, proses, produk. Selain itu, ditambahkan juga pertanyaan terbuka tentang hambatan yang ditemui pada pelaksanaan pendidikan agama; dan saran terhadap pelaksanaan pendidikan agama. Uraian kedua indikator tersebut sebagai berikut.

Pengembangan kurikulum aspek konteks mencakupi indikator: (a) visi dan misi yayasan, (b) visi dan misi sekolah, dan (c) harapan masyarakat.

Pengembangan kurikulum aspek proses mencakupi indikator: (a) penyusunan Kurikulum (kompetensi dasar dan indikator), dan (b) perangkat pendukung kurikulum (silabus, RPP, buku ajar).

Pengembangan kurikulum aspek produk/output mencakupi indikator: (a) kurikulum, (b) silabus, (c) RPP, dan (d) buku ajar/panduan.

Pelaksanaan kurikulum aspek konteks mencakupi indikator: (a) komitmen pimpinan sekolah, (b) kondusivitas suasana sekolah, (c) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, dan (d) pengaturan penjadwalan.

Pelaksanaan kurikulum aspek proses mencakupi indikator: (a) proses belajar-mengajar (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi), dan (b) pelaksanaan peribadatan (keseharian, peringatan hari-hari penting).

Pelaksanaan kurikulum aspek produk/output mencakupi indikator: (a) kecerdasan emosi, (b) kecerdasan sosial, (c) kecerdasan spiritual, (d) akhal mulia, (e) keterlayanan syariat beragama, dan (f) penghargaan HAM dalam beragama.

2. Instrumen B mencakup indikator: pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Kedua indikator tersebut dirinci informasinya dari input, konteks, proses, produk. Selain itu, ditambahkan juga pertanyaan terbuka tentang hambatan yang ditemui pada pelaksanaan pendidikan agama; dan saran terhadap pelaksanaan pendidikan agama. Uraian kedua indikator tersebut sebagai berikut.

Pengembangan kurikulum aspek konteks mencakupi indikator: (a) visi dan misi yayasan, (b) visi dan misi sekolah, dan (c) harapan masyarakat.

Pengembangan kurikulum aspek proses mencakupi indikator: (a) penyusunan Kurikulum (kompetensi dasar dan indikator), dan (b) perangkat pendukung kurikulum (silabus, RPP, buku ajar).

Pengembangan kurikulum aspek produk/output mencakupi indikator: (a) kurikulum, (b) silabus, (c) RPP, dan (d) buku ajar/panduan.

Pelaksanaan kurikulum aspek konteks mencakupi indikator: (a) komitmen pimpinan sekolah, (b) kondusivitas suasana sekolah, (c) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, dan (d) pengaturan penjadwalan.

Pelaksanaan kurikulum aspek proses mencakupi indikator: (a) proses belajar-mengajar (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi), dan (b) pelaksanaan peribadatan (keseharian, peringatan hari-hari penting).

Pelaksanaan kurikulum aspek produk/output mencakupi indikator: (a) kecerdasan emosi, (b) kecerdasan sosial, (c) kecerdasan spiritual, (d) akhal mulia, (e) keterlayanan syariat beragama, dan (f) penghargaan HAM dalam beragama.

Pembahasan

Gambaran Umum

Propinsi Nusa Tenggara Timur (Flobamora) terdiri atas 71 kab/kota. Di antara 71 kab/kota tersebut terdapat kota Kupang yang terdiri atas 4 kecamatan dan 49 desa/kelurahan. Di Kota Ku-

pang terdapat 27 SMA terdiri atas 11 SMA Negeri dan 16 SMA Swasta. Di antara ke-16 SMA Swasta tersebut beberapa SMA yang unggul (akreditasi dan jumlah siswa) mewakili agama adalah SMA Muhammadiyah, SMA Geovani, dan SMA Kristen Marcusuar.

SMA Muhammadiyah beralamat di Jl KH Ahmad Dahlan No 17 A kelurahan Kayu Putih kecamatan Oebobo. Kelurahan Kayu Putih merupakan salah satu kantong Islam yang ada di kota Kupang.

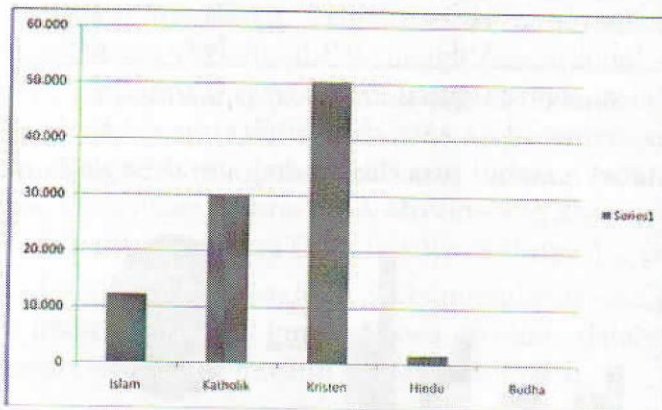
Komposisi masyarakat Oebobo, dilihat dari sisi agama adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Data Statistik Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk			Persentase (%)
		Laki2	Perempuan	Jml	
1	Islam	6.454	5.897	12.351	13,05 %
2	Katholik	15.343	14.673	30.016	31,71 %
3	Kristen	35.027	15.343	50.370	53,21 %
4	Hindu	864	933	1.797	1,90 %
5	Budha	74	60	134	0,14 %
6	Kong Hu Cu	0	0	0	0

Sumber: KUA Kec. Oebobo 2009

Dari tabel tersebut bisa dibuat diagram sebagai berikut.



Gambar : 2
Komposisi Masyarakat Oebobo dilihat dari Agama

Dilihat dari data di atas nampak bahwa jumlah penduduk muslim sekitar 1/5 dari penduduk Kristen.

Lokasi awal SMA Muhammadiyah berada di Kampung Solor, dan pada masa Kepala Sekolah yang ke-3, Drs. Ahmad ZM, dipindahkan ke Kompleks "Walikota" Universitas Muhammadiyah Kupang. Berikut ini adalah daftar nama orang yang pernah menjabat sebagai Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Kupang.

Tabel 2
Kepala Sekolah dari Masa ke Masa

No	Kepala Sekolah	Periode
1	Drs. D. Nurdin	1980-1998
2	Ma'ruf Peni	1998-1999
3	Drs. Ahmad ZM	1999-2002
4	Syahrir Yusuf, SPd	2002-skrng

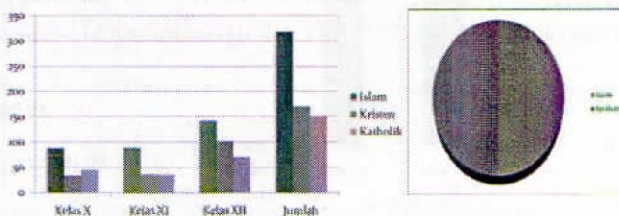
Sementara itu, gambaran umum kondisi siswa berdasarkan agama pada SMA Muhammadiyah Kupang adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Data siswa Menurut Agama

No	Kelas	Islam	Protestan	Katholik	Jumlah
1	X	88	33	45	166
2	XI	89	35	34	158
3	XII	141	101	70	312
	Jml	318	169	149	636

Sumber: LI-SM, keadaan 30 Januari 2010

Dari tabel tersebut bisa dibuat diagram sebagai berikut.



Gambar : 3
Komposisi Siswa

Dari diagram tersebut nampak bahwa komposisi siswa muslim-non muslim adalahimbang. Bahkan komposisi mahasiswa UMK lebih banyak yang non Muslim. Hampir 75 % mahasiswa UMK beragama Kristen dan Katholik. Presiden BEM pun beragama Kristen. [wawancara Husein, Dosen Fak. Hukum UMK, 26 Juli 2010].

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama

1. Konteks

Konteks pendidikan Muhammadiyah, menerapkan model “pluralis” di mana siswa mendapatkan dua “pendidikan agama”. Yang pertama siswa menerima pendidikan agama *confessional* sebagaimana diatur di dalam undang-undang pendidikan; mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama anak didik (Kristen/Katholik). Selain itu, siswa wajib mengikuti “pendidikan keagamaan” *non confessional* sesuai dengan agama sekolah, dalam bentuk kemuhammadiyah dan bahasa Arab.

Berdasarkan hasil angket, diperoleh simpulan bahwa ada persamaan persepsi antara pengelola dengan siswa terkait konteks pengembangan kurikulum. Menurut pengelola adalah istimewa (skor: 23,33) dan menurut siswa juga istimewa (134,75)

2. Input

SMA Muhammadiyah menerima peserta didik tanpa melihat latar belakang agamanya. Bahkan lebih menonjolkan sebagai “lembaga dakwah” daripada “lembaga pendidikan” dalam hal kebijakan penerimaan siswa baru: hampir semua pendaftar akan diterima. Input peserta didik pada SMA Muhammadiyah Kupang berasal dari berbagai latar belakang agama: Islam, Kristen, Katholik. Persentase peserta didik Muslim-Non Muslim dari tahun ke tahun berkisarimbang (fifty-fifty), selisihnya 1-2 psersen.

Berdasarkan dokumen SMA Muhammadiyah, diperoleh data bahwa pada tahun 2010 jumlah siswa muslim adalah 318 siswa sedangkan siswa non muslim adalah 316 siswa.

3. Proses

Proses pengembangan kurikulum pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah Kupang berpedoman pada *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Bahasa Arab*

SD, SMP, dan SMA/SMK Muhammadiyah serta Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah yang dikembangkan oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tahun 2007. Proses pengembangan kurikulum belum berjalan sinergis antara pihak sekolah dengan para *stakeholder* utamanya dengan pihak yayasan.

Proses pengembangan kurikulum agama Kristen/Katholik diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Belum banyak difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.

Berdasarkan hasil angket, persepsi pengelola terhadap proses pengembangan kurikulum adalah istimewa (dalam penyusunan =24,67) dan istimewa (perangkat pendukung =26,33)

4. Produk

Dalam dataran praksis sikap dan perilaku siswa yang berbeda agama pada SMA Muhammadiyah berjalan baik. Artinya, tidak ada kasus perkelahian karena persoalan perbedaan agama. Dalam hal dokumen, belum tersusun dokumen kurikulum yang berwujud *print out*

Berdasarkan hasil angket, persepsi siswa terhadap produk kurikulum pendidikan agama termasuk dalam kategori istimewa (138).

Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Agama

1. Konteks

Dari aspek konteks pelaksanaan kurikulum pendidikan agama telah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari jadwal yang telah disusun oleh pihak sekolah yang memberikan jadwal pendidikan agama setiap hari jum'at dan sabtu. Hanya saja, karena kekurangan kelas, pembelajaran agama Kristen dilaksanakan di ruang guru.

Berdasarkan hasil angket, diperoleh simpulan bahwa ada perbedaan persepsi antara pengelola dengan siswa terkait konteks pelaksanaan kurikulum. Menurut pengelola adalah istimewa (skor: 24,57) sedangkan menurut siswa adalah unggul (126,86)

2. Input

Peserta didik dan guru pendidikan agama berasal dari berbagai latar belakang agama: Islam, Kristen, dan Katholik. Semua guru agama (Guru Agama Islam, Guru Agama Kristen, dan Guru Agama Katholik) berstatus sebagai guru honorer. Sarana pendukung pendidikan agama terbatas; ruang belajar, meja kursi, buku pelajaran, tempat ibadah, dsb

Berdasarkan hasil pengamatan, SMA Muhammadiyah banyak menerima masukan (penerimaan siswa baru) dari sekolah negeri

3. Proses

Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diasuh oleh guru yang seagama. Proses belajar mengajar pendidikan agama dilakukan di dalam kelas. Penyusunan jadwal pendidikan agama kelas X, XI, dan XII dibuat sedemikian rupa sehingga dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, yakni pada hari jum'at dan sabtu. Karena keterbatasan ruangan pembelajaran agama terkadang dilakukan di ruang guru. Demikian juga, karena keterbatasan guru agama Islam, pembelajaran agama Islam dilakukan di dua ruangan dengan satu guru. Pembelajaran agama di dalam kelas berlangsung riuh karena kebanyakan peserta didik.

Berdasarkan hasil angket, diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan persepsi antara pengelola dengan siswa terkait proses pelaksanaan kurikulum. Menurut pengelola adalah istimewa (skor: 22,38) sedangkan menurut siswa adalah unggul (115,63)

4. Produk

Pendidikan agama dapat berjalan sesuai jadwal meskipun secara kualitas berjalan seadanya. Dari segi kognitif, penguasaan siswa terhadap pengetahuan agama masih perlu mendapat perhatian meskipun demikian dari segi sikap dan perilaku peserta didik SMA Muhammadiyah membanggakan. Secara umum, kesan yang nampak dari peserta didik SMA Muhammadiyah adalah ramah dan toleran terhadap perbedaan agama.

Berdasarkan hasil angket, diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan persepsi antara pengelola dengan siswa terkait produk pelaksanaan kurikulum. Menurut pengelola adalah istimewa (skor: 22,88) sedangkan menurut siswa adalah unggul (127,25).

Dampak Pelaksanaan Pendidikan Agama

Dampak pelaksanaan kurikulum pendidikan agama yang dikembangkan di SMA Muhammadiyah Kupang adalah sikap saling menghargai (toleransi) yang tinggi antar siswa.

Berdasarkan hasil angket persepsi pengelola sekolah terhadap dampak pelaksanaan pendidikan agama diperoleh rata-rata skor adalah 24, termasuk kategori istimewa. Sedangkan berdasarkan angket persepsi siswa terhadap dampak pelaksanaan pendidikan agama diperoleh rerata skor adalah 129,62, termasuk kategori Unggul.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Faktor pendukung pendidikan agama di SMA Muhammadiyah Kupang di antaranya adalah (1) Pemberian wewenang yang luas dari kepala sekolah kepada guru untuk mengelola pendidikan agama, (2) motivasi yang tinggi dari para guru dalam mengajar, (3) jumlah siswa yang banyak dengan 15 rombongan belajar, (4) kepedulian komite sekolah dan masyarakat sekitar yang tinggi

Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan agama di SMA Muhammadiyah Kupang adalah (1) minimnya waktu pembelajaran agama, (2) guru yang pindah, (3) ada guru yang malas/terlambat datang, (4) guru kurang kreatif/kompeten, (5) sarana dan prasarana tidak memadai untuk peribadatan, (6) kurangnya rasio guru-murid, (7) ketersediaan buku/bahan ajar pendidikan agama, (8) keterbatasan ruang belajar pendidikan agama, (9) ketersediaan kitab suci, dan (10) penciptaan suasana religiusitas yang kurang

Kesimpulan

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum pendidikan agama di SMA Muhammadiyah dalam konteks CIPP adalah sebagai berikut.

a. Konteks

Memperkuat temuan Mu'ti bahwa Konteks pendidikan Muhammadiyah menerapkan model "pluralis" dimana siswa mendapatkan dua "pendidikan agama". Yang pertama siswa menerima pendidikan agama *confessional* sebagaimana diatur di dalam undang-undang pendidikan; mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama anak didik (Kristen/Katholik). Selain itu, siswa wajib mengikuti "pendidikan keagamaan" *non confessional* sesuai dengan agama sekolah, dalam bentuk kemuhammadiyah dan bahasa Arab.

b. Input

SMA Muhammadiyah menerima peserta didik tanpa melihat latar belakang agamanya. Bahkan, cenderung lebih menonjolkan sebagai "lembaga dakwah" daripada "lembaga pendidikan" dalam hal kebijakan penerimaan siswa baru: hampir semua pendaftar akan diterima. Input peserta didik pada SMA Muhammadiyah Kupang berasal dari berbagai latar belakang agama: Islam, Katholik, dan Kristen. Persentase peserta didik Muslim dan Non Muslim dari tahun ke tahun pada SMA Muhammadiyah Kupang sekitar *fifty-fifty* atauimbang, selisihnya sekitar 1-2 persen (1% - 2%).

c. Proses

Proses pengembangan kurikulum pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah Kupang berpedoman pada *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Bahasa Arab SD, SMP, dan SMA/SMK Muhammadiyah* serta *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah* yang dikembangkan oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tahun 2007, Yahya Muhaimin dkk. Proses pengembangan kurikulum belum berjalan sinergis antara pihak sekolah dengan para *stakeholder* utamanya dengan pihak yayasan.

d. Produk

Dalam dataran praktis sikap dan perilaku siswa yang berbeda agama pada SMA Muhammadiyah berjalan baik. Dalam arti, tidak ada kasus perkelahian (dan sejenisnya) karena

persoalan perbedaan agama. Siswa-siswi sangat toleran, hidup rukun, dan damai. Secara administratif, dokumen-dokumen kurikulum belum berwujud dalam bentuk *print out*.

2. Pelaksanaan kurikulum

Pelaksanaan kurikulum pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah dalam konteks CIPP adalah sebagai berikut.

a. Konteks

Pelaksanaan kurikulum pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah sejalan dengan UU No 20 Tahun 2003 dan Kebijakan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah yakni sekolah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.

b. Input

Peserta didik dan guru pendidikan agama berasal dari berbagai latar belakang agama. Sarana pendukung pendidikan agama pada SMA Muhammadiyah tersedia secara minim; ruang belajar, meja kursi, buku pelajaran, tempat ibadah, dan sebagainya. SMA Muhammadiyah ini memiliki nilai akreditasi B.

c. Proses

Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dalam pembelajaran agama yang dilakukan di dalam kelas. Penyusunan jadwal pendidikan agama kelas X, XI, dan XII dibuat sedemikian rupa sehingga dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, yakni pada hari jum'at dan sabtu. Karena keterbatasan ruangan pembelajaran agama terkadang dilakukan di ruang guru. Demikian juga, karena keterbatasan guru agama Islam, pembelajaran agama Islam dilakukan di dua ruangan dengan satu guru.

d. Produk

Pendidikan agama dapat berjalan sesuai jadwal meskipun secara kualitas berjalan seadanya. Artinya, target-target kurikulum pendidikan agama belum berjalan secara maksimal. Dari segi kognitif, penguasaan siswa terhadap pengetahuan

agama barangkali masih perlu mendapat perhatian meskipun demikian dari segi sikap dan perilaku peserta didik SMA Muhammadiyah membanggakan. Secara umum, kesan yang nampak dari peserta didik SMA Muhammadiyah adalah ramah.

3. Dampak Pelaksanaan Pendidikan Agama

Dampak pelaksanaan kurikulum pendidikan agama yang dikembangkan di SMA Muhammadiyah Kupang adalah sikap saling menghargai (toleransi) yang tinggi antar siswa.

Berdasarkan angket persepsi diperoleh kesimpulan bahwa dampak pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama yang dikembangkan oleh SMA Muhammadiyah Kupang adalah: (a) peningkatan atmosfir kehidupan beragama di kalangan siswa, (b) peningkatan atmosfir kehidupan beragama di kalangan guru (c) perbaikan kurikulum pendidikan agama (d) peningkatan kualitas proses pembelajaran pendidikan agama, (e) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama pada siswa, (f) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama pada guru, (g) peningkatan kecintaan dan kebanggaan siswa pada sekolah, (h) peningkatan animo pendaftaran siswa baru, (i) peningkatan penerimaan lulusan oleh pengguna lulusan, (j) peningkatan kecerdasan emosi siswa, (k) peningkatan kecerdasan sosial siswa, (l) peningkatan kecerdasan spiritual siswa, dan (m) peningkatan akhlak mulia siswa. Secara keseluruhan pengelola sekolah dan siswa memberikan dengan persepsi berkategori istimewa.

4. Faktor yang Mempengaruhi

Faktor pendukung pendidikan agama di SMA Muhammadiyah Kupang di antaranya adalah (1) Pemberian wewenang yang luas dari kepala sekolah kepada guru untuk mengelola pendidikan agama, (2) motivasi yang tinggi dari para guru dalam mengajar, (3) jumlah siswa yang banyak dengan 15 rombongan belajar, (4) kepedulian komite sekolah dan masyarakat sekitar yang tinggi

Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan agama di SMA Muhammadiyah Kupang adalah (1) ketersediaan buku/bahan ajar pendidikan agama, baik untuk guru maupun siswa yang sesuai

dengan tuntutan kurikulum, (2) ketersediaan alat/bahan penunjang kegiatan praktek, (3) keterbatasan sarana penunjang praktek agama belum mencukupi, (4) keterbatasan ruang belajar pendidikan agama, (5) belum ada guru tetap pendidikan agama, (6) ketersediaan kitab suci, (7) suasana religiusitas yang kurang

Daftar Pustaka

- Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Depdiknas. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- , 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi*
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan*
- Emzir, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Idi, Abdullah. 1999. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Jabrohim (Ed.). 2010. *Membumikan Gerakan Ilmu dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Listia, dkk. 2007. *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah (Hasil Penelitian tentang Pendidikan Agama di Kota Yogyakarta 2004-2006)*. Yogyakarta: Interfidei
- Lubis, Halfian. 2008. *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia; Studi tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep R Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mu'ti, Abdul. 2008. *Pluralisme Keagamaan dalam Pendidikan Muhammadiyah: Studi Kasus di Ende, Serui, dan Putussibau*, Disertasi pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- , dan Fajar Riza Ul Haq. 2009. *Kristen Muhammadiyah; Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*. Jakarta: Al-Wasat Publishing House
- Mudzhar, M. Atho. 2007. *Makalah pada Workshop Pengembangan Agama Melalui KTSP bagi Guru PAI SMP*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang
- Muhaimin, Yahya, dkk. 2007. *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Bahasa Arab SD, SMP, dan SMA/SMK Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah
- , 2007. *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah*. Jakarta: Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah
- Mulkhan, Abdul Munir. 2000. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Sallis, E. and Jones, G. 2002. *Knowledge Management in Education*. London: Kogan Page Limited.
- Sofanudin, Aji. 2009. *Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Sekolah Swasta di Bawah Yayasan Keagamaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang
- Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 107/KEP/I.4/F/2006 tentang "Tanfidz Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Pendidikan dasar dan Menengah Muhammadiyah se-Indonesia"

KEBERPIHAKAN PESANTREN AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO TERHADAP PARTAI POLITIK

Khoiruddin Mochtar
Dosen STAINU Tasikmalaya
khoiruddin09@yahoo.com

Abstract

Pesantren An-Nawawi has been supporting its political concern on Golkar since 1982. When the Orde baru tend to be vanishing many of Islamic organization declare the new political party, by which the affiliation of Islamic boarding school in advance. But on the other hand the Pesantren An-Nawawi (Islamic boarding school) is still support the Golkar. This phenomena, will be very interesting while the Golkar itself was left by its supporter due to people opinion that this organization is part of the Orde baru which is targeted to end. This phenomena then be analysed through behavior, ideology, and rating theory.

The question may arise on this research in term of reason why it continue to affiliate to Golkar, the models of affiliation it pretend, and the motive around the affiliation due to its existence. Observation and depth interview was applied to find out these phenomena. The finding shows that the affiliation provide significant consequences in term of moral assistance in which the improvement of facilities and networking to the other organization and department management.

Keywords: *Affiliation, political party, organization networking*

Abstrak

Pesantren An-Nawawi telah mendukung perhatian politik terhadap Golkar sejak tahun 1982. Ketika Orba cenderung menghilang banyak organisasi Islam mendeklarasikan partai politik baru, di mana afiliasi dari pesantren di muka. Tapi di sisi lain Pesantren An-Nawawi (pesantren) masih mendukung Golkar. Fenomena ini akan sangat menarik, sementara Golkar itu sendiri ditinggalkan oleh pendukungnya karena pendapat orang bahwa organisasi ini merupakan bagian dari Orba yang ditargetkan sampai akhir. Fenomena ini kemudian akan dianalisis melalui perilaku, ideologi, dan teori peringkat.

Pertanyaannya dari penelitian ini dalam hal alasan mengapa terus berafiliasi ke Golkar, model afiliasi itu berpura-pura, dan motif di sekitar afiliasi karena keberadaannya. Observasi dan wawancara mendalam diterapkan untuk mengetahui fenomena ini. Temuan menunjukkan bahwa afiliasi menyediakan konsekuensi signifikan dalam hal bantuan moral di mana peningkatan fasilitas dan jaringan dengan organisasi lain dan manajemen departemen.

Kata kunci: *Afiliation, partai politik, jaringan organisasi*

Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai sebuah kekuatan sosial tidak pernah habis-habisnya untuk dibicarakan, pembahasan ini semakin lama semakin menggugah peneliti untuk terus melakukan pengamatan, pesantren merupakan institusi yang unik dan menarik, sehingga ada saja aspek-aspek yang menjadi objek penelitian. Pesantren sejak masa penjajahan merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh, berkembang dan mendapatkan pengakuan tersendiri dari masyarakat. Pesantren juga ikut terlibat dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moralitas, namun juga ikut serta memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lain yang sejenis. Peserta didik di pesantren disebut santri yang umumnya menetap di pesantren (Gertz; 1983: 242). Zamahsyari Dhofir melihat tradisi pesantren sebagai bentuk system sosial yang tumbuh di lingkungan pesantren melalui sistem kekerabatan yang dibangun kiai, jaringan aliansi perkawinan, genealogi intelektual dan aspek hubungan antara guru dan murid atau kiai dengan santri (Dhofir dalam Ummatin; 2001: 259-260)

Pesantren dalam perkembangan selanjutnya tidak hanya bermain dalam domain pendidikan. Berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan, maka pesantren sebagai bagian dari unsur negara berhadapan juga dengan situasi politik yang mendorong untuk me-

ngambil sikap dalam berpolitik, sehingga masing-masing pesantren mengambil alternatif untuk berpartisipasi dalam politik dengan pasif dan ada pula pesantren yang mengambil peran aktif dengan berafiliasi terhadap partai politik tertentu. Hal ini dimaklumi karena setiap kelompok orang berhadapan dengan perubahan dan nilai-nilai baru yang mengharuskan menyesuaikan diri secara terus menerus (Abdullah; 2009: 43) ijarah dari Makkah ke Madinah. Pemilihan Madinah sebagai kota hijrahnya, menunjukkan tentang rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan entitas sosial politik sebuah negara. Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi adalah model hubungan antara agama dan negara dalam Islam (Rahman, 1995: 589). Hampir semua perdebatan tentang relasi agama dan negara merujuk kepada model negara Madinah yang dikembangkan oleh nabi Muhammad Saw. Formulasi relasi agama dan negara ini telah menimbulkan multi interpretatif ketika dikembangkan untuk mencari fomulasinya dalam kontek kehidupan zaman modern ini. Inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan yang tidak pernah usai dan mencapai titik temu hingga sekarang ini. Masing-masing pihak memiliki kerangka interpretasi yang berbeda dalam memahami model negara Madinah untuk kehidupan kontemporer (Patoni; 2007: 5).

Berhubungan dengan hal di atas pesantren yang merupakan basis NU, dipengaruhi dan memegang landasan dengan konsep politik sunni. Paradigma dengan pendekatan fiqih dalam masalah-masalah kenegaraan ini, menjadikan NU dan pesantren cenderung berwatak akomodatif dan fleksibel. Persentuhan Kiai, pesantren dan politik, didasarkan atas keyakinan bahwa, dalam ajaran Islam, antara agama dan kekuasaan disatukan secara tuntas (Smith dalam Patoni, 2007). Nabi Muhammad sendiri disamping sebagai pemuka agama juga pemimpin politik. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, disamping mereka sebagai ulama yang memahami agama, mereka juga sebahai Khalifah atau pemimpin umat. Fenomena pesantren yang terlibat dalam partai politik akhir-akhir ini merupakan gejala yang dianggap lumrah dan dimaklumi oleh masyarakat.

Pesantren sampai saat ini dipercaya sebagai sebuah lembaga yang mempunyai kekuatan untuk memobilisasi masa dengan

kekuatan pengaruh kharisma kiainya. Kekuatan pengaruh inilah yang kemudian menjadi daya pikat tersendiri bagi setiap partai politik, baik partai politik yang berlandaskan dan berbasis Islam maupun partai politik yang tidak berbasis Islam untuk mendapatkan simpati ataupun dukungan dari pesantren. Kerap kali pesantren menjadi ajang perebutan partai politik untuk menancapkan kakikaknya, sehingga mendapatkan suara signifikan dalam setiap pemilihan umum. Fenomena ini memberikan bukti, ternyata partai politik yang berhasil menggandeng pesantren tertentu, mampu mendapatkan suara yang berarti. Hal ini juga memberikan ruang pilihan kepada kiai dan pesantrennya untuk memilih berafiliasi atau tidak terhadap partai politik. Dengan berbagai alasan, konsep, prinsip masing-masing, maka terlihatlah beberapa pesantren yang menentukan sikap untuk berafiliasi dengan partai tertentu.

Dorongan afiliasi ini erat hubungannya dengan kebutuhan akan ketergantungan pada orang atau kelompok lain (Ensiklopedia Indonesia; 1991: 961). Woskinsky menyebutkan bahwa, faktor yang mempengaruhi afiliasi politik seseorang atau warga Negara dalam menentukan sikap politiknya biasanya karena faktor subjektif, faktor agama, etnis, rasial, faktor wilayah dan kelas (Toekan: 2000). Afiliasi politik pesantren disamping sebagai suatu pilihan pemahaman atas suatu ideologi yang didasarkan atas alasan suatu agama, juga terdapat dorongan-dorongan rasional untuk mendapatkan beberapa hal yang menjadi kebutuhan pesantren baik kebutuhan fisik pesantren ataupun kebutuhan jaringan.

Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo adalah sebuah pesantren yang menyatakan dirinya berafiliasi dengan partai politik Golongan Karya (Golkar), meskipun tidak melibatkan diri dalam kepengurusan Golkar, namun secara moral, pesantren ini memiliki hubungan dekat dan memberikan dukungan politik secara transparan untuk mendukung perolehan suara Golkar dalam setiap pemilihan umum. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji, karena ketika pesantren-pesantren yang berafiliasi kepada Golkar mulai meninggalkan partai ini, ternyata Pesantren An Nawawi ini tetap setia untuk berafiliasi dan mendukung kemenangan Golkar. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Permasalahan

Dengan mengamati fenomena tersebut maka, rumusan masalahnya adalah: (1). Mengapa lembaga pesantren melakukan afiliasi politik terhadap partai Golkar? dan (2). Bagaimana implikasinya terhadap eksistensi pesantren yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk analisa afiliasi dan melihat implikasinya terhadap eksistensi sebuah pesantren.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tradisi pesantren dan politik telah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya adalah Clifford Geertz, yang telah melakukan studi sosiologi dan antropologi tentang masyarakat dan kebudayaan jawa. Hasil penelitian ini dibukukan dengan berjudul "Religion of Java", dari penelitiannya ditemukan bahwa, masyarakat jawa berada dalam tiga setting kekuatan yaitu; Abangan, santri, priyayi, dan masing-masing kekuatan itu terdapat ketegangan-ketegangan (Geertz; 1989: 477)

Sementara itu, penelitian Ziemek Manfred 1986, Abdul Gaffar Karim 1995, dan Achmad Patoni 2007, memandang kiai pesantren sebagai pusat perhatian masyarakat, peran kiai pesantren diakui memiliki magnet pengaruh dan dukungan yang besar dalam komunitasnya baik dalam bidang social maupun politik. Besarnya perhatian terhadap kiai pesantren ini, tidak hanya dalam bentuk dukungan moral tetapi juga dalam bentuk partisipasi politik praktis.

Sedangkan Fathoni dan Zen (1992), Ida (1996), dan Ikhsan (1996) melihat hubungan NU dan Kiai pesantren sebagai ulama, merupakan hubungan sebangun yang memiliki arti formal legitimate, dimana perjalanan politik NU beriringan dengan peran politik kiai pesantren. Khitah 26 dan sikap politik NU merupakan cermin perhatian masyarakat terhadap oraganisasi Keagamaan yang didukung oleh kekuatan para ulama.

Dhofier (1980) dalam Disertasinya yang telah dibukukan berjudul: Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai, bermaksud menggambarkan dan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pesantren dan Islam tradisional di jawa, yang dalam periode modern sekarang ini dengan tetap

menunjukkan vitalitasnya sebagai kekuatan sosial, Kultural, keagamaan yang turut membentuk bangunan kebudayaan Indonesia modern. Noer (1987) dan Mulkhan (1988) kajiannya lebih menitik beratkan kepada politik santri, dimana santri mempunyai kontribusi dan peran signifikan dalam peta politik Indonesia, santri disini merujuk kepada kalangan Islam taat dan peduli dengan ajaran agama Islam.

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan tentang afiliasi politik yang dibangun kiai pesantren dan implikasinya terhadap eksistensi pesantren. Kemudian dari tema tersebut akan diamati bagaimana bentuk afiliasi yang dilakukan oleh pesantren, proses afiliasi pesantren dan proses serta motivasi yang mendasari afiliasi tersebut, kemudian bagaimana implikasinya terhadap eksistensi pesantren.

Untuk menganalisa tentang afiliasi yang dilakukan oleh kiai pesantren ini, maka akan dilihat dengan teori perilaku. Nicholas Comfort memahami afiliasi sebagai suatu proses organisasi yang mengaitkan dirinya dengan suatu partai politik. Ada beberapa faktor yang diduga telah menjadi penyebab mengapa sebagaimana masyarakat memilih partai politik tertentu dan mengabaikan parpol yang lainnya, atau mereka berpindah dari partai pilihan sebelumnya ke partai politik baru yang dianggapnya lebih sesuai dengan aspirasi politiknya.

Dalam studi ilmu politik, afiliasi kepartaian lebih mendekati persoalan perilaku memilih (*voting behavior*). Sikap politik massa pemilih dalam menentukan pilihan politiknya biasanya diakibatkan beberapa faktor sebagaimana diyakini oleh (Henderson:1993) perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu; faktor sosiologis dan politis. Termasuk didalamnya faktor sosiologi yaitu; umur, tingkat pendidikan, kedekatan dengan partai politik dan pengaruh dari orang tua. Sedang faktor kedua adalah kondisi kenegaraan, kedaerahan, dan kondisi ekonomi. Sementara menurut Afan Gaffar, penjelasan teoritis tentang voting behavior pada umumnya didasarkan pada dua model atau pendekatan yaitu: model pendekatan sosiologis dan model pendekatan psikologi. Model pertama lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologis yang membentuk perilaku memilih seseorang. Sementara model kedua

lebih mendasarkan faktor-faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku hegemonic party system (Toekan:2000)

Proses dan motivasi afiliasi politik dan implikasinya terhadap eksistensi pesantren akan dianalisa dari sudut pandang teori idiologi. Menurut Althusser Idiologi adalah Kepercayaan yang tertanam tanpa disadari. Kepercayaan yang dipoles sedemikian rupa sehingga tidak seperti kepercayaan. Citra ideal yang dikemas seperti fakta dan dipahami sebagai realitas konkrit. Harapan yang kemudian menjelma menjadi petanda konkrit di masa depan. Ideologi bagi Althusser bukanlah 'kesadaran palsu' seperti yang ditegaskan oleh Mark, melainkan sesuatu yang *profoundly unconscious*, sebagai hal-hal yang secara mendalam tidak disadari. Ideology adalah segala yang sudah tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya; *history turn into nature*, produk sejarah yang seolah-olah menjelma menjadi sesuatu yang alamiah. Sejak buaian hingga kuburan, manusia hidup dengan ideology. Dari ujung kaki hingga ujung rambut, ideology menjadi bagian dari mekanisme pengaturan diri, pengelolaan tubuh dan jiwa. Bagi Althusser, ideology membawa kita bergerak dalam relasi yang tak nyata namun seolah nyata, menerima yang semu seperti nyata, yang fana sebagai abadi. Tetapi, karena sifatnya yang tak disadari, manusia berespon seolah semua itu nyata, menanggapi ilusi sebagai realitas sesungguhnya. Begitu kuat pengaruhnya sehingga ilusi-ilusi tak dapat diabaikan, tak dapat ditolak oleh manusia (<http://kampusciamis.com/content/view/34/42/>)

Idiologi adalah ide-ide yang merupakan senjata bagi berbagai kepentingan sosial yaitu alam pikiran yang teralienasi dari kebenaran sosial yang sebenarnya dari si pemikir. tidak ada pemikiran manusia yang kebal terhadap pengaruh-pengaruh ideologisasi dari konteks sosialnya. Begitu idiologi sudah dianut oleh golongan yang bersangkutan, lalu dimodifikasi sesuai dengan kepentingan yang harus dilegitimasi, seringkali suatu idiologi dianut oleh suatu golongan, karena adanya unsur-unsur teoritis tertentu yang menguntungkan kepentingan mereka. Tiap golongan yang terlibat dalam konflik sosial memerlukan solidaritas, ideologilah yang mempunyai kekuatan untuk menimbulkan solidaritas. (Berger dan Luckmann; 1990:178).

Proses dan faktor-faktor afiliasi politik yang dilakukan pesantren terkait dengan masalah idiologi yang mempengaruhi

pemahaman kiai pesantren. Disamping kalkulasi ekonomi politik, maka ada yang juga sesuatu yang menjadi dasar atau prinsip dalam membuat keputusan untuk berafiliasi. Bagi kiai dan pesantren keuntungan ekonomi bukanlah segala-galanya, akan tetapi ada lagi yang lebih penting yaitu idiologi yang menjadi dasar pijakan untuk berafiliasi. Eksistensi pesantren merupakan implikasi yang akan dilihat dan dianalisa dengan tetap menggunakan teori ekonomi politik, karena eksistensi lembaga pada dasarnya merupakan efek yang diperkirakan muncul sebagai akibat dari dilakukannya afiliasi politik.

Analisis untuk melihat proses dan motivasi afiliasi politik, serta implikasi terhadap eksistensi pesantren akan dilihat dengan menggunakan teori nilai. Teori Nilai membahas dua masalah yaitu masalah Etika dan Estetika. Etika membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia sedangkan estetika membahas mengenai keindahan. Ringkasnya dalam pembahasan teori nilai ini bukanlah membahas tentang nilai kebenaran walaupun kebenaran itu adalah nilai juga. Pengertian nilai itu adalah harga dimana sesuatu mempunyai nilai karena dia mempunyai harga atau sesuatu itu mempunyai harga karena ia mempunyai nilai. Dan oleh karena itu nilai sesuatu yang sama belum tentu mempunyai harga yang sama pula karena penilaian seseorang terhadap sesuatu yang sama itu biasanya berlainan. Bahkan ada yang tidak memberikan nilai terhadap sesuatu itu karena ia tidak berharga baginya tetapi mungkin bagi orang lain malah mempunyai nilai yang sangat tinggi karena itu sangatlah berharga baginya.

Secara singkat definisi etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia (baik dan buruk) menurut situasi yang tertentu. Jelaslah bahwa fungsi etika itu ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia (baik dan buruk) akan tetapi dalam prakteknya etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama (relatif) yaitu tidak terlepas dari alam masing-masing. Namun demikian etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum

atau dapat diterima oleh semua bangsa di dunia ini. Perbuatan tingkah laku manusia itu tidaklah sama dalam arti pengambilan suatu sanksi etika karena tidak semua tingkah laku manusia itu dapat dinilai oleh etika.

Estetika dan etika sebenarnya hampir tidak berbeda. Etika membahas masalah tingkah laku perbuatan manusia (baik dan buruk). Sedangkan estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuan estetika adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah itu. Yang jelas dalam hal ini adalah karya seni manusia atau mengenai alam semesta ini (Sumedi dkk: 2008)

Afiliasi politik pesantren yang dibangun kiai tidak bisa dilepaskan dari unsur nilai. Penilaian proses dan motivasi yang mendorong afiliasi politik yang dilakukan kiai berada dalam bingkai penilaian, maka untuk mengukur nilai baik dan buruk sangat subjektif, tergantung dari kesepakatan yang dibangun dalam suatu budaya tertentu. Eksistensi pesantren sebagai sebuah implikasi dari afiliasi politik juga tergantung dari penilaian, sehingga yang berhak memberikan penilaian adalah suatu kebaikan dan keburukan yang sudah disepakati oleh komunitas pesantren An-Nawawi.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, sesuai dengan urutan wawancara, dan tidak memakai sistem angket atau kuesioner. Teknik wawancara mendalam berguna untuk memperoleh data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan, untuk mendapatkan penafsiran yang utuh tentang suatu informasi.. Untuk memperoleh validitas data, wawancara dilakukan secara berulang terhadap informan yang berbeda dengan item atau masalah yang sama. Dengan demikian, diharapkan data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang difokuskan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini juga dilakukan studi pustaka, dengan menganalisa literature-literatur yang terkait dengan permasalahan, seperti: buku-buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah, surat kabar dan sebagainya. Penelitian ini juga dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen, arsip, dan website.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklasifikasikan tersebut dikonstruksikan ke dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh.

Letak Geografis Pesantren

Pesantren An-Nawawi Berjan berada Kabupaten Purworejo, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota berada di kota Purworejo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di utara, Kabupaten Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di timur), Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Bagian selatan wilayah Kabupaten Purworejo merupakan dataran rendah. Bagian utara berupa pegunungan, bagian dari Pegunungan Serayu. Di perbatasan dengan DIY, membujur Pegunungan Menoreh. Purworejo berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api, dengan stasiun terbesarnya di Kutoarjo.

Kabupaten Purworejo terdiri atas 16 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purworejo. Alun-alun Purworejo, seluas 6 hektar, konon adalah yang terluas di Pulau Jawa. Aktivitas ekonomi kabupaten ini bergantung pada sektor pertanian, di antaranya padi, jagung, ubi kayu dan hasil palawija lain. Sentra tanaman padi di Kecamatan Ngombol, Purwodadi dan Banyuurip. Jagung terutama dihasilkan di Kecamatan Bruno. Ubi kayu sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Pituruh.

An-Nawawi adalah sebuah pesantren yang berdiri di tengah-tengah masyarakat agamis, tepatnya berada di pedukuhan Berjan, desa Gintungan, kecamatan Gebang kabupaten Purworejo. Gintungan merupakan desa yang relative masih hijau disekelilingnya terhampar sawah yang masih luas. Karena memang masyarakat desa Gintungan mayoritas pekerjaannya adalah petani. Data kependudukan yang diperoleh dari arsip desa Gintungan diperoleh bahwa, masyarakat di desa ini berjumlah 2791, dengan rincian, penduduk berjenis kelamin laki-laki 1386 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan 1405 orang, jumlah itu terbagi menjadi 70 kepala keluarga (Data Demografi desa Gintungan:2009)

Ditinjau dari posisinya, desa Gintungan dibatasi lima desa dari empat arah, Di sebelah barat berbatasan dengan desa Seren, di sebelah timur berbatasan dengan desa Bulus dan desa Miranti, di sebelah utara berbatasan dengan desa rendeng, dan di sebelah selatan berbatasan dengan desa Lugosobo.

Jalur transportasi dari desa Gintungan ke tempat-tempat penting dipastikan tersedia kendaraan umum. Adapun jarak ke ibu kota kecamatan kurang lebih 4 kilometer, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih 3,5 kilometer dan jarak ke ibu kota propinsi kurang lebih 125 km. (wawancara dengan Jainal Abidin, 7 Desember 2009). Desa Gintungan masih berada dalam kategori masyarakat agraris, karena sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani dan buruh tani, namun akhir-akhir ini buruh pabrik jumlahnya terus meningkat, sedangkan untuk jumlah profesi PNS, pedagang, dan wiraswasta, masih dibawah profesi tani dan buruh tani. Untuk perinciannya apat dilihat sebagai berikut; petani 417 orang, buruh tani 754 orang, PNS 38 orang, pedagang 26 orang, buruh pabrik 512 orang, sedangkan wiraswasta 25 orang (data demografi desa Gintungan, 2009).

Sejarah Berdirinya Pesantren An-Nawawi

Pondok Pesantren An – Nawawi Berjan, Desa Gintungan, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo didirikan pada tahun 1870 M oleh Al Marhum Al Maghfurlah KH. Zarkasyi dengan nama “Mafatihul ‘Ulum”. KH. Zarkasyi adalah putra dari Ky.Asnawi dan dilahirkan di desa Tempel Tanggul, Sidomulyo Purworejo. Beliau

memperoleh pendidikan agama sejak kecil dari orang tuanya, dan setelah menginjak dewasa beliau meneruskan belajar di pesantren Bangil Jawa Timur. Setelah beberapa tahun belajar di pesantren Bangil kemudian KH. Zarkasyi melanjutkan pendidikannya dengan pergi ke Makkah untuk berguru kepada KH. Abdul Karim Banten Jawa Barat (Beliau adalah paman Syaikh Nawawi Banten), ilmu yang diperoleh adalah Ilmu Thoriqoh yang dikenal dengan Thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsyabandiyyah. Sepulang dari Makkah KH. Zarkasyi kemudian berguru kepada K. Sholeh di Darat Semarang untuk memperdalam ilmu bidang Syari'at. Di samping menjadi guru dari KH. Zarkasyi, K. Sholeh Darat adalah juga teman belajar Thoriqoh ketika masih di Makkah.

Setelah bertahun – tahun memperdalam ilmu di berbagai pondok pesantren, kemudian beliau bermukim di Desa Dunglo, Baledono, Purworejo. Kemudian oleh Syaikh Sholeh Darat dianjurkan untuk mendirikan masjid di Dukuh Berjan dengan membekali dua buah batu bata merah. Dan mulai saat itulah berdiri sebuah masjid yang lambat laun berkembang menjadi sebuah pondok pesantren sampai saat ini.

Kemudian pada sekitar tahun 1960, Kepala Pondok waktu itu (Bp. Najmuddin) bermusyawarah dengan para pengurus tentang nama pondok yang lafalnya terdiri dari lafal jama' semua. Maka mereka mengambil keputusan merubah nama Pondok Pesantren menjadi "Maftahul Ulum" atas persetujuan pengasuh (KH. Nawawi). Pada tahun 1965, sewaktu kepemimpinan dilanjutkan oleh KH. Nawawi, bin KH. Shiddieq bin KH. Zarkasyi, nama pondok pesantren diganti dengan nama " Roudlotut Thullab " yang berarti Taman Pelajar atau Taman Siswa, dan kemudian pada tanggal 7 Januari 1996, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1416 H, kembali diganti menjadi " An – Nawawi " seperti yang kita kenal sekarang ini. Nama terakhir ini dipilih, karena 2 (dua) alasan pokok, yaitu : Pertama, dalam rangka tafaulan (mengharap barokah) kepada muasis atau pengasuh ke – tiga pondok pesantren, Al Marhum Al Maghfurlah KH. Nawawi bin Shiddieq. Kedua, Sebagai tonggak sejarah bahwa pada masa KH. Nawawi inilah, sistem atau metode pengajaran dikenalkan kepada sistem madrasi atau dalam dunia pendidikan modern dikenal dengan istilah klasikal.

Pondok Pesantren ini sejak awal berdirinya sampai sekarang telah mengalami 4 (empat) kali estafet kepemimpinan. Periode pertama, kepemimpinan pondok pesantren dipegang langsung oleh pendirinya, yaitu Al Marhum Al Maghfurlah KH. Zarkasyi. Pada masa ini, sebagaimana layaknya sebuah pondok pesantren, diawali dengan dibangunnya sebuah surau sederhana terbuat dari bambu. Santri yang mengaji pun masih terbatas dari lingkungan sekitar. Karena itu, Sistem pendidikan yang diterapkan masih berkisar pada pokok – pokok dasar 'Ubudiyah (peribadatan) dan berbagai pengetahuan praktis lainnya, yang diantaranya bersumber pada kitab Majmu' Lathoifut Thoharoh, karya gurunya sendiri, Syech Sholeh Darat.

Setelah KH. Zarkasyi wafat, maka kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh putranya yang bernama KH. Shiddieq. Sejalan dengan kedudukan beliau yang bukan hanya sebagai pengasuh pondok pesantren, akan tetapi juga dikenal sebagai Mursyid Thoriqoh Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah, maka keberadaan pondok pesantren (Waktu itu masih Miftahul Huda) lambat laun mulai berkembang dan juga semakin banyak pula santri yang datang dari luar daerah untuk berguru kepada beliau KH. Shiddieq.

Pada kepemimpinan periode ketiga pondok pesantren dipimpin oleh salah seorang putra KH. Shiddieq, yang bernama KH. Nawawi.

Semenjak kecil, KH. Nawawi hidup dan dibesarkan dalam lingkungan pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren tempat beliau berguru antara lain, Pondok Pesantren Termas Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Darus Salam Watucongol Magelang, Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, dan Pondok Pesantren lain di Jawa.

Idiologi Politik

Proses dan faktor-faktor afiliasi politik yang dilakukan pesantren terkait dengan masalah idiologi yang mempengaruhi pemahaman kiai pesantren. Disamping kalkulasi ekonomi politik seperti yang disampaikan diatas, maka ada yang juga sesuatu yang

menjadi dasar keputusan untuk berafiliasi. Bagi kiai dan pesantren keuntungan ekonomi bukanlah segala-galanya, akan tetapi ada lagi yang lebih penting yaitu ideologi yang menjadi dasar pijakan untuk berafiliasi dengan partai Golkar. Filosofi K.H. Achmad Chalwani sendiri adalah "Menjadi hamba Allah yang diridloi di dunia dan akhirat dan bermanfaat bagi sesama umat", beliau mempunyai harapan agar semua komponen bangsa bersatu, bahu membahu mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera dan diperhitungkan dalam percaturan internasional. Untuk itu diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Tim PP An-Nawawi, 2008: 168)

Partai Golkar dalam platformnya menjunjung tinggi ajaran agama, yang dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan agama. Etika dan moralitas adalah saripati ajaran agama dan buah dari keberagamaan itu sendiri. Bagi Golkar agama menduduki posisi yang sangat penting dan harus diutamakan. Dengan demikian seluruh langkah perjuangan senantiasa dilandasi nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan agama. Selanjutnya, partai Golkar mengutamakan pembangunan hukum untuk keadilan dan tegaknya HAM. Dalam kerangka ini, maka harus diupayakan tegaknya supremasi hukum karena Indonesia adalah Negara hukum. Lebih dari pada itu, supremasi hukum harus diletakan sebagai pilar utama, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, konstitusional berdasarkan hukum (Tanjung, 2007: 386-387)

Bila diamati dari pandangan tentang persoalan-persoalan keagamaan dan kenegaraan diatas antara pemikiran KH. Achmad Chalwani dan Platform partai Golkar, maka akan ditemukan banyak kesamaan-kesamaan pemikiran, pertama, ada kesepakatan untuk meletakkan dan mengedepankan agama sebagai landasan perjuangan yang harus diutamakan, kedua, punya kesamaan untuk menyatukan komponen bangsa dengan bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan dan terciptanya supremasi hukum, sehingga menjadi negara bangsa yang berwibawa.

Eksistensi partai Golkar yang bertahan sampai sekarang merupakan tanda, betapa Golkar merupakan partai yang konsis dengan perjuangannya. Akbar Tanjung adalah tokoh dibalik perjuangan itu, seorang politikus cerdas dan piawai, konsisi dan

professional dalam berorganisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Akbar Tanjung juga merupakan sosok pemimpin Golkar yang teguh dengan penampilan tenang dan persuasive, pandai melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan akomodatif.

Di bawah kepemimpinannya Akbar Tanjung dengan paradigma barunya, Golkar terus berjuang membangun citra positif, Partai Golkar menawarkan pembaharuan mulai dari visi, misi, dan Platform partai yang bernilai demokratis, kesetaraan, kerakyatan dan kebangsaan yang plural. Konsistensi, professional, dan Komunikasi persuasive ala Akbar Tanjung menjadi daya pikat tersendiri bagi kiai, yang kemudian dijadikan idiologi dan rujukan tersendiri dalam kegiatan politiknya. Kiai sendiri merupakan orang yang konsis sejak tahun delapan puluhan untuk tetap berafiliasi dengan partai Golkar, perkembangan politik pasca reformasi yang mendorong pesantren-pesantren lainnya untuk mendukung partai-partai Islam Seperti PKB, PAN, PKNU, PPP, dan partai Islam lainnya, ternyata tidak menggoda kiai untuk berubah haluan ikut-ikutan berpindah ke partai-partai berbasis Islam. Kiai mempunyai kesefahaman dengan Akbar Tanjung dan fungsionaris partai Golkar lainnya, yang dengan gigih mempertahankan dan mendukung partai Golkar.

Profesionalitas partai Golkar ini diakui oleh kiai. Prinsip kiai mendukung Golkar karena Golkar punya profesionalitas dalam berpolitik dan mengelola partai, pada saat ini ada orang yang tidak punya profesi politik tetapi terjun ke dunia politik, untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka harus mendukung orang yang punya profesi politik dan ahlinya (wawancara dengan Ustadz Muhlil Musholin, 1 Desember 2009). Pentingnya profesionalitas merupakan suatu pandangan yang sama antara Golkar dengan kiai, karena kesamaan pandangan itulah kemudian menimbulkan kecocokan dalam berafiliasi.

Akbar Tanjung dengan kelihaiannya dan kemampuannya dalam berpolitik, dan ditunjang dengan gaya bicaranya yang tenang dan tidak berapi-api, akbar juga kerap melakukan manufer-manufer politik dengan komunikasi persuasif yang sangat akomodatif, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kiai, sehingga dalam suatu acara kunjungan Akbar Tanjung ke pesantren An-Nawawi, kiai

pernah menunjukkan kekaguman terhadap kepiawaian dan ketenangan Akbar Tanjung dalam berpolitik, dengan mengatakan: "Selamat datang guru ilmu politik saya," ujarnya di hadapan ribuan jamaah Thoriqoh Qodiriyah/Naqsyabandiyah dalam rangka memperingati Haul Syaikh Abdul Qodir al-Jaelani, Minggu (20/4). Sapaan selamat datang kepada Akbar Tandjung itu disampaikan dari atas podium saat Akbar Tandjung berada di tengah-tengah kerumunan jamaah yang berebut untuk beruluk salam. Selanjutnya, Akbar Tandjung duduk di deretan kursi paling depan, di depan panggung utama. (<http://www.bangakbar.com/news/1/tahun/2008/bulan/04/tanggal/20/id/237/index.html>)

Pembahasan Koordinatif

Afiliasi politik yang dibangun kiai tidak begitu terang-terangan menampilkan bentuknya, akan tetapi afiliasi ini sifatnya dukungan secara moral, meskipun dukungan secara moral namun, semua masyarakat sudah tahu kalau kiainya memilih untuk mendukung Golkar. Dukungan kiai dalam kemenangan Golkar dalam berbagai pilihan dilakukan oleh kiai sendiri tanpa dibantu oleh pihak Golkar, kiai mempunyai cara-cara sendiri dalam merekrut masyarakat, ketika melakukan upaya dukungan jamaah, kiai tidak membutuhkan bantuan pihak Golkar (wawancara dengan staf pengurus Golkar DPD Tk. II Purworejo, 7 Desember 2009), namun sebagai suatu partai politik yang professional koordinasi itu tetap ada meskipun tidak formal, kontak-kontak antara pengurus Golkar tetap ada meskipun paling tidak untuk menghindari kesalahan fahaman dalam menyikapi berbagai isu politik yang berkembang. Peristiwa-peristiwa politik atau berita politik terkadang muncul dengan berbagai rumor yang tidak bias dipertanggungjawabkan, maka harus ada penyikapkan bersama, adar tidak menimbulkan perbedaan yang justru akan menimbulkan konflik dan keresahan.

Secara formal, kiai tidak tercatat di dalam struktur kepengurusan Golkar di tingkat kabupaten, namun kiai mempunyai posisi yang sangat kuat karena pengaruhnya yang sangat besar di masyarakat, meskipun kiai tidak ikut secara aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Golkar, namun kiai tetap melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan partai Golkar sampai ke tingkat

pusat, hal ini dibuktikan dengan seringnya kunjungan petinggi partai Golkar ke pesantren An Nawawi, diantaranya adalah Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan lain-lain. Akbar Tanjung sendiri tercatat sudah ke enam kalinya berkunjung ke pesantren ini. Sepanjang tahun 1998-2004 Akbar Tanjung rajin-rajinnnya melakukan konsolidasi politik partai Golkar, antara lain dilakukan dengan bebrbagai interaksi dengan lapisan akar rumput, teruma para kader partai tingkat kabupaten dan kota. Upaya yang dilakukan Akbar Tanjung dan pengurus DPP partai Golkar tersebut amat penting dalam rangka mempertahankan eksistensi partai, terutama dalam rangka penguasaan basis partai hingga ke kabupaten-kabupaten dan pedesaan, upaya Akbar Tanjung tersebut dalam rangka memotivasi para kader Golkar di berbagai tempat, agar tidak mengalami demoralisasi, akibat banyaknya tekanan terhadap partai Golkar (Tanjung, 2007: 112).

Untuk keperluan tertentu kiai juga melakukan kunjungan ke kantor DPD Purworejo, namun frekwensi kunjungannya sangat kecil. Dibanding kunjungan para petinggi Golkar ke pesantren An-Nawawi Berjan ini. Kaitannya dengan partai Golkar, kiai membantu dengan pengaruhnya untuk mendapatkan perolehan suara dalam lingkungan komunitasnya, namun secara tidak langsung kiai juga tetap punya pengaruh dan peran terhadap Golkar, kiai sebagai orang yang selalu membawa misi moral, maka paling tidak kiai juga akan ikut menjaga etika dan moral politik yang dilakukan Golkar. Kiai juga mempunyai hubungan dengan para pengurus Golkar mulai tingkat daerah sampai ke pusat ini dibuktikan dengan seringnya kunjungan para petinggi Golkar ke pesantren An-Nawawi Berjan ini.

Dukungan terhadap Golkar

Sejak kiai memberikan dukungan terhadap partai Golkar, sejak itu pula terbangun keterkaitan-keterkaitan yang tidak bisa dihindari oleh seorang kiai. Pemikiran dan perhatian kiai juga tidak akan lepas dari perhatian orang, dan kiai juga akan menyampaikan pesan-pesan itu dalam beberapa kesempatan yang dianggap akan mempengaruhi suara Golkar. Meskipun afiliasi politik kiai hanya sebatas moral, namun pesan-pesan politi menjadi suatu agenda

tersendiri yang menjadi perhatian kiai dalam berbagai kesempatan tertentu, upaya-upaya untuk memenangkan partai juga akan ada, meskipun kiai sendiri tidak menjadi jurkam resmi Golkar, karena dia menggunakan cara-cara sendiri dengan berbagai kekhasannya.

Dukungan para Pengurus dan Ustadz di pesantren An Nawawi diakui memang ada, namun Para ustadz dan pengurus ini tidak melakukan pengaruh-pengaruh politik terhadap anak-anak didiknya. Mereka hanya berperan memfasilitasi dan membantu penyebaran brosur, dan perangkat-perangkat promosi yang akan disampaikan kepada masyarakat di lingkungan pesantren, mereka juga mempersilakan kader-kader dan caleg dari Golkar untuk datang ke tempat mereka (wawancara dengan Muhlil Musholin, pengurus Pesantren, 1 Desember 2009).

Partisipasi pengurus dan ustadz pesantren dalam kegiatan Golkar secara formal tidak begitu signifikan, akan tetapi secara moral mereka kebanyakan juga mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh kiainya dalam berafiliasi dengan Golkar. Bentuk afiliasinya adalah partisipasi pasif, tapi tetap mendukung. Dalam penyebaran informasi pengurus juga punya cara tersendiri, yang tidak sama seperti yang dilakukan pendukung Golkar secara umum. Hubungan pengurus pesantren cukup baik, mereka sering mengobrol dengan warga masyarakat sekitar (wawancara dengan Ponijan, Kasun Berjan, 7 Desember 2009), namun hubungan itu tidak dimanfaatkan oleh pengurus untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, pengurus faham betul, bahwa pengaruh kiai sudah cukup untuk mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan politiknya.

Para pengurus dan ustadz sementara ini belum terlihat dan terbukti ada yang duduk di kepengurusan Golkar, walaupun mereka sering bergaul dengan para kader Golkar yang kebetulan berkunjung ke pesantren. Lagi-lagi hubungan mereka adalah sebatas hubungan moral yang tidak punya ikatan formal secara politis. Dukungan mereka terhadap Golkar selama ini sebagai takdim terhadap kiai, mereka mendukung afiliasi atas pemahaman yang mereka peroleh dari kiainya dan kebetulan mereka pun kebanyakan sependapat dengan kiainya.

Keterkaitan alumni terhadap afiliasi dengan Golkar ini terlihat jelas ketika dalam pemilihan Kepala Daerah kabupaten Purworejo tahun 2005. Saat itu Golkar mengusung pasangan calon bupati H. Kelik Sumrahadi dan calon Wakil bupati kebetulan adalah alumni pesantren An-Nawawi berjan yairu: Drs. HR. Mahsun Zain. Golkar secara penuh mendukung pasangan ini, begitu juga keluarga besar Pesantren termasuk alumni. Setelah terpilih wakil bupati dari alumni pesantren inilah maka terlihat bahwa, keterkaitan itu tidak dapat dielakan karena ada kepentingan bersama dalam berafiliasi.

Para alumni yang mencalonkan diri dari partai Golkar juga akan mendapatkan perhatian tersendiri dari pesantren, contohnya adalah K.H. Abdul Jalil yang mencalonkan dari Partai Golkar, dan kemudian di dukung oleh kiai. (wawancara dengan Mohammad Arwani, Alumni dan Kasek MTs. An-Nawawi 6 Desember 2009). Dengan bertambahnya alumni yang masuk ke jajaran afiliasi Golkar maka afiliasi itu akan semakin menampakkan bentuknya.

Kiai sebagai tokoh kharismatik dan berpengaruh di masyarakatnya mempunyai peran penting dalam membantu mempengaruhi massa dalam berbagai even pemilihan seperti; pemilu legislative, pemilu presiden maupun pilkada, tentu saja dengan gaya, cara dan pendekatan tersendiri. Golkar sendiri tidak turut campur dengan kegiatan kiai dalam mempengaruhi massa, karena keterlibatan Golkar dalam kegiatan kiai ini justru akan merusak rencana-rencana dan strategi yang akan digunakan kiai, Golkar sudah mempercayakan upaya kemenangan Golkar terhadap kiai, dalam lingkungan komunitasnya (Wawancara dengan Staf Pengurus Golkar DPD Tk.II Purworejo 7 Desember 2009).

K.H.Achmad Chalwani dalam kapasitasnya sebagai pengajar yang selalu mengisi pengajian di masyarakat dengan undangan maupun pengajian di pesantrennya dengan kelompok Thoriqot, kelompok ini dihadiri oleh masyarakat yang datang berduyun-duyun dari berbagai tempat, baik dari lingkungan desa Gintungan sendiri maupun dari daerah lain. Kelompok pengajian ini cukup eksis disukai dan didukung masyarakatnya, momen ini cukup strategis karena rutinitas pertemuan dengan masyarakat jamaah cukup intensif. Dalam momen inilah kiai mempunyai kesempatan untuk mem-

pengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Ajakan untuk memilih Golkar memang tidak terang-terangan, karena kiai sangat memperhatikan etika, kiai hanya menerangkan kepada jamaah pengajian tentang kriteria partai dan calon yang hendak dipilih, kemudian dia sendiri menentukan pilihannya (wawancara dengan H. Ali Sodikin, S.Pd, 1 Desember 2009).

Hubungan kiai dengan alumni juga masih terjalin dengan baik bahkan, bahkan kiai sangat memperhatikan terhadap alumni pesantren, dimata para alumni kiai dipandang sebagai sosok panutan yang sangat dihormati, taushiyah dan bimbingannya selalu diperhatikan dan dijadikan pedoman dan rujukan dalam kehidupannya, bahkan dalam kegiatan pengajian mingguanpun para alumni masih ada yang menyempatkan untuk mengahadirinya secara rutin. Diyakini pula anjuran-anjurannya akan memberikan pencerahan dalam kehidupannya. Penghormatan alumni yang sedemikian itu, memberikan pengaruh besar terhadap apa yang disampaikan kiai, sehingga apa yang dikatakan kiai akan menjadi panutan. Hal ini juga yang berpengaruh terhadap ajakan kiai dalam menentukan pilihan afiliasi politiknya. Dari sekian banyak alumni perkiraan sebageian besar mereka menyalurkan pilihan politiknya ke Golkar, hanya 25 % saja yang ke partai lain (Wawancara dengan Muhlil Musholin, 1 Desember 2009). Ikatan yang terjalin antara kiai dengan alumni pesantren, merupaakn hubungan moral dan kebutuhan spiritual, bukan hubungan material yang diyakini akan lebih kuat dan tahan lama.

Para pengurus, guru, ustadz, dan santri, mereka memposisikan diri sebagai santri atau murid yang senantiasa takdim terhadap kiai, sikapnya terhadap kiai sama seperti alumni, hanya saja mereka berinteraksi dan lebih dekat dengan kehidupan kiai dalam kesehariannya. Pengaruh kiai sangat besar terhadap mereka, sehingga apa yang dikatakan kiai hampir dipastikan akan diikuti mereka (derek kiai). Karena kepatuhan inilah kemudian juga akan diikuti dengan kepatuhan dalam menentukan pilihan politiknya. Kiai sebenarnya memberikan kebebasan kepada mereka, namun karena mereka melihat sosok kiai yang harus dipatuhi akhirnya sebageian dari mereka juga menentukan pilihannya ke partai Golkar, ini dibuktikan dengan kemenangan partai Golkar di TPS-TPS lingku-

ngan pesantren (Wawancara dengan Muhlil Musholin, pengurus Pesantren, 1 Desember 2009).

Dasar dan Prinsip Afiliasi dengan Golkar

Ketika menjalankan perannya sebagai lembaga dakwah, pondok pesantren terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, pesantren yang lebih menitikberatkan pendekatan sosio-kultural. Pesantren ini cenderung “tertutup” dan “tidak bersedia” pesantrennya dikunjungi elite politik dan pejabat pemerintahan. Umpamanya, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Tradisi yang dibangun para kiai pesantren ini “menutup diri” dari kancah politik, terutama politik praktis.

Kelompok kedua, pesantren yang terbuka kepada politik, bahkan ada pula yang terlibat langsung dengan politik praktis. Kelompok ini membuka pintu (lebar-lebar) kepada para elite politik atau pejabat pemerintahan. Pengasuh pesantren juga bersedia berkunjung ke kediaman mereka.

Paling tidak ada tiga alasan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, alasan historis yaitu tradisi yang dirintis pendiri pesantren tersebut memang terbuka kepada siapa saja, termasuk kepada para elite politik dan pejabat teras. Misalnya; Kiai Ahmad Fawaid As'ad, pengasuh PP “Salafiyah Syafi'iyah” Sukorejo Situbondo yang meneruskan tradisi kakek dan abahnya, yang mendirikan pesantren Sukorejo. Kiai Syamsul Arifin —kakek Kiai Fawaid— bersedia menerima kedatangan Van der Plas (Gubernur Hindia Belanda Jawa Timur), Abdul Hamid Ono (pembesar Jepang), dan Panglima Divisi VII Untung Suropati Malang-Besuki. Atau Kiai As'ad —abah Kiai Fawaid— yang menerima elite parpol dan pejabat teras, dari petinggi sampai presiden.

Kedua, alasan teologis. Sebagian kalangan pesantren menganggap politik bisa dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka. Mereka berpendapat, partai politik sebagai alat perjuangan yang berlandaskan kepentingan umum (*mashlahah al-'ammah*), bukan kepentingan kelompok, apalagi pribadi. Bukankah politik pada hakikatnya adalah seni dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan publik?

Ketiga, alasan strategis-pragmatis. Agar pesantren mempunyai kekuatan dan jaringan dengan kekuasaan. Sebab pesantren yang mempunyai basis massa yang jelas dan kuat, kalau kekuatannya tidak dimanfaatkan, akan terbuang percuma begitu saja. Karena itu harus ada tawar-menawar politik dan membangun “kontrak politik” dalam pengertian yang sangat pragmatis.

Sebagai lembaga layanan masyarakat, sudah selayaknyalah bila pesantren tidak hanya puas mendengar keluh-kesah rakyat jelata. Pesantren juga dituntut menyampaikan aspirasi umat tersebut ke hadapan umara. Sudah selayaknyalah pengasuh pesantren harus menjembatani kepentingan rakyat dan penguasa. Sehingga kehadiran pesantren membawa manfaat untuk semua pihak; oleh pemerintah, kalangan pesantren tidak dianggap sebagai “pemberontak.” Bagi umatnya, pesantren tidak dicap sebagai “antek” pemerintah (Syamsul A. Hasan dalam <http://islamlib.com/id/artikel/pesantren-dan-politik/>)

Dalam berpolitik, aspek yang perlu ditegaskan adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik hanyalah sebagai sarana saja. Fungsi esensial justru pada bagaimana melakukan maneuver taktis dalam mewujudkan kebijakan public yang memihak terhadap kepentingan masyarakat, karena kebijakan public merupakan wujud nyata dari interaksi antara Negara dengan masyarakat. Persefektif semacam inilah yang tampaknya menjadi landasan keterlibatan kiai. Kiai berpolitik itu semata-mata bertujuan untuk ibadah kepa Allah. Tidak ada sama sekali untuk tujuan praktis ataupun material, walaupun ada itu adalah untuk kepentingan lembaga.konsep ibadah ini maknanya sangat luas, yaitu segenap aktifitas seorang muslim yang dilandasi keimanan dan ditujuakn semata-mata untuk mengharap ridla Allah.

Didalam ajaran Islam, segenap aktifitas hidup yang tidak melanggar hukum Allah adalah ibadah. Demikian juga dengan berpolitik kalau tidak melanggar adalah ibadah. Hal ini didasarkan atas doktrin Islam yang tidak memisahkan secara tegas antara kehidupan dunia dan akhirat, berpolitik bagi seorang muslim sesuai dengan syariat. Politik juga menjadi bagian pembahasan dalam syariat. Disamping itu berpolitik juga mempunyai tujuan memberikan benteng moralitas, kehadiran kiai dalam berpolitik diharapkan dapat

memberikan sandaran moralitas keagamaan (Patoni, 2009: 163-164)

Afiliasi politik yang dibangun kiai pesantren An-Nawawi berdasarkan beberapa prinsip yang dijadikan landasan pegangan bagi kiai pesantren. K.H. Achmad Chalwani sendiri adalah seorang yang konsis dengan pendiriannya untuk tetap berafiliasi dengan Golkar, kiai tidak ikut-ikutan kesana kemari. Ketika Golkar terpuruk dan pesantren-pesantren banyak yang berafiliasi kepada partai-partai yang berlabel Islam, maka kiai ini tetap tidak bergeming untuk pindah afiliasi ke partai lain (Wawancara Mohammad Arwani, 6 Desember 2009). Bila dikaitkan dengan Visi pesantren, yaitu; "mempertahankan suatu yang baik dari masa lampau dan mau menerima sesuatu yang lebih baik dari masa sekarang", maka akan ketemu, karena menurut kiai, Golkar adalah partai lama yang sudah berpengalaman dan profesional, jangan membuat kekuatan baru yang pengalamannya belum matang, lebih baik memperkuat yang sudah ada dan matang, percuma membuat kekuatan baru yang tidak mumpuni. (wawancara dengan Ali Sodikin, pengurus pesantren An-Nawawi, 1 Desember 2009)

Golkar diibaratkan seperti sebuah kekuatan yang harus dikendalikan oleh orang Islam, didalam tubuh Golkar sendiri banyak kader dari Islam yang tingkat ketaatan bagus, maka sayang kalau mereka tidak didukung, siapa lagi kalau bukan orang Islam sendiri yang mendukungnya. Dalam setiap pemilu caleg ataupun pilkada, kiai tidak hanya memperhatikan partainya, tapi juga unsure ke-NU-an dan Pesantrennya menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Kiai juga selalu mempertimbangkan keseimbangan, bila dalam pilkada, calon bupati dari kalangan abangan, maka wakilnya harus dari kalangan santri (wawancara dengan Ali Sodikin, pengurus pesantren, 1 Desember 2009).

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar afiliasi tersebut diterima dengan baik oleh para pengurus, ustadz, dan masyarakat, walaupun pada awalnya terjadi resistensi, namun akhirnya semuanya dapat menerima dasar dan alasan tersebut. Menurut Ali Sodikin, yang menyebabkan pamor kiai tetap diakui dan dicintai oleh warga pesantren dan masyarakat sekitarnya adalah karena kiai tidak pasif, akan tetapi aktif menjalin hubungan, sehingga murid-murid merasa

diperhatikan. Murid-murid tidak merasa ditinggalkan dan tidak merasa dipaksa untuk mengikuti Golkar. Untuk memilih calon tertentu, kiai biasanya menerangkan lebih dulu criteria masing-masing calon. Sodikin menambahkan bahwa, kiai tidak menjual kekiaiannya untuk politik, akan tetapi, politik ditarik untuk kemajuan umat Islam.

Kepentingan Pesantren

Pesantren An-Nawawi adalah sebuah lembaga yang sedang berkembang, dalam perkembangannya, lembaga itu memerlukan berbagai fasilitas, sarana prasarana, kualitas guru dan sebagainya. upaya untuk memenuhi dan mempertahankan lembaga tersebut perlu di dukung oleh berbagai aspek, agar lembaga tetap eksis dan dipercaya oleh masyarakat. Afiliasi politik yang dibangun dengan partai Golkar tentunya akan berpengaruh terhadap kemajuan lembaga, meskipun tidak secara langsung Golkar sendiri yang memberi bantuan, akan tetapi afiliasi dengan Golkar akan terbangun jaringan dengan pejabat yang lain. Pesantren An-Nawawi sering dikunjungi para pejabat, bukan hanya pejabat dari Golkar, akan tetapi juga pejabat lain, seperti; kunjungan Menkoinfo M. Nuh, menteri Agama Maftuh Basyuni (wawancara dengan Muhlil Musholin, pengurus pesantren, 1 Desember 2009). Sudah menjadi tradisi bagi para menteri dalam setiap kunjungannya selalu memberi bantuan kepada lembaga atau institusi yang dikunjunginya.

Keterlibatan kiai dalam partai politik membawa implikasi terhadap pesantren secara kelembagaan dan terhadap kiai sendiri. Keterlibatan ini terlihat juga dalam perubahan sarana fisik pesantren. Azas manfaat yang digunakan oleh semua kiai rupanya tidak sia-sia. Bantuan material dan non material kerap kali dating ke pondok pesantren sebagai sebuah konsensus-konsensus politik yang dilakukannya. Posisi semua kiai dalam berpolitik berimplikasi dan ditujukan bagi pembangunan pesantren yang mereka miliki (Patoni, 2007: 173)

Kepentingan Masyarakat

Sebagai pemimpin Islam non formal, kiai adalah orang yang diyakini penduduk desa mempunyai otoritas yang cukup besar

dan kharismatik. Hal ini karena kiai adalah orang suci yang dikaruniai berkah. Karena tipe otoritas ini berbeda “diluar keidupan dunia rutindan profane sehari-hari (Weber, 1973: 53), maka kiai dipandang mempunya kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum, dismping kelebihan-kelebihan personalnya. Otoritas kiai dan hubungan akrabnya dengan masyarakat, telah dibentuk oleh kepedulian dan orientasinya kepada kepentingan-kepentingan umat Islam. Para penduduk desa yang biasa menyebut diri mereka wong cilik atau orang awam, sadar bahwa mereka tidak mempunyai pengetahuan cukup untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tingkat nasional. Hubungan yang dekat antaar kiai dengan penduduk desa kemudian menempatkan kiai sebagai penerjemah, yang memberikan penjelasan-penjelasan dalam kontek agama dan mengklarifikasi berbagai masalah bangsa pada umumnya. Posisi menonjol kiai ini lebih nampak ketika partai poltiik secara inten memasuki masyarakat jawa. Ini terjadi karena kiai sendiri adalah bagian dari elit politik, suatu posisi strategis dan diklaim mempunyai kekuasaan yang sah untuk mempersatukan umat dalam menghadapi berbagai ancaman yang nyata dari kelompok-kelompok lain (Turmudi; 2004:2)

Pengaruh dan kedekatan kiai dengan masyarakat yang begitu rekat, memungkinkan kiai untuk selalu memikirkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan santrinya, sehingga afiliasi politik yang dibangun kiai juga tidak akan lepas dari kepentingan Islam dan Masyarakat. Pilihan-pilihan kiai terhadap calon pemimpin dalam setiap kesempatan, akan didasarkan kepada karakteristik orangnya yang dimungkinkan akan mau dan mampu berjuang untuk kepentingan umat atau masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan berdirinya pesantren An-Nawawi yaitu; menyebarkan misi Islam melalui dakwah yang bertanggung jawab terhadap masyarkat luas (Pedoman Kerja Pengurus Pesantren An-Nawawi Berjan; 2009:4)

Motivasi Afiliasi Politik

Perilaku seseorang itu pada dasarnya ditentukan oleh berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan. Perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan dari apa yang ia pikirkan, percaya dan

apa yang ia rasakan. Dorongan-dorongan itulah yang dinamakan motivasi. Keinginan social yang terdapat pada diri setiap orang adalah keinginan untuk bergabung (berafiliasi). Keinginan itu sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk social yang tidak mungkin hidup tanpa berafiliasi dengan makhluk atau individulainnya. Keinginan bergabung sering bercampur dengan keinginan lainnya, seperti keinginan akan penghargaan atau prestise. Biasanya kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang paling penting didalam diri seseorang dalam kehidupannya. Maksud bergabungnya satu individu dengan individu lain adlah untuk mencapai suatu tujua yang menjadi harapannya dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dianggapnya kurang memuaskan.

Ada beberapa macam motivasi atau kebutuhan yang ada pada setiap manusia diantaranya adalah: kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan untuk memiliki dan memperoleh sesuatu, kebutuhan akan prestise, kebutuhan untuk emmbantu, dan kebutuhan untuk mengetahui sesuatu (Krech, 1995: 82). Afiliasi politik yang dilakukan kiai pesantren merupakan bagian dari motivasi/kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain yang didasarkan atas bebrapa késamaan seperti persepsi, idiologi, dan kepentingan kiai pesantren. Motivasi untuk berafiliasi bagi kiai didorong juga oleh factor pendidikan dan pengalaman kiai, perubahan dinamika politik, dan menyikapi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Citra dan Pengaruh Kiai

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang terhadap obyek dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut. Solomon dalam Rakhmat, menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi kognitif, pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi pembentukan citra (Danasaputra, 1995: 34-35). Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu terhadap seseorang.

Penelitian citra dalam upaya membentuk sikap positif publik akan memberi informasi untuk mengevaluasi kebijakan, memperbaiki kesalahfahaman, menentukan daya tarik pesan Hubungan Masyarakat, dan meningkatkan citra humas dalam pikiran publik. (Haney dalam Danasaputra, 1995 : 37)

Citra seseorang dapat diukur dari seberapa besar pemahaman orang lain yang mempunyai kepentingan bersama dalam suatu komunitas tertentu, citra juga dapat diukur dengan sikap, pendapat, atau perilaku orang lain terhadap seseorang. Untuk mengukur citra positif kiai, maka dapat dilihat dari sikap, tanggapan, dan perilaku santri, ustadz, dan komunitas masyarakat pesantren terhadap kiai. Dari pengamatan yang sudah dilakukan, diketahui bahwa, sikap, tanggapan mereka terhadap kiai masih tetap bagus (positif), mereka masih sangat menghormati kiai, mereka masih memberikan tanggapan positif terhadap kiai, dan berperilaku sangat hormat terhadap kiai.

Afiliasi politik yang dibangun kiai ternyata tidak merubah citra kiai, kiai masih dianggap sebagai tokoh yang menjadi panutan bagi publiknya. Afiliasi kiai dengan Golkar dianggap sebagai ijhtihad politik yang tidak perlu dipertentangkan. Pada masa awal kiai berafiliasi dengan Golkar sempat terjadi resistensi dari suatu masyarakat tertentu, namun karena pendekatan dan cara penyampaian kiai cukup bisa dimengerti, maka pada akhirnya, semua dapat menerima dan memahami alasan kiai untuk berafiliasi dengan Golkar (wawancara dengan Mohammad Arwani, Alumni Pesantren dan Kasek MTs. An-Nawawi, 6 Desember 2009).

Afiliasi politik yang dibangun juga tidak mengurangi pengaruh kiai, ceramah atau tausyiahnya masih diperhatikan oleh jamaah dan masyarakatnya (wawancara dengan Muhlil Musholin, pengurus Pesantren An-Nawawi, 1 Desember 2009). kenyataan ini dibuktikan dengan masih membludaknya jamaah Tariqat dan jamaah pengajian mingguan di pesantrennya. Peneliti melihat sendiri iring-iringan masyarakat dari berbagai desa yang akan mengikuti pengajian kiai. Dukungan kiai terhadap orang-orang yang akan dicalonkan baik sebagai caleg, ataupun kepala daerah masih menjadi rujukan masyarakat. Pemilihan Bupati Purworejo yang salah satu

calon wabupnya adalah alumni An-Nawawi berhasil memenangkan Pilkada, itu juga tak lepas dari dukungan kiai, yang kemudian diikuti oleh komunitas masyarakatnya.

Bukti lain yang menjelaskan tentang eksistensi pengaruh kiai adalah terpilihnya beliau sebagai anggota DPD Pusat yang merupakan wakil dari Jawa Tengah. Untuk menjadi anggota DPD Pusat tidak mudah karena Propinsi Jawa Tengah formasinya hanya 4 orang, yang diperebutkan oleh sekian banyak calon. Afiliasi kiai pesantren dengan Golkar tidak menjadikan citra dan pengaruh kiai menurun, namun sebaliknya, justru citra dan pengaruh kiai semakin naik.

Perkembangan Ekonomi Pesantren

Eksistensi lembaga dapat dilihat juga dari seberapa besar peningkatan pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur pesantren. Dalam perkembangannya, sejak tahun 1982, pesantren An-Nawawi ini mengalami perkembangan cukup pesat, ketika pesantren ini mengalami pergantian kepemimpinan dari K.H. Nawawi kepada Putranya K.H. Achmad Chalwani. Pada masa ini, kemasyhurannya terkenal kemana-mana, hal ini dibuktikan dengan banyaknya santri yang datang dari berbagai daerah, bahkan sampai ada yang datang dari luar negeri. Kemasyhuran suatu lembaga tentunya ditopang oleh sarana prasarana yang memadai, sejak tahun 1982, pesantren ini telah mulai menampakkan perkembangannya. Dalam bidang pendidikan misalnya, pesantren ini mempunyai dua bidang pendidikan, yang pertama, pendidikan Madrasah (Diniyah) dan pendidikan formal yaitu: MTs, MA dan STAIAN, untuk pendidikan formal pesantren ini telah memiliki gedung baru dan megah disebelah barat pesantren.

Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, menyadari bahwa kemandirian dalam bidang perekonomian akan menduduki peran strategis dalam setiap aktifitas maupun keputusan yang ditetapkan. Dalam kaitan itu, maka dikembangkanlah pola hidup ber-koperasi dikalangan santri. Kebijakan ini secara bertahap diharapkan akan menjadi Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP), yang diharapkan akan mampu menopang kebutuhan operasional pondok pesantren.

Melihat fasilitas ataupun infrastruktur yang dimiliki pesantren An-nawawi ini, maka kriteria ini sudah memadai untuk menilai bahwa pesantren ini berada dalam kategori pesantren maju, karena ditopang oleh infrastruktur yang memadai. pembangunan gedung-gedung sumber dananya ada yang dari infak masyarakat ataupun bantuan dari pemerintah.

Jaringan Politik

Afiliasi yang dibangun oleh kiai dengan Golkar tentu akan menimbulkan persentuhan bukan hanya dengan pejabat Golkar sendiri akan tetapi juga dengan pejabat lain diluar Golkar. Afiliasi ini dibangun berdampak kepada pergaulan kiai sendiri yang semakin luas, ke berbagai bidang dan Departemen, hal ini dibuktikan dengan kunjungan beberapa menteri dan pejabat Golkar ke pesantren An-Nawawi. Diantara para menteri yang pernah mengunjungi pesantren ini adalah mantan Menteri Agama Maftuh Basuni, mantan Menteri Informasi dan komunikasi Muhammad Nuh, mantan menteri Pemuda dan olah Raga Adiyaksa Daud dan sebagainya, sedangkan dari pejabat Golkar sendiri adalah Akbar Tanjung, Agung Laksono, Aksa Mahmud dan sebagainya.

Jaringan ini tidak berhenti dengan orang-orang pusat saja, akan tetapi dengan pejabat daerahpun kiai mempunyai banyak kenalan/jaringan yang cukup signifikan. Beberapa kali calon yang didukung beliau terbukti jadi, hal ini bias terlihat dengan berhasil mendukung terpilihnya pasangan Pilkada Purworejo tahun 2005, yang didalamnya ada calon wakil Bupati dari santri Pesantren An-Nawawi yaitu; Drs. HR. Mahsun Zain. Ada juga nama K.H. Abdul Jalil yang terpilih menjadi anggota DPR dari Golkar yang juga didukung oleh kiai. Kemudian kiai sendiri pada periode lalu berhasil terpilih menjadi anggota DPD Pusat mewakili daerah Jawa Tengah, dengan total perolehan suara 881.050 suara. Untuk mengumpulkan suara sebanyak itu bukan hal yang mudah, karena memerlukan kekuatan jaringan, meskipun suara itu bukan semuanya dari Golkar, karena di luar Golkar sendiri kiai punya jaringan luas, akan tetapi untuk suara Golkar di Purworejo sendiri sangat signifikan dalam mendukung pencalonan kiai menjadi anggota DPD Pusat.

Sebelum pencalonan pimpinan-pimpinan Golkar Kecamatan di Purworejo dikumpulkan di kantor Golkar Purworejo dalam upaya mendukung pencalonan kiai jadi anggota DPD Pusat (wawancara dengan staf pengurus Golkar DPD Tk.II Purworejo). Kemampuan kiai dalam membangun jaringan dimanfaatkan kiai untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diapresiasi untuk kepentingan lembaga dan dakwah. keterkaitannya dengan partai politik dimanfaatkannya untuk ikut memberikan sumbangsih bagi perbaikan politik baik di lingkungan Golkar sendiri maupun lingkup partai secara lebih luas. Sedangkan bantuan-bantuan yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan lembaga pesantren. Walaupun keuntungan secara pribadi didapatkan karena sudah menjadi haknya sebagai anggota DPD RI untuk mendapatkan gaji yang layak.

Kesimpulan

Sejak kiai berafiliasi dan memberikan dukungan kepada partai Golkar, maka sejak itu pula terbangun keterkaitan-keterkaitan yang tidak bisa dihindari oleh seorang kiai. Keberpihakan kiai terhadap suatu partai politik, menuntut kiai untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya dalam berbagai kesempatan yang dianggap relevan, tidak semua pesantren yang berafiliasi politik mendapatkan tantangan dari komunitasnya, pesantren An-Nawawi justru mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat, jamaah, alumni dan warga pesantren sendiri, walaupun sebelumnya pernah mendapatkan tantangan dari sebagian kalangan. Kepiawaian kiai dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi akan sangat menentukan terhadap keberhasilannya dalam mempengaruhi masyarakat. Meskipun afiliasi politik kiai hanya sebatas moral dan kiai sendiri tidak menjadi jurkam resmi partai Golkar, namun pesan-pesan politik menjadi suatu agenda tersendiri yang mesti disampaikan kepada khalayak, tentu saja dengan cara dan modelnya tersendiri.

Bila diamati dari pandangan tentang persoalan-persoalan keagamaan dan kenegaraan diatas, antara pemikiran KH. Achmad Chalwani dan Platform partai Golkar, ditemukan banyak kesamaan-kesamaan dalam pemikiran, pertama, ada kesepakatan untuk meletakkan dan mengedepankan agama sebagai landasan perjuang-

an yang harus diutamakan, kedua, punya kesamaan untuk menyatukan komponen bangsa dengan bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan dan terciptanya supremasi hukum, sehingga menjadi negara bangsa yang berwibawa.

Partai politik bagi kiai hanyalah sebagai sarana, fungsi esensial justru pada bagaimana ikut berperan dalam mewujudkan kebijakan publik yang memihak terhadap kepentingan masyarakat, karena kebijakan publik merupakan wujud nyata dari interaksi antara Negara dengan masyarakat. Bagi kiai berpolitik itu semata-mata bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada sama sekali untuk tujuan praktis ataupun material, walaupun ada itu adalah untuk kepentingan lembaga. Bagi kiai segenap aktifitas hidup yang tidak melanggar hukum Allah adalah ibadah. Demikian juga dengan berpolitik, kalau tidak melanggar adalah ibadah. Islam sendiri tidak memisahkan secara tegas antara kehidupan dunia dan akhirat, berpolitik bagi seorang muslim sesuai dengan syariat. Berpolitik bagi kiai mempunyai tujuan memberikan benteng moralitas, kehadiran kiai dalam berpolitik diharapkan dapat memberikan sandaran moralitas.

Bila dikaitkan dengan Visi pesantren, yaitu; “mempertahankan suatu yang baik dari masa lampau dan mau menerima sesuatu yang lebih baik dari masa sekarang”, maka akan ditemukan, mengapa kiai berafiliasi dengan partai Golkar, alasannya adalah partai Golkar adalah partai lama yang sudah berpengalaman dan profesional, sehingga tidak perlu membuat kekuatan baru yang pengalamannya belum matang, lebih baik memperkuat dan mempertahankan yang sudah ada dan memiliki kematangan berpolitik dari pada membuat kekuatan baru yang tidak mumpuni.

Lembaga pesantren An-Nawawi sendiri tidak secara formal menyatakan diri berafiliasi dan mendukung Golkar, karena hal ini terkait dengan etika lembaga. Lembaga sendiri tidak terlalu penting untuk menyatakan secara formal berafiliasi dengan Golkar, tapi esensinya adalah bagaimana komunitas pesantren memberikan dukungan terhadap Golkar, terutama ketika pencoblosan di bilik suara.

Dalam dunia politik juga berlaku hukum untung rugi, bila dilihat dari teori ekonomi politik, afiliasi politik yang dibangun

oleh kiai pada akhirnya juga akan bermuara kepada kepentingan. Bagi seorang kiai kepentingan politik bukan hanya untuk dirinya akan tetapi untuk kepentingan lembaga dan umatnya, walaupun pada akhirnya akan berimbis kepada keuntungan dirinya secara pribadi, karena itu merupakan konsekwensi dari kebutuhan manusia. Begitu juga dengan K.H. Achmad Chalwani, beliau membangun afiliasi politik dengan Golkar bukan hanya kepentingan pribadi, ada kepentingan syiar Islam, kepentingan lembaga, dan kepentingan untuk masyarakatnya, namun tidak bias mengelak bila itu juga ada kepentingan pribadi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, karena bila dilihat dari kondisi rumah dan kendaraan yang dimiliki.

Pengaruh dan kedekatan kiai dengan masyarakat yang begitu rekat, memungkinkan kiai untuk selalu memikirkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan santrinya, sehingga afiliasi politik yang dibangun kiai juga tidak akan lepas dari kepentingan Islam dan Masyarakat. Pilihan-pilihan kiai terhadap calon pemimpin dalam setiap kesempatan, yang didasarkan kepada karakteristik orang yang hendak dipilih, ini dimaksudkan agar terseleksi mana orang-orang yang mau dan mampu berjuang untuk kepentingan umat atau masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan berdirinya pesantren An-Nawawi yaitu; menyebarkan misi Islam melalui dakwah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat luas.

Aktifitasnya di berbagai organisasi cukup memberi wawasan untuk memahami dinamika politik yang berkembang, ditambah dengan pergaulannya dengan para politisi baik di tingkat local maupun pusat, kekagumannya kepada politisi Golkar Akbar Tanjung menunjukkan bahwa kiai selalu aktif mengamati dan mempelajari perkembangan politik di tanah air. Latar belakang pendidikan kiai diatas, ditunjang dengan pengalaman berorganisasi yang cukup matang, pergaulannya dengan pejabat dari berbagai departemen, maka cukup kiranya untuk memberikan dorongan kiai dalam menentukan sikap politiknya, sehingga memilih untuk berafiliasi dengan partai Golkar.

Afiliasi politik yang dibangun kiai ternyata tidak merubah citra kiai, kiai masih dianggap sebagai tokoh yang menjadi panutan

bagi publiknya. Afiliasi kiai dengan Golkar dianggap sebagai ijtihad politik yang tidak perlu dipertentangkan. Pada masa awal kiai berafiliasi dengan Golkar sempat terjadi resistensi dari suatu masyarakat tertentu, namun karena pendekatan dan cara penyampaian kiai cukup bisa dimengerti, maka pada akhirnya, semua dapat menerima dan memahami alasan kiai untuk berafiliasi dengan Golkar. Afiliasi politik yang dibangun juga tidak mengurangi pengaruh kiai, ceramah atau tausyiahnya masih diperhatikan oleh jamaah dan masyarakatnya. Kenyataan ini dibuktikan dengan masih membludaknya jamaah Tariqat dan jamaah pengajian mingguan di pesantrennya. Bukti lain yang menjelaskan tentang eksistensi pengaruh kiai adalah terpilihnya beliau sebagai anggota DPD Pusat yang merupakan wakil dari Jawa Tengah. Untuk menjadi anggota DPD Pusat tidak mudah karena Propinsi Jawa Tengah formasinya hanya 4 orang, yang diperebutkan oleh sekian banyak calon. Afiliasi kiai pesantren dengan Golkar tidak menjadikan citra dan pengaruh kiai menurun, namun sebaliknya, justru citra dan pengaruh kiai semakin naik.

Afiliasi politik kiai terhadap Golkar, ternyata tidak mempengaruhi terhadap eksistensi ajaran kiai, ajaran kiai masih tetap menjadi rujukan bagi komunitas pesantren dan masyarakatnya. Aktifitas kiai sampai saat masih tetap padat, selain pengajian untuk santri dan jamaah Thariqotnya, kiai juga harus menyampaikakan pengajian ke berbagai tempat baik di lingkungan komunitasnya ataupun undangan ke berbagai tempat di luar daerah Purworejo.

Daftar Pustaka

- Ahimsha, Heddy Shri. 2007. *Paradigma, Epistemology dan Metode Ilmu Sosial Budaya: Sebuah Pemetaan*. Makalah disampaikan dalam pelatihan "metodologi penelitian", diselenggarakan oleh CRCS – UGM, di Yogyakarta
- Abdullah, Irwan. 2009. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Abidin, Didin. 2005. *Afiliasi Politik Masyarakat Tionghoa terhadap Partai Demokrat dalam pemilu 2004 di Kota Pontianak*, Tesis S2 Ilmu Politik UGM.

- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. terjemahan Hasan Basri, Jakarta, LP3ES.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta, LP3S.
- Garna, Judistira K. 2008. *Dasar dan Proses Penelitian Sosial: merencanakan, Melaksanakan, dan Menulis Hasil Penelitian*, Bandung, Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation.
- Gertz, Clifort. 1989. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta, Pustaka Jaya.
- Ida, laode. 1986. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta, pustaka Sinar Harapan.
- Ikhsn, M. Faiqul. 1996. *Khittab 1926 dan Perilaku Politik Ulama NU*, Tesis Magister UGM.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Krech, David at al. tt. *Individual in Society*. California, McGraw-Hill Kogakusha, LTD.
- K. Yin, Robert. 2003. *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, C.V. Bandung, Mandar Maju
- Muhtadi, Asep Saeful. 2004. *Komunikasi politik NU: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta, LP3S.
- _____ 2008. *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Maunah, Binti. 2009. *Tradisi Intelektual Santri dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan Pesantren di Masa Depan*. Yogyakarta, Teras
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Bandung, Remaja Rosda Karya
- Nazsir, Nasrullah. 2008. *Teori-teori Sosiologi*. Bandung, Widya Padjadjaran

- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Tim Yasogama, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada.
- Patoni, Achmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pedoman Kerja Pengurus Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, 2009. untuk Masa Khidmah 1430-1432 H / 2009-2011 M.
- Rahman, Budhi Munawar. 1995. *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta, Paramadina.
- Tanjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Toekan, Musa Latua. 2000. *Afiliasi Kepartaian Kaum Santri dalam Pemilu 1999*, Tesis Prodi Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana UGM.
- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuban Kiai dan kekuasaan*, Yogyakarta, LKiS.
- Ummatin, Khoiro. 2001. *Kiai Pesantren dan Politik: Kajian Perilaku Memilih pada pemilu 1999 di Yogyakarta*. Dalam Jurnal penelitian Agama, Vol X. No. 2 Mei – Agustus 2001.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purworejo
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/09/teori-nilai/>